

Manual Pelatihan Kelapa Sawit dan Pembiayaannya

Manual pelatihan untuk aktivis



Manual Pelatihan Kelapa Sawit dan Pembiayaannya

Manual pelatihan untuk aktivis

Jan Willem van Gelder



Transformasi untuk Keadilan Indonesia

Jl. Tebet Utara IIA, No. 13 Tebet, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12810, Indonesia
Phone: +62-21-8352955
www.tuk.or.id

Profundo

Naritaweg 10
1043 BX Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31-20-8208320
E-mail: profundo@profundo.nl
Website: www.profundo.nl

Rainforest Action Network

425 Bush St, Suite 300
San Francisco, CA 94104
United States
Tel: 1-415-398-4404
Fax: 1-415-398-2731
www.ran.org

Daftar Isi

Pengantar	1
Bab 1 Gambaran umum atas Sektor Kelapa Sawit Indonesia	4
1.1 Pengantar	4
1.2 Perkembangan luasan perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak sawit mentah/CPO (hulu)	4
1.2.1 Perkembangan di tingkat nasional	4
1.2.2 Perkembangan di tingkat provinsi	5
1.3 Perkembangan industri pengolahan (hilir)	7
1.4 Konsumsi dalam negeri dan perdagangan luar negeri	8
1.5 Perusahaan kelapa sawit di Indonesia	9
Bab 2 Pembiayaan perusahaan kelapa sawit	12
2.1 Pengantar	12
2.2 Pemilik dan penyandang dana perusahaan kelapa sawit	13
2.2.1 Apa yang membuat perusahaan kelapa sawit eksis?	13
2.2.2 Perusahaan induk dan anak perusahaan	13
2.2.3 Siapa yang memiliki perusahaan induk?	15
2.2.4 Pemegang saham institusi	16
2.2.5 Penyandang dana lain perusahaan kelapa sawit	17
2.3 Apa yang ditunjukkan dalam neraca	17
2.3.1 Aktiva: semua yang dimiliki perusahaan	18
2.3.2 Modal pemegang saham: pendanaan oleh pemilik perusahaan sendiri	19
2.3.3 Hutang: pendanaan dari pihak luar	19
2.4 Bagaimana perkebunan kelapa sawit dibiayai?	20
2.4.1 Melihat rasio utang-modal	20
2.4.2 Mengidentifikasi penyandang dana perusahaan	21
2.4.3 Dan apa artinya untuk kebun baru?	21
2.5 Arti penting grup penyandang dana	22
2.6 Hikmah pembelajaran	23
Bab 3 Jenis bank dan struktur tata kelolanya	24
3.1 Pengantar	24
3.2 Apakah bank itu?	24
3.3 Jenis-jenis bank	25
3.3.1 Bank Komersial	25
3.3.2 Investment bank	26
3.3.3 Bank publik	27
3.4 Bank di Indonesia	28

3.4.1	Sekilas tentang sektor perbankan Indonesia	28
3.4.2	Bank Indonesia di sektor kelapa sawit	28
3.4.3	Bank asing utama yang aktif di sektor kelapa sawit Indonesia	30
3.5	Struktur tata kelola	30
3.5.1	Pemegang saham	31
3.5.2	Badan Pengawas	31
3.5.3	Dewan Direksi	31
Bab 4	Bagaimana bank menilai resiko dan membuat keputusan atas utang	32
4.1	Resiko terkait pembiayaan perusahaan kelapa sawit	32
4.2	Resiko keuangan atas pinjaman pada perusahaan kelapa sawit	34
4.2.1	Probabilitas gagal bayar	34
4.2.2	Kerugian saat gagal bayar	35
4.2.3	Peraturan terkait manajemen resiko	35
4.3	Berhadapan dengan resiko kepatuhan	36
4.3.1	Peraturan perbankan Indonesia	36
4.3.2	Aturan tentang anti pencucian uang	38
4.4	Pengambilan keputusan atas permohonan pinjaman	38
4.4.1	Due diligence/uji tuntas	38
4.4.2	Persetujuan oleh Komite Kredit	39
Bab 5	Kebijakan pengelolaan sustainability risks	40
5.1	Pengantar	40
5.2	Mengapa bank mengadopsi kebijakan sustainability risks	40
5.3	Standar kolektif CSR	41
5.3.1	Inisiatif Finansial UNEP	42
5.3.2	Prinsip-prinsip Investasi yang bertanggung jawab - Principles for Responsible Investment (PRI)	42
5.3.3	Prinsip Equator/Equator Principles	43
5.3.4	Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional	44
5.3.5	Guiding Principles PBB atas Bisnis dan Hak Asasi Manusia	44
5.3.6	Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO)	45
5.3.7	Standar CSR kolektif yang lain	45
5.3.8	Keterbatasan dan kekurangan standard-standar kolektif	46
5.4	Kebijakan pengelolaan sustainability risks pada bank	47
5.4.1	Gambaran umum	47
5.4.2	Kebijakan kelapa sawit pada bank	48
5.5	Bagaimana kebijakan sustainability risks diterapkan	50
5.5.1	Instrumen investasi yang bertanggung jawab	50
5.5.2	Peran departemen sustainability risks	51
Bab 6	Menggunakan bank untuk mempengaruhi perusahaan kelapa sawit	53
6.1	Pengantar	53
6.2	Identifikasi bank dan penyandang dana yang terlibat	54
6.2.1	Analisis struktur grup perusahaan kelapa sawit	54

6.2.2	Periksa apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana ia dibiayai	55
6.2.3	Periksa apakah penyandang dana menyatakan bahwa mereka membiayai perusahaan tersebut	56
6.2.4	Cari di internet	57
6.2.5	Minta bantuan ke lembaga riset	57
6.3	Analisis atas peraturan dan kebijakan yang relevan	57
6.3.1	Menganalisis kebijakan sustainability risks penyandang dana	57
6.3.2	Menganalisis aturan dan kebijakan lain yang relevan	58
6.4	Tulis rangkuman yang jelas atas kasus	59
6.4.1	Membiayai perusahaan menciptakan resiko kepatuhan	59
6.4.2	Membiayai perusahaan melanggar kebijakan resiko keberlanjutan	60
6.4.3	Membiayai perusahaan menciptakan resiko finansial	60
6.4.4	Membiayai perusahaan bisa merusak reputasi	60
6.5	Melakukan pendekatan terhadap orang yang tepat dalam lembaga keuangan	60
6.6	Kirim rangkuman kasus Anda kepada analis	61
6.7	Menciptakan tekanan publik pada pengandang dana	61
6.8	Kirim keluhan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang tersedia	64
6.8.1	Lembaga keuangan publik	64
6.8.2	Pedoman OECD untuk perusahaan multinasional	64
6.8.3	Lembaga pengawas di Indonesia	65
6.9	Coba dialog dengan penyandang dana dalam upaya resolusi konflik	65
6.10	Hikmah pembelajaran	66
Appendix 1 Sumber-sumber Informasi		 68
Appendix 2 Hyperlinks		 70

Pengantar

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia terjadi kecepatan yang sangat tinggi, dan telah menciptakan masalah lingkungan dan sosial yang serius: sejumlah hutan yang bernilai tinggi dikonversi menjadi perkebunan; habitat satwa yang dilindungi terancam punah, emisi gas rumah kaca yang signifikan disebabkan oleh alih fungsi lahan gambut, dan banyak masyarakat kehilangan akses terhadap tanah yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup mereka dan yang telah mereka miliki secara turun-temurun.

Di Indonesia, ratusan konflik lahan antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat lokal masih belum bisa terselesaikan. Dalam upaya resolusi konflik, organisasi masyarakat dan para pendukung mereka, LSM nasional dan internasional, sering dihadapkan dengan perlawanan yang kuat dan bahkan ancaman. Oleh karenanya, perlu ada pilihan lain untuk menekan perusahaan-perusahaan ini menyelesaikan konfliknya dengan masyarakat dan membawa mereka untuk berdialog.

Gambar 1: hutan hujan tropis di Kalimantan Timur



Untuk mencapai tujuan ini, ada banyak jalan yang dapat kita upayakan. Kita dapat melobi pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ada, atau mencoba menggunakan standard-standar keberlanjutan yang ada saat ini, misalnya prinsip dan kriteria RSPO yang anggotanya adalah perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Kita dapat mengorganisir perjuangan masyarakat dan mencoba mendapat dukungan politik untuk menekan perusahaan. Kita dapat menggunakan opsi kampanye pasar untuk menekan perusahaan melalui pembeli produk mereka, dengan fokus pada tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi standard yang mereka tetapkan sendiri, contohnya Wilmar dengan kebijakan internasionalnya atas pembelian/pengadaan barang. Opsi lain adalah menyiapkan laporan yang utuh atas dampak operasional perusahaan sawit dan mempublikasikannya, media massa dan media kreatif yang saat ini berkembang bisa membantu meningkatkan dukungan publik atas kasus tertentu.

Semua ini adalah strategi yang penting dan dapat saling melengkapi – oleh karenanya tidak akan tergantikan oleh strategi lain seperti *follow the money*. Bank dan investor memberi perusahaan kelapa sawit banyak modal untuk berkembang, membuat mereka menjadi mitra penting bagi perusahaan-perusahaan ini. Dengan demikian, mereka dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan-perusahaan; misalnya memberi tekanan, menetapkan syarat yang ketat untuk setiap dukungan finansial yang mengalir ke proyek mereka, atau bahkan menolak pembiayaan proyek tertentu.

Bank dan investor lain bisa menjadi potensi yang menarik, menjadi pendukung kerja-kerja LSM yang ingin menyelesaikan konflik sosial dan lingkungan dengan perusahaan kelapa sawit yang bermasalah. Tapi bank-bank biasanya harus diyakinkan untuk menggunakan pengaruh mereka; dan itu bukanlah tugas yang mudah. Seringkali beberapa kampanye yang rumit diperlukan untuk meyakinkan bank bahwa ini adalah kepentingan mereka sendiri; oleh karena itu mereka mesti ikut memecahkan masalah ini daripada membiarkannya tetap ada dan menyebabkan mereka sakit kelapa terus-menerus.

Modul pelatihan ini membahas hubungan antara perusahaan kelapa sawit dan penyandang dana mereka dan mengeksplorasi peluang bagi LSM untuk mengubah praktik perusahaan kelapa sawit menjadi lebih baik. Ini harus dilihat sebagai strategi tambahan, yang dapat melengkapi strategi advokasi dan kampanye lain dan membantu membangun tekanan pada perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk menyelesaikan konflik yang ada.

Isi dari modul pelatihan ini adalah sebagai berikut:

- Bab 1 dimulai dengan gambaran singkat tentang sektor kelapa sawit Indonesia dan perkembangannya selama dekade terakhir. Bab ini menyediakan statistik tentang pertumbuhan luasan dan volume produksi beserta gambaran kelompok utama perkebunan kelapa sawit dan pemilik atau pemegang saham pengendalinya.
- Bab 2 membahas peran bank dan investor di sektor kelapa sawit. Bentuk yang paling penting dari pembiayaan dan beberapa konsep kunci yang terkait dengan ini juga dibahas, yaitu: neraca, asset, hutang dan modal.
- Bab 3 membahas mengenai bank: jenis bank, bank utama (domestik dan asing) yang aktif di Indonesia, bagaimana bank diatur dan bagaimana keputusan diambil.
- Bab 4 membahas secara lebih rinci resiko apa saja yang terkait bagi bank saat mereka membangun perkebunan kelapa sawit, bagaimana bank menilai resiko ini dan bagaimana mereka menghindarinya, apa saja aturan dan lembaga pemerintah mana di Indonesia yang mengawasi manajemen resiko ini dan bagaimana bank membuat keputusan tentang pinjaman baru.
- Bab 5 membahas mengapa bank mengadopsi kebijakan *sustainability risks*, standar umum yang tersedia saat ini, apa saja praktik terbaik dari bank internasional yang menyangkut kebijakan di sektor kelapa sawit, bank Indonesia mana saja yang telah mengadopsi kebijakan *sustainability risks* ini dan apa peran kebijakan ini dalam pengambilan keputusan terkait pinjaman baru.
- Bab 6 membahas bagaimana bank bisa diyakinkan untuk menggunakan pengaruhnya pada perusahaan perkebunan kelapa sawit, pengalaman kampanye yang berguna, dan bagaimana menyajikan bukti tentang kasus/konflik di tingkat komunitas kepada bank.

Modul ini disusun berdasarkan buku *“Finance for Campaigners”*, yang dikembangkan oleh Profundo untuk BankTrack pada bulan Agustus 2012. Satu bab dari buku itu diperbarui untuk modul ini dan dilengkapi dengan rincian khusus mengenai sektor kelapa sawit Indonesia. Bab 1 dan 6 secara khusus ditulis untuk manual ini. Penulis terima kasih kepada Johan Frijns dari BankTrack atas dukungannya dalam mengembangkan panduan ini dan Ryan Brightwell untuk pekerjaan editing-nya yang sangat baik.

Panduan ini disusun oleh Profundo dalam rangka kerangka ***Chain Reaction Research***, yang telah menerima dukungan dana dari David dan Lucille Packard Foundation. Panduan ini akan digunakan dalam sejumlah sesi pelatihan untuk LSM lokal yang terlibat dalam konflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sesi pelatihan ini diselenggarakan oleh Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TUK), dengan dukungan dari Rainforest Action Network (RAN), Walhi dan Friends of the Earth.

TuK INDONESIA ingin menambahkan keterangan bahwa beberapa istilah yang digunakan dalam modul ini dipertahankan dalam Bahasa Inggris, karena belum ada padanan yang sesuai dalam Bahasa Indonesia. Dalam teks, istilah tersebut kemudian dijelaskan definisinya, untuk memperjelas pemahaman pembaca. Modul ini diharapkan untuk tumbuh seiring dengan pengalaman faktual para aktivis dalam beradvokasi terhadap sektor keuangan, oleh karenanya bagian ‘hikmah pembelajaran’ dalam beberapa segmen modul ini diharapkan juga dapat terus diperkaya, seiring dengan upaya kolaboratif semua pihak. Semoga bermanfaat!

Bab 1.

Gambaran Umum atas Sektor Kelapa Sawit Indonesia

1.1. Pengantar

Bab ini menyajikan gambaran perkembangan sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Bab ini disusun sebagai berikut:

- Bagian 1.2 meliputi pengembangan sektor kelapa sawit hulu, menggambarkan peningkatan luasan kelapa sawit dan produksi *Crude Palm Oil* (CPO) di Indonesia
- Bagian 1.3 meliputi sektor hilir kelapa sawit, mengomentari peningkatan kapasitas penyulingan minyak kelapa sawit di Indonesia
- Bagian 1.4 memberikan gambaran konsumsi domestik dan perdagangan CPO di Indonesia.
- Bagian 1.5 membahas jenis perusahaan yang telah berinvestasi di sektor kelapa sawit di Indonesia.

Gambar 2: Pengangkutan TBS di sebuah perkebunan kelapa sawit



1.2. Perkembangan luasan perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak sawit mentah/CPO (hulu)

1.2.1. Perkembangan di tingkat nasional

Tabel 1 menyajikan gambaran perkembangan luasan kelapa sawit, produksi CPO dan hasil per hektar di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Tabel tersebut menunjukkan bahwa area kelapa sawit yang dipanen lebih dari dua kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir: dari 3,3 juta hektar pada tahun panen

2003/04, dengan proyeksi 7,5 juta hektar di tahun 2013/14. Ini merupakan peningkatan sebesar 4,1 juta hektar atau 124%. Peningkatan besar ini lebih tinggi daripada di negara lain dalam periode yang sama. Hasil per hektar terus meningkat, mencapai 4,09 ton per hektar pada tahun 2013/14. Karena hasil yang lebih tinggi ini dari proyeksi sebelumnya, produksi CPO meningkat bahkan lebih cepat dari areal kelapa sawit, tumbuh sebesar 155% dalam sepuluh tahun terakhir dan diproyeksikan mencapai 30,5 juta ton pada tahun 2013/14.

Tabel 1 Luasan perkebunan kelapa sawit, produksi CPO dan produktifitasnya

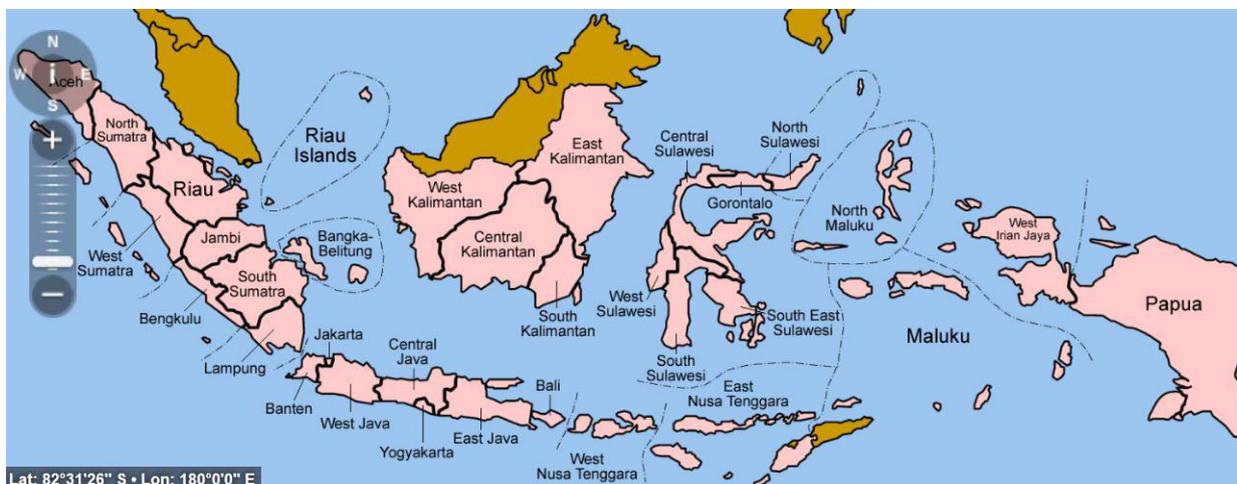
Musim	area yang dipanen (thd ha)	Crude Palm Oil (CPO)	
		Produksi (thd ton)	Hasil (ton/ha)
2003/04	3,320	11,970	3.61
2004/05	3,690	13,560	3.67
2005/06	4,110	15,540	3.78
2006/07	4,560	16,850	3.70
2007/08	5,000	19,400	3.88
2008/09	5,390	21,200	3.93
2009/10	5,780	22,400	3.88
2010/11	6,170	24,300	3.94
2011/12	6,650	26,900	4.05
2012/13	7,080	28,400	4.01
2013/14	7,450	30,500	4.09
Kenaikan 2004-2013 (absolut)	4,130	18,530	0.49
Kenaikan 2004-2013 (relatif)	124%	155%	14%

Sumber: ISTA Mielke GmbH, "Oil World Annual 2003-2013", ISTA Mielke GmbH, April 2014.

1.2.2. Perkembangan di tingkat provinsi

Gambar 3 menggambarkan 33 provinsi di Indonesia

Gambar 3 Provinsi di Indonesia



Dalam lima tahun terakhir, tutupan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia meningkat sebesar 35%, dari 7,4 juta ha pada tahun 2008 menjadi 10,0 juta ha pada tahun 2013. Luasan ini lebih besar dari area yg sudah panen (7,5 juta ha pada tahun 2013/14, lihat Tabel 1), karena total luasan ini mencakup areal kebun yang belum menghasilkan juga. Area yang ditanami dengan kelapa sawit di Indonesia oleh karenanya meningkat dengan kecepatan 520.000 hektar per tahun. Area hampir sama besar dengan Bali, dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya!

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2, sekitar 62 % dari total luasan ini terletak di Sumatera dan 32% di Kalimantan. Sulawesi menyumbang 3%, Bangka Belitung 2% dan Papua 1%. Provinsi-provinsi dengan pertumbuhan total tertinggi dalam lima tahun terakhir adalah Kalimantan Barat, Riau dan Kalimantan Timur, sedangkan provinsi dengan daerah total kelapa sawit terbesar saat ini adalah Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. Riau juga merupakan provinsi dengan kepadatan relatif terbesar dari perkebunan kelapa sawit: lebih dari 24% dari total lahan provinsi ini sekarang tertutup kelapa sawit!

Tabel 2 Pertumbuhan area kelapa sawit per provinsi

Provinsi	2008 (ha)	2013 (ha)	Pertumbuhan (ha)	Pertumbuhan (%)
Aceh	313,745	374,323	60,578	19%
Sumatra Utara	1,017,574	1,240,934	223,360	22%
Sumatra Barat	327,653	394,852	67,199	21%
Riau	1,673,553	2,126,038	452,485	27%
Bengkulu	202,863	322,989	120,126	59%
Jambi	484,137	722,095	237,958	49%
Sumatra Selatan	690,729	865,596	174,867	25%
Lampung	152,511	163,618	11,107	7%
Bangka Belitung	185,508	202,253	16,745	9%
Kalimantan Tengah	870,201	1,026,820	156,619	18%
Kalimantan Barat	499,548	967,290	467,742	94%
Kalimantan Timur	409,566	754,734	345,168	84%
Kalimantan Selatan	290,852	456,492	165,640	57%
Sulawesi Tengah	47,336	112,661	65,325	138%
Sulawesi Barat	94,319	95,396	1,077	1%
South Sulawesi	15,944	41,982	26,038	163%
Sulawesi Tenggara	21,033	40,041	19,008	90%
Papua	27,657	39,928	12,271	44%
Papua Barat	31,144	23,575	-7,569	-24%
Lainnya	34,681	39,208	4,527	13%
Total	7,390,554	10,010,825	2,620,271	35%

Sumber: Kementerian Pertanian, "Luas Areal Kelapa Sawit Menurut Provinsi di Indonesia, 2009 - 2013", Website Kementerian Pertanian (<http://www.pertanian.go.id/infoeksekutif/bun/IP%20ASEM%20BUN%202013/Areal-KelapaSawit.pdf>), dilihat April 2014.

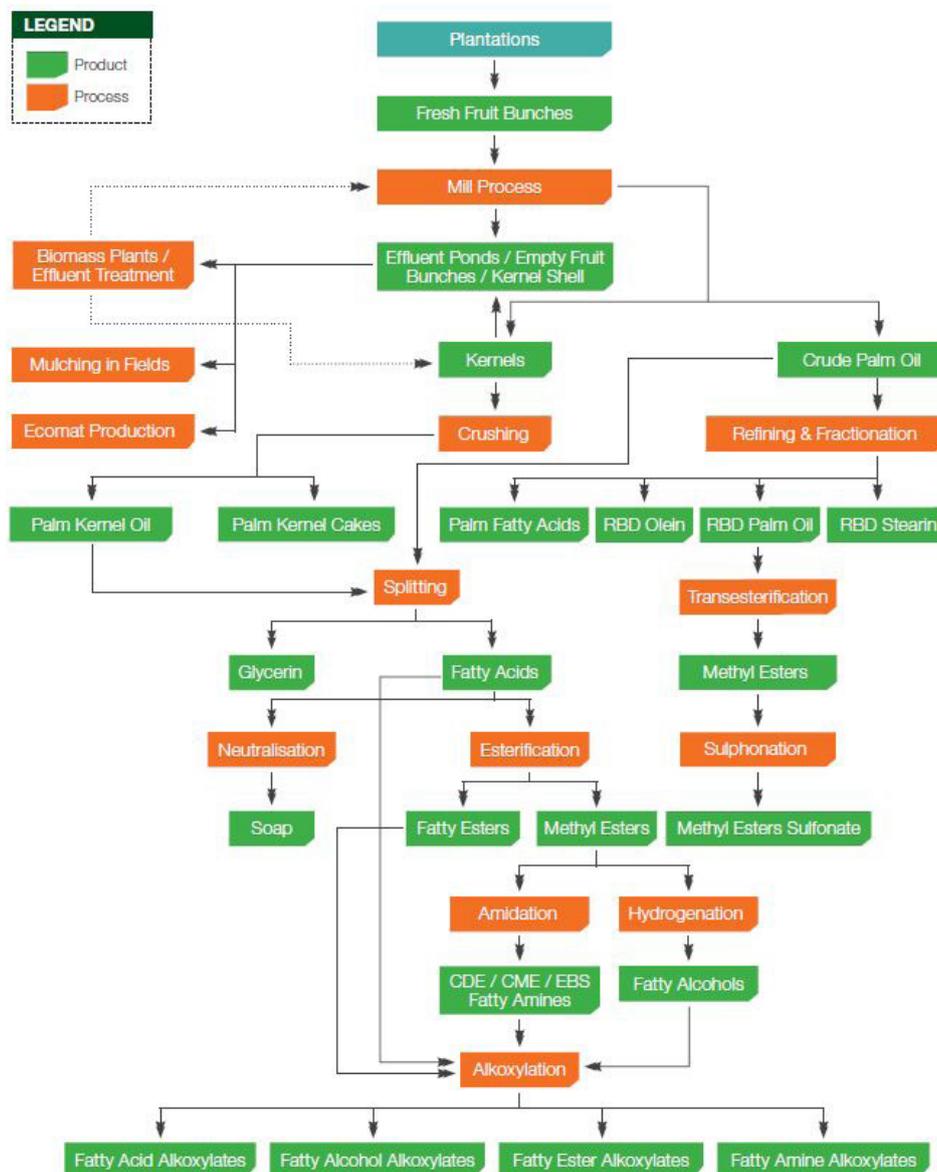
1.3. Perkembangan industri pengolahan (hilir)

Crude Palm Oil (CPO) dan *Palm Kernel Oil* (PKO) - yang diproduksi dengan menghancurkan palm kernel- perlu diproses lebih lanjut di kilang minyak goreng untuk membuatnya cocok dikonsumsi manusia. Kilang menghasilkan minyak sulingan sawit, yang digunakan sebagai minyak goreng dan sebagai bahan dalam industri makanan, tetapi juga sejumlah bahan minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit lainnya (lihat Gambar 4).

Beberapa bahan ini dapat diproses lebih lanjut di pabrik oleokimia, untuk memproduksi sabun, deterjen dan segala macam bahan untuk industri makanan dan kimia.

Yang lain, bentuk yang lebih baru dari pengolahan minyak sawit adalah produksi biodiesel (resmi: *Fatty Acid Methyl Ester* atau FAME), yang dapat digunakan sebagai pengganti diesel berbasis minyak mentah untuk kendaraan listrik dan kapal.

Gambar 4 Gambaran produk kelapa sawit dan tahapan prosesnya



Untuk waktu yang cukup lama, mayoritas CPO yang diproduksi di Indonesia diekspor untuk diproses lebih lanjut di pabrik-pabrik pengolahan di negara lain, seperti di Asia atau Eropa. Hal ini berubah dengan cepat selama dekade terakhir, industri pengolahan domestik tumbuh dengan cukup cepat, investasi baru juga terus ditanamkan. Dalam periode 2013-2013, total 2,7 milyar dollar Amerika akan ditanamkan untuk memperbesar kapasitas pengolahan di sektor hilir ini. Kapasitas pengolahan diharapkan untuk bertambah hingga 45 ton per tahun di tahun ini, lebih dari 2x lipat kapasitasnya, hanya dalam jangka waktu 2 tahun saja!

Angka ini jelas lebih tinggi dari produksi tahunan CPO saat ini (30,5 juta ton). Di tahun 2013, sekitar 63% CPO yang diproduksi di Indonesia sudah bisa diproses di dalam negeri dan angka ini akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.¹

Peningkatan tajam dalam investasi pengolahan kelapa sawit disebabkan oleh struktur pajak ekspor baru yang diperkenalkan pada akhir 2011, yang mengurangi pajak ekspor produk minyak sawit olahan dari 25% menjadi 10%. Secara bersamaan, pajak progresif juga dikenakan pada minyak sawit mentah (CPO).²

Pada saat yang sama, kapasitas produksi oleokimia akan meningkat menjadi 4,2 juta ton per tahun dan kapasitas produksi biodiesel akan ditingkatkan menjadi 4,3 juta ton CPO per tahun.³ Pada tahun 2013 Indonesia memproduksi 2,2 miliar liter biodiesel, yang membutuhkan sekitar 2,2 juta ton CPO - sekitar 8% dari total produksi CPO. Dengan pabrik biodiesel baru bermunculan, volumenya kemungkinan akan mencapai dua kali lipat dalam dua tahun mendatang. Sekitar sepertiga dari biodiesel akan digunakan di dalam negeri, biodiesel saat ini menyumbang 3,9% dari total konsumsi diesel Indonesia. Dua-per-tiganya akan diekspor, terutama ke Eropa yang konsumsi biodieselnnya diatur dengan ketat melalui beberapa kebijakan.⁴

1.4. Konsumsi dalam negeri dan perdagangan luar negeri

Tabel 3 menyajikan gambaran konsumsi domestik di Indonesia, serta perdagangan luar negeri Indonesia untuk minyak sawit. Konsumsi minyak sawit dalam negeri meningkat dari 3,3 juta ton pada musim 2003/04 menjadi kurang lebih 9,5 juta ton pada tahun 2013/14. Ini berarti bahwa konsumsi domestik dan pengolahan kini meningkat sedikit lebih cepat daripada produksi minyak sawitnya, mencapai 190% dalam dekade terakhir. Saat ini, 31% dari total produksi minyak sawit Indonesia diproses di dalam negeri. Pertumbuhan yang kuat ini mungkin dijelaskan oleh meningkatnya penggunaan minyak sawit untuk biodiesel dan produk oleochemical di Indonesia, yang berarti bahwa proporsi yang cukup besar diekspor setelah melalui proses pengolahan.

Meskipun pertumbuhan konsumsi domestik naik, sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia masih sangat berorientasi ekspor: hampir 70% produksi CPO diekspor. Tujuan ekspor utama pada 2011 adalah: India (5,1 juta ton), China (2,4 juta ton), Malaysia (1,7 juta ton) dan Belanda (0,9 juta ton)⁵. Pengiriman ke Malaysia dan Belanda (pada tingkat yang lebih rendah) serta India meliputi sejumlah besar CPO untuk diolah di industri pengolahan di negara-negara tersebut.⁶

Tabel 3 Konsumsi dalam negeri dan perdagangan minyak kelapa sawit di Indonesia

Tahun	Ekspor		Impor (ton)	Konsumsi dalam negeri	
	ton	% dr produksi		ton	% dr produksi
2003/04	8,706,200	72.7%	13,100	3,276,900	27.4%
2004/05	9,861,900	72.7%	19,700	3,717,800	27.4%
2005/06	11,589,900	74.6%	30,300	3,980,400	25.6%
2006/07	12,465,000	74.0%	25,400	4,410,400	26.2%
2007/08	14,100,000	72.7%	32,300	5,332,300	27.5%
2008/09	16,938,000	79.9%	49,000	4,781,000	22.6%
2009/10	16,450,000	73.4%	79,000	5,379,000	24.0%
2010/11	17,070,000	70.2%	49,000	6,309,000	26.0%
2011/12	19,094,000	71.0%	22,000	7,128,000	26.5%
2012/13	21,621,000	76.1%	84,000	7,913,000	27.9%
2013/14	20,900,000	68.5%	120,000	9,500,000	31.1%
Increase	12,193,800	-4.2%	106,900	6,223,100	3.8%
Increase (%)	140%		816%	190%	14%

Sumber: ISTA Mielke GmbH, "Oil World Annual 2003-2014", ISTA Mielke GmbH, April 2014.

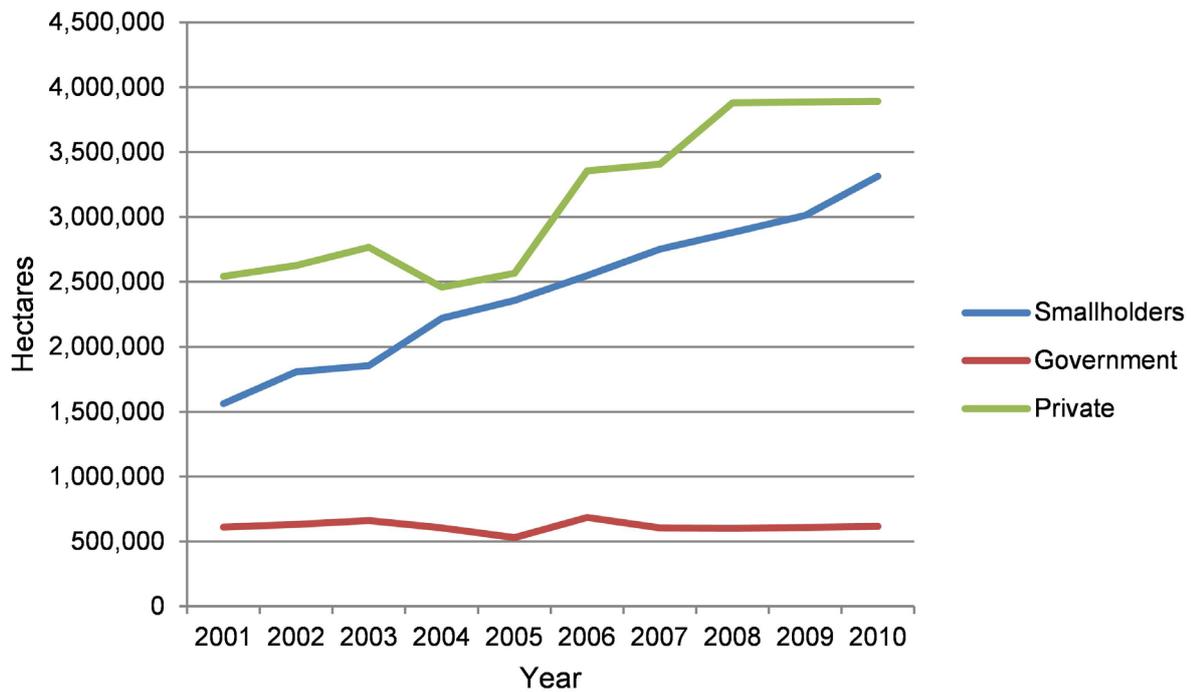
1.5. Perusahaan kelapa sawit di Indonesia

Awalnya, sektor kelapa sawit di Indonesia didominasi oleh perusahaan-perusahaan milik negara. Pengembangan perkebunan swasta dan perkebunan rakyat telah didukung sejak tahun 197, dengan bantuan Bank Dunia, dalam apa yang disebut "skema PIR/NES " (Perkebunan Inti Rakyat, atau *Nucleus Estate and Smallholder*) perusahaan swasta menanam sebidang tanah dengan kelapa sawit (dikenal sebagai inti atau *nucleus estates*) atas nama petani kecil yang tempat tinggalnya ada di dekatnya. Setelah buah matang, biasanya setelah tiga sampai empat tahun, kebun dialihkan ke petani (dikenal sebagai petani plasma), yang mengembangkan perkebunan di bawah pengawasan para pengembang inti. Pengembang inti kemudian diwajibkan untuk membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari petani, mengolahnya menjadi CPO dan menjual CPO ini di pasar.⁷

Gambar 5 menyajikan gambaran dari peningkatan luas areal lahan yang ditanami kelapa sawit di Indonesia oleh tiga jenis perusahaan dalam sepuluh tahun terakhir: petani, perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Perusahaan milik negara terbesar di Indonesia, PTPN, masih menjadi salah satu pemilik perkebunan terbesar di Indonesia, memiliki 0,6 juta hektar pada tahun 2011.⁸

Sementara ukuran perkebunan perusahaan milik negara tetap konstan, petani kecil dan perusahaan swasta telah meningkatkan secara signifikan areal mereka. Petani meningkatkan areal kelapa sawit menjadi sebesar 1,8 juta hektar pada periode 2001-2010, meningkatkan pangsa mereka secara total, dari 33% satu dekade lalu menjadi 42% pada tahun 2010. Perusahaan swasta meningkatkan areal mereka sebesar 1,4 juta hektar pada periode yang sama untuk mencapai 50% dari total areal yang ditanam pada tahun 2010.⁹

Gambar 5 Area tanam berdasarkan tipe perusahaan kelapa sawit



Sumber: Ditjenbun, "Area and Production by Category of Producers", *Website Directorate General of Estate* (ditjenbun.deptan.go.id/cigraph/index.php/viewstat/komoditiutama/8-Kelapa%20Sawit), dilihat bulan October 2012.

Gambar 6 memberikan gambaran tentang kelompok-kelompok kelapa sawit yang paling aktif di Indonesia, termasuk nama perusahaan induk mereka, negara asal dan jumlah *landbank* mereka di Indonesia dan di tempat lain.

Gambar 6 Grup perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia

Grup	Perusahaan	Asal Negara	Total landbank (ha)
Sime Darby	Sime Darby	Malaysia	858,879
Sinar Mas	Golden Agri-Resources	Singapore	699,426
Perkebunan Nusantara	Perkebunan Nusantara I-XII	Indonesia	600,000
Salim	Indofood Agri Resources	Singapore	443,120
Felda	Felda Global Ventures	Malaysia	433,689
Batu Kawan	Kuala Lumpur Kepong	Malaysia	317,142
Wilmar	Wilmar International	Singapore	288,390
Jardine Matheson	Astra Agro Lestari	Indonesia	287,994
Triputra	Triputra Agro Persada	Indonesia	277,000
Surya Dumai	First Resources	Singapore	270,000
Genting	Genting Plantations	Malaysia	228,346
IOI	IOI Corporation	Malaysia	218,433
Sampoerna Agro	Sampoerna Agro	Indonesia	200,000
Kencana Agri	Kencana Agri	Singapore	198,935
PTT	PTT	Thailand	192,000
Harita	Bumitama Agri	Singapore	191,948
Bakrie	Bakrie Sumatera Plantations	Indonesia	169,526
Raja Garuda Mas	Asian Agri	Indonesia	160,000
Dutapalma	Darmex Agro	Indonesia	155,000
ANJ	Austindo Nusantara Jaya	Indonesia	139,038
Musim Mas	Musim Mas	Indonesia	122,572
Gozco	Gozco Plantations	Indonesia	106,544
Sungai Budi	Tunas Baru Lampung	Indonesia	102,050
BW Plantation	BW Plantation	Indonesia	94,669

Bab 2

Pembiayaan perusahaan kelapa sawit

2.1. Pengantar

Sejumlah LSM dan organisasi masyarakat bekerja untuk mempengaruhi kegiatan dan proyek-proyek ekspansi perusahaan kelapa sawit, misalnya untuk menghentikan deforestasi atau menyelesaikan konflik hak atas tanah. Ada beberapa strategi yang dapat berkontribusi untuk tujuan ini, seperti melobi pemerintah demi kepatuhan hukum atau menekan perusahaan terkait yang letaknya di tingkat lebih bawah pada rantai pasokan. “Ikuti aliran uangnya” atau *follow the money* bisa menjadi jalan tambahan untuk meningkatkan tekanan pada perusahaan untuk datang ke meja perundingan, melengkapi strategi lain yang telah disebut di atas.

Gambar 7 Api untuk membakar hutan pada tahap pembangunan kebun sawit



Mengarahkan upaya advokasi pada pendana/penyandang dana perusahaan tidak mungkin menjadi solusi paling sederhana untuk menyelesaikan konflik, tetapi dapat melengkapi cara lain untuk menekan perusahaan. Ketika LSM dan organisasi masyarakat ingin menggunakan alat tambahan ini, penting untuk memahami kapan dan mengapa penyandang dana mungkin memiliki pengaruh atas perusahaan kelapa sawit tertentu, atau atas perkembangan sektor tersebut secara keseluruhan. Menganalisis bagaimana sebuah perusahaan dibiayai akan menunjukkan dari mana uang perusahaan berasal, dan menunjukkan apakah bermanfaat untuk mengarahkan perhatian pada penyandang dana tersebut, karena masalah di perusahaan tersebut mungkin menjadi resiko bagi penyandang dananya, penyandang dana ini mungkin bersedia untuk memberikan tekanan pada perusahaan, ketika didekati dengan cara yang benar. Tapi,

pertama-tama Anda perlu tahu siapa penyandang dana ini, bagaimana mereka berpikir dan bagaimana Anda dapat meyakinkan mereka untuk mengambil tanggung jawab mereka dengan serius.

Untuk membantu mencapai pemahaman tersebut, bab ini akan membahas pembiayaan perusahaan kelapa sawit. Bagian 2.2 secara ringkas menjelaskan pemilik perusahaan dan penyandang dananya. Bagian 2.3 membahas neraca, alat pelaporan keuangan standar yang membantu untuk memahami sumber-sumber perusahaan keuangan. Bagian 2.4 memberi gambaran atas berbagai cara perusahaan kelapa sawit dibiayai, Bagian 2.5 kemudian melihat arti penting berbagai sumber pembiayaan untuk sektor kelapa sawit, sementara bagian 2.6 merumuskan hikmah pembelajaran.

2.2. Pemilik dan penyandang dana perusahaan kelapa sawit

2.2.1. Apa yang membuat perusahaan kelapa sawit eksis?

Perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah sebuah entitas bisnis. Perusahaan ini dimiliki oleh satu atau lebih pemegang saham dan dikendalikan oleh satu atau lebih anggota direksi. Ini bertujuan untuk mengamankan konsesi perkebunan, membuka lahan, menanamnya dengan bibit, memelihara pohon-pohon kelapa sawit, memanen tandan buah segar dan ekstrak minyak mentah sawit (CPO) dan inti sawit di pabrik CPO. Sama seperti bisnis manapun, tujuan utamanya adalah untuk menjaga kontinuitas dan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham.

Untuk melakukannya, perusahaan membutuhkan modal (dengan kata lain, uang). Untuk mengembangkan perkebunan, perusahaan perlu mendapat izin untuk areal konsesinya dan pembukaan lahan. Mereka kemudian perlu membeli bibit, pupuk dan input lainnya untuk mengoperasikan perkebunan, dan perlu membayar para pekerja melakukan pemanenan dan pemeliharaan peralatan. Dan ketika tandan buah segar (TBS) dipanen, perusahaan membutuhkan pabrik kelapa sawit (PKS) untuk mengolah TBS menjadi CPO. Semua kegiatan ini membutuhkan modal.

Untuk mengembangkan sebidang tanah menjadi perkebunan kelapa sawit yang produktif, termasuk sebuah PKS untuk mengolah TBS, diperlukan investasi sekitar US\$ 5.000 (atau Rp 56,5 juta) per hektar. Karena wilayah Indonesia ditanami dengan kelapa sawit dengan kecepatan 520.000 hektar per tahun (lihat bagian 1.2.2), industri kelapa sawit Indonesia perlu berinvestasi sejumlah US\$ 2,6 miliar/tahun, atau sama dengan Rp 29.400 miliar!

Sejumlah besar modal ini disediakan secara bersama-sama oleh pemilik dan penyandang dana dari perusahaan. Pertama-tama kita akan melihat pemilik perusahaan kelapa sawit dan kemudian mengalihkan perhatian ke penyandang dana lainnya, misalnya: bank.

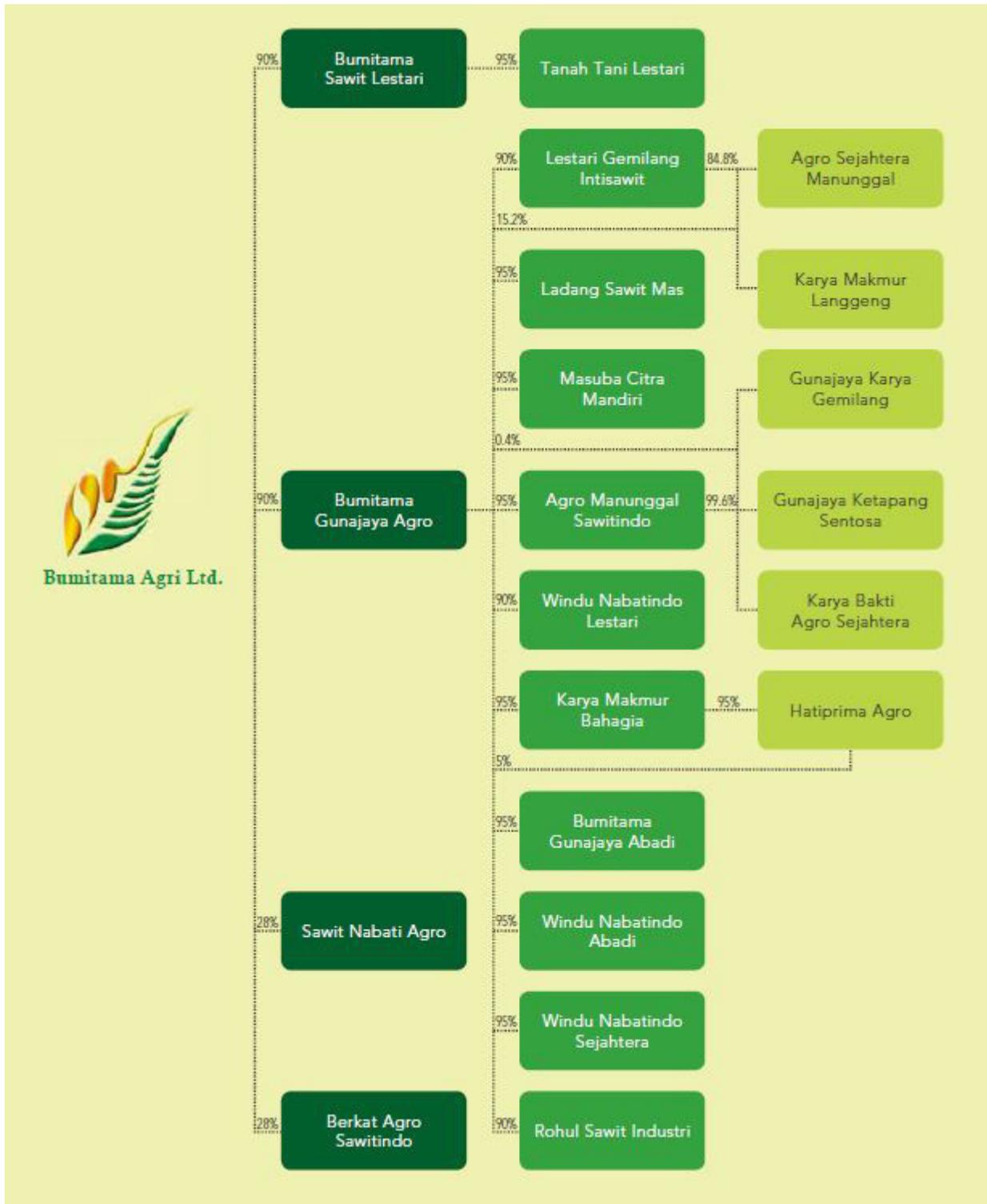
2.2.2. Perusahaan induk dan anak perusahaan

Sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terlibat dalam deforestasi atau konflik dengan masyarakat lokal mungkin dimiliki oleh perusahaan lain. Banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh grup bisnis yang lebih besar, yang memiliki satu induk perusahaan dan beberapa anak perusahaan dan afiliasi (lihat Gambar 8).

Sebuah perusahaan induk terletak di bagian atas piramida. Perusahaan ini memiliki atau mengendalikan banyak perusahaan kecil lain, yang disebut anak perusahaan dan perusahaan afiliasi:

- Anak perusahaan adalah perusahaan yang 50% atau lebih dari sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk.
- Perusahaan afiliasi adalah sebuah perusahaan di mana kurang dari 50% sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk.

Gambar 8 Induk perusahaan Bumitama Agri dan anak perusahaannya yang bergerak di perkebunan



Source: Bumitama Agri, "Annual Report 2012", April 2013.

Dalam rekening keuangan perusahaan induk, anak perusahaan selalu dikonsolidasikan, yang berarti bahwa semua barang-barang dari anak perusahaan dipandang sebagai barang-barang dari perusahaan induk. Ini tidak terjadi untuk perusahaan afiliasi, karena perusahaan induk tidak memiliki kontrol penuh

atas afiliasinya. Untuk perusahaan afiliasi, saham perusahaan induk dalam nilai total barang-barang perusahaan afiliasinya dihitung dan dimasukkan ke dalam rekening keuangan induk perusahaan.

2.2.3. Siapa yang memiliki perusahaan induk?

Seperti halnya dengan semua perusahaan, perusahaan perkebunan kelapa sawit bisa dimiliki oleh negara atau swasta. PTPN adalah perusahaan milik negara; sebagian besar kelompok perkebunan lainnya adalah milik swasta.

Perusahaan milik swasta dapat dibagi lagi menjadi perusahaan yang terdaftar di bursa efek dan yang tidak terdaftar di bursa efek:

- Perusahaan yang tidak terdaftar di bursa efek atau “perusahaan tertutup”, dapat dimiliki oleh satu orang, sejumlah orang (seperti keluarga) atau kelompok yang lebih besar, misalnya sebuah korporasi.
- Perusahaan yang terdaftar di bursa efek, atau “perusahaan terbuka” dimiliki oleh banyak pemegang saham, karena saham mereka diperdagangkan di bursa efek.

Perusahaan induk dari sebagian besar kelompok minyak sawit utama sekarang terdaftar di bursa efek Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, atau di tempat lainnya. Namun beberapa perusahaan induk dari kelompok kelapa sawit besar masih belum terdaftar di bursa efek, termasuk Asian Agri dan Musim Mas. Perusahaan-perusahaan ini sepenuhnya dikendalikan oleh salah satu pengusaha dan keluarganya. Perusahaan perkebunan independen, yang tidak termasuk ke dalam kelompok bisnis besar, sering dimiliki oleh keluarga atau sejumlah kecil pengusaha dengan cara ini.

Perusahaan terbuka (terutama di pasar negara maju) sering memiliki ribuan pemegang saham yang berbeda, semua dari mereka memiliki hanya sebagian kecil dari saham dan tidak satupun dari mereka mengendalikan perusahaan sendirian. Hal ini berbeda untuk sebagian besar perusahaan induk kelapa sawit yang terdaftar di bursa saham, karena mereka masih dikendalikan oleh pengusaha kaya (atau konglomerat). Melalui perusahaan yang dijadikan kedok oleh mereka; atau istilahnya “*shell company*”, biasanya berlokasi di negara-negara yang ramah pajak; taipan ini biasanya memiliki 30% hingga 50% saham, atau bahkan 80% dalam beberapa kasus atas saham perusahaan induknya. Sedangkan sisa sahamnya tersebar di banyak investor swasta dan investor institusional. Kepemilikan saham besar taipan (yang mayoritas adalah laki-laki) memberinya kontrol yang hampir mutlak atas operasi perusahaan induk dan anak perusahaannya.

Kata taipan berasal dari kata dalam bahasa Jepang Taikun (大君), yang secara harfiah berarti “Tuan Besar”. Itu adalah istilah kuno untuk menghormati penguasa independen yang tidak memiliki garis keturunan kekaisaran. Diadopsi dalam Bahasa Inggris menjadi “tycoon”, istilah ini kemudian berkembang dan merujuk pada raja bisnis kaya-raya.

Banyak taipan di Indonesia dan Malaysia berasal dari etnis Cina. Seringkali mereka juga mengendalikan perusahaan di luar bisnis kelapa sawit, misalnya real estate, barang-barang konsumsi, keuangan, pertambangan, pulp dan kertas, serta sektor lainnya. Tabel 4 memberikan gambaran dari beberapa taipan yang paling penting dalam sektor kelapa sawit Indonesia.

Tabel 4 Taipan di sektor kelapa sawit Indonesia

Nama Taipan	Asal negara	Pemegang saham utama dari:	Nilai kekayaan bersih taipan 2013 (US\$ mln)
Robert Kuok and Khoon Hong Kuok	Malaysia	Wilmar International	11,500
Eka Tjipta Widjaja	Indonesia	Golden Agri-Resources	7,000
Lim Kok Thay	Malaysia	Genting Plantations	6,500
Anthoni Salim	Indonesia	Indofood Agri Resources	6,300
Lee Shin Cheng	Malaysia	IOI Corporation	4,300
Sukanto Tanoto	Indonesia	Asian Agri	2,300
Putera Sampoerna	Indonesia	Sampoerna Agro	2,150
Henry Keswick	Scotland	Astra Agro Lestari	2,100
Bachtiar Karim	Indonesia	Musim Mas	2,000
Theodore Rachmat	Indonesia	Triputra Agro Persada	1,900
Martua Sitorus	Indonesia	Wilmar International	1,850
Ciliandra Fangiono	Indonesia	First Resources	1,700
Lee Oi Hian & Lee Hau Hian	Malaysia	Kuala Lumpur Kepong	1,000
Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	Indonesia	Bumitama Agri	940
Aburizal Bakrie	Indonesia	Bakrie Sumatera Plantations	< 800
Budiono Widodo	Indonesia	BW Plantation	< 800
Henry Maknawi	Indonesia	Kencana Agri	< 800
Tjandra Mindharta Gozali	Indonesia	Gozco Plantations	< 800
George Santosa	Indonesia	Austindo Nusantara Jaya	< 800
Santoso Winata and Widarto	Indonesia	Tunas Baru Lampung	< 800

Sumber: Laporan Tahunan; Kroll, L., "Indonesia's 50 richest", *Forbes*, 20 November 2013; Jetley, N., "Malaysia's 50 richest", *Forbes*, 27 February 2014; Webster, B. and Kennedy, D., "Tories accused of hypocrisy over destruction of orangutan habitat", *The Times*, 27 April 2010.

2.2.4. Pemegang saham institusi

Banyak perusahaan induk kelompok kelapa sawit yang aktif di Indonesia sekarang terdaftar di bursa saham. Meskipun taipan, sebagaimana dijelaskan pada bagian 2.2.3, memiliki kepemilikan saham cukup besar di perusahaan-perusahaan induk tersebut, pemegang saham lainnya juga penting. Biasanya pemegang saham lainnya memiliki sekitar setengah dari keseluruhan saham perusahaan.

Di antara pemegang saham lainnya adalah investor swasta, tetapi banyak juga pemegang saham institusi, yang biasanya memiliki kepemilikan saham lebih besar. Investor institusional ini adalah dana pensiun, perusahaan asuransi dan manajer aset dari seluruh dunia. Investor institusi asing besar yang memiliki kepemilikan saham di beberapa perusahaan kelapa sawit antara lain manajer aset Amerika Fidelity, BlackRock, Vanguard Group dan Van Eck Associates Corporation. Investor institusi besar dari Eropa termasuk Inggris Schroder Investment Management serta dana pensiun seperti ABP dan PfZW dari Belanda.

2.2.5. Penyandang dana lain perusahaan kelapa sawit

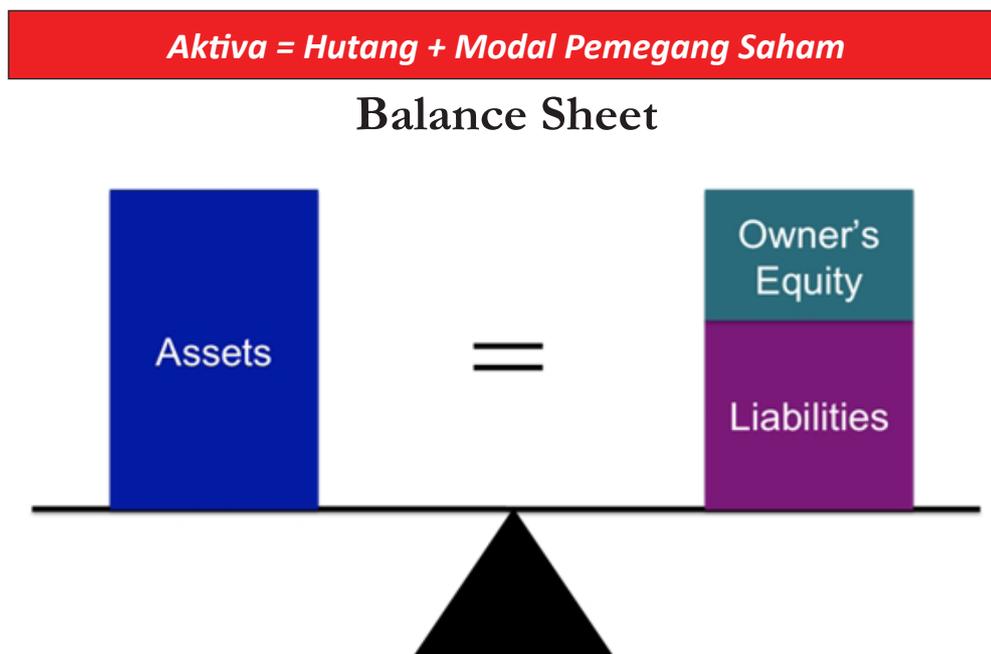
Meskipun pemilik sangat penting dalam membiayai kegiatan perusahaan kelapa sawit, mereka biasanya tidak membiayai perkebunan kelapa sawit dan pabrik sepenuhnya dari mereka sendiri. Ada penyandang dana lain juga, seperti:

- Bank: bank menggunakan uang yang mereka dapatkan dari klien (misalnya tabungan), serta uang yang dipinjamkan dari lembaga keuangan lainnya, sebagai dasar untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan. Dengan pinjaman ini, perusahaan dapat membiayai biaya harian atau investasi jangka panjang.
- Pemegang Obligasi: bukannya menarik pinjaman besar dari satu atau sekelompok bank, perusahaan juga dapat menjual obligasi, yang merupakan potongan pinjaman besar menjadi potongan-potongan kecil. Seperti saham, obligasi dapat diperdagangkan di bursa efek. Obligasi terutama dijual ke investor institusi: dana pension, perusahaan asuransi dan manajer aset. Pemegang obligasi bukanlah pemilik perusahaan, tetapi mereka menerima bunga.
- Pemerintah: pemerintah dapat memberikan semua jenis pembiayaan kepada perusahaan, dalam bentuk pinjaman (murah) atau subsidi.
- Pelanggan dan pemasok: pelanggan dari kelapa sawit dari perusahaan dapat membayar untuk pengiriman di muka, sedangkan pemasok peralatan dan masukan kadang-kadang hanya dibayar jauh di kemudian hari. Dalam kedua kasus, mereka memberikan semacam pinjaman kepada perusahaan.

Untuk mengetahui lebih lanjut seberapa penting kelompok-kelompok penyandang dana yang berbeda ini bagi perusahaan kelapa sawit tertentu, Anda dapat menganalisis neraca perusahaan. Hal ini dibahas dalam bagian berikutnya.

2.3. Apa yang ditunjukkan dalam neraca

Neraca perusahaan, yang dapat ditemukan dalam laporan tahunan atau keuangan, menunjukkan semua barang-barang milik perusahaan serta bagaimana barang-barang ini dibiayai. Neraca dapat dibagi dalam tiga kategori - aset, kewajiban dan ekuitas pemegang saham' - yang selalu seimbang satu sama lain. Per definisi:



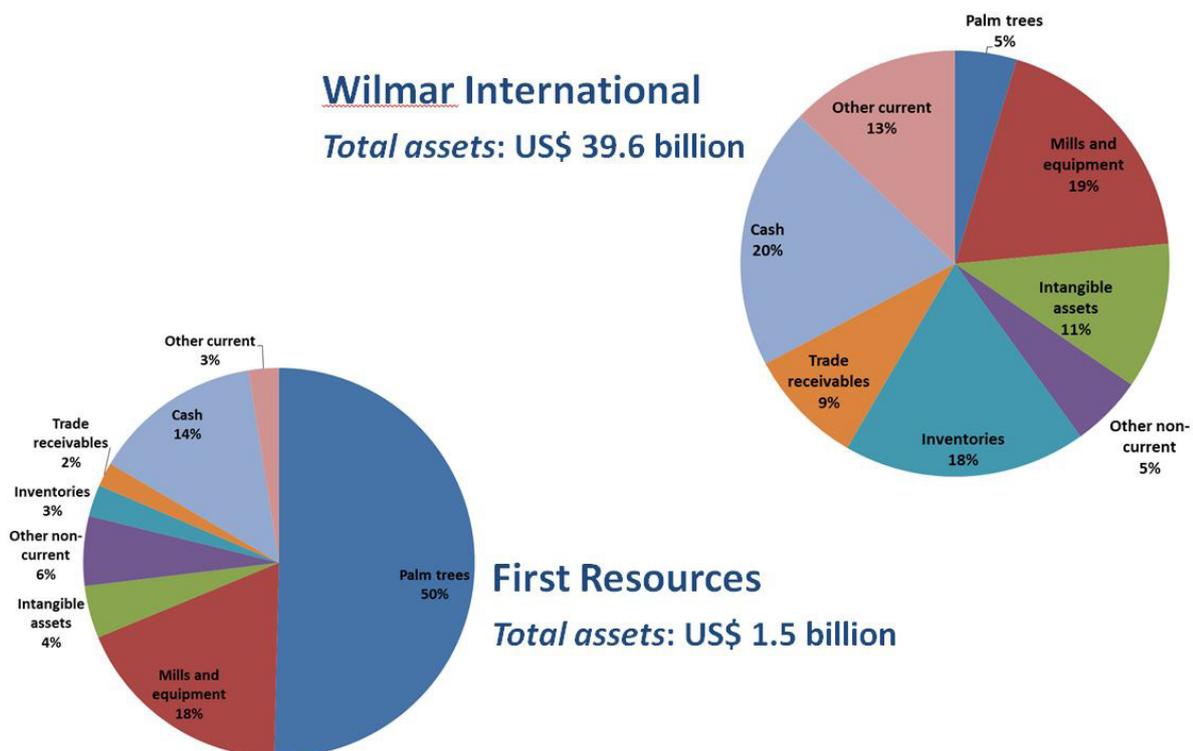
Kategori yang berbeda dari grafik ini akan diterangkan lebih lanjut di bagian berikutnya.

2.3.1. Aktiva: semua yang dimiliki perusahaan

Aktiva adalah semua barang-barang material dan immaterial perusahaan: segala sesuatu yang digunakan untuk memproduksi atau menjual barang dan/atau jasa. Aset dapat dibagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar:

- Aktiva lancar mencakup kas, rekening bank dan segala sesuatu yang diharapkan bisa dikonversi menjadi kas atau digunakan untuk membayar kewajiban lancar dalam waktu 12 bulan. Aktiva lancar mencakup piutang dan persediaan yang dapat diubah menjadi uang tunai cukup cepat.
- Aktiva tidak lancar tidak dapat diubah menjadi uang tunai dengan mudah: mereka digunakan untuk jangka panjang. Aktiva tidak lancar termasuk aset berwujud seperti tanah, bangunan dan mesin, tetapi juga aset tidak berwujud seperti paten atau hak cipta

Gambar 9 Gambaran aset Wilmar and First Resources



Gambar 9 memberikan contoh rincian aset dua perusahaan kelapa sawit yang sangat berbeda. Salah satu perusahaan - First Resources - hanya aktif dalam usaha perkebunan (yang disebut segmen hulu dari sektor kelapa sawit). Hal ini tercermin dalam rincian asetnya, sebagian besar yang terdiri dari pohon-pohon kelapa sawit, pabrik dan peralatan. \

Wilmar International di sisi lain juga memiliki beberapa perkebunan, tetapi juga telah menginvestasikan banyak modal dalam penyulingan dan perdagangan minyak sawit dan komoditas lainnya yang dihasilkan oleh perkebunan mereka sendiri dan oleh pemasok eksternal. Ini disebut segmen midstream dari sektor kelapa sawit.

Segmen hulu dari sektor kelapa sawit terdiri atas supplier-suplier Wilmar: kebun dan pabrik kelapa sawit. Sektor hilit menghasilkan barang-barang konsumsi dari minyak sawit. Inilah yang menjadi bisnis dari para pelanggan Wilmar, seperti Unilever dan Nestle. Dengan aktivitasnya pada perdagangan dan penyulingan, Wilmar masuk dalam segmen midstream.

Fokus Wilmar pada kegiatan *midstream* tercermin dalam pemerincian aset-asetnya, yang jauh lebih terfokus pada persediaan, piutang usaha, kas dan aktiva lancar lainnya, bila dibandingkan dengan First Resources.

2.3.2. Modal pemegang saham: pendanaan oleh pemilik perusahaan sendiri

Modal pemegang saham adalah jumlah total pembiayaan perusahaan oleh pemegang sahamnya sendiri. Ini dapat dibagi menjadi modal pengendali dan modal non - pengendali.

Modal pengendali terdiri dari:

- modal saham perusahaan: uang yang awalnya diinvestasikan oleh pemegang saham dalam perusahaan (atau dengan kata lain, harga yang mereka bayar untuk saham perusahaan); dan
- laba ditahan: keuntungan perusahaan telah dihasilkan dalam tahun sebelumnya minus keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. Saldo laba seringkali menjadi komponen terbesar dari modal.

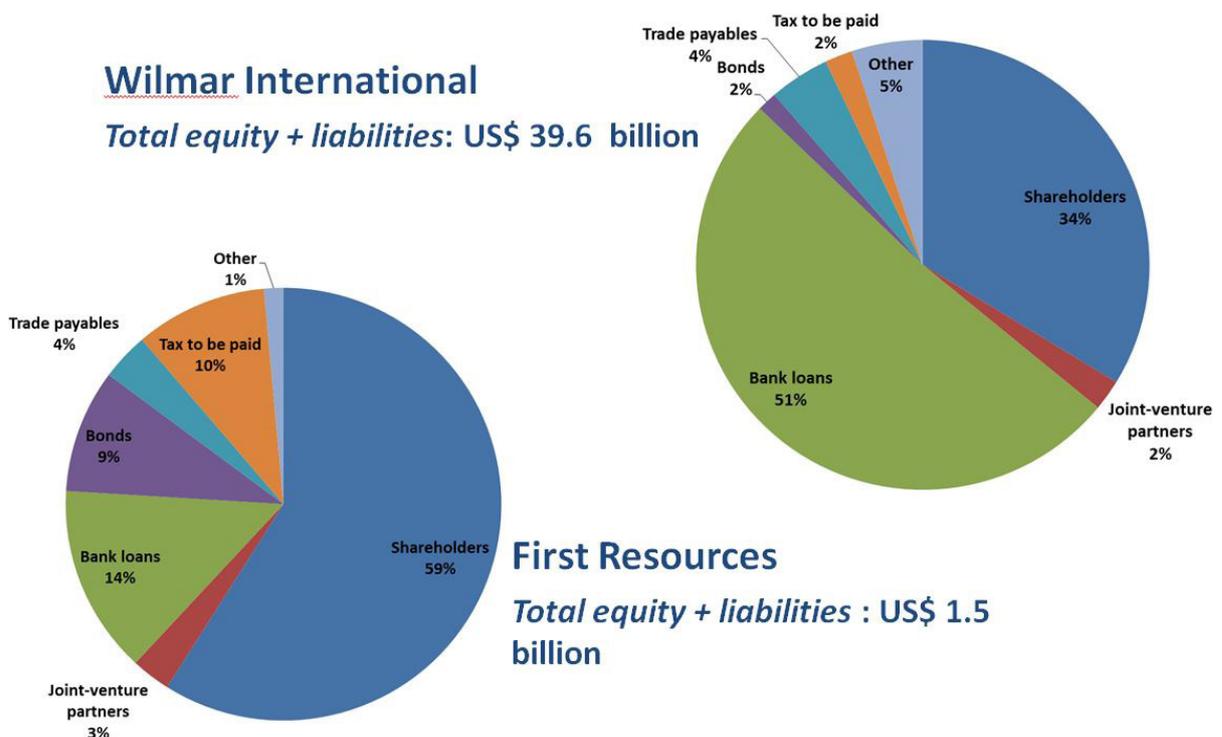
Bagian yang jauh lebih kecil dari total modal pemegang saham adalah modal non pengendali, yang memiliki hak minoritas, misalnya: modal yang disediakan oleh mitra *joint-venture*. Hal ini sangat relevan bagi perusahaan induk besar dengan banyak anak perusahaan: seluruh aset anak perusahaannya diperlakukan seolah-olah mereka sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan induk. Tapi untuk anak perusahaan yang tidak dimiliki secara 100%, ada bagian dari asetnya yang dimiliki pemilik saham yang lain; yang besarnya ditentukan dari persentase kepemilikannya terhadap modal secara total.

2.3.3. Hutang: pendanaan dari pihak luar

Hutang atau pasiva adalah kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak luar. Kewajiban dapat dibagi menjadi kewajiban lancar dan tidak lancar:

- Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan bisa dibayar dalam waktu satu tahun, seperti pinjaman jangka pendek dan obligasi, serta hutang kepada pemasok dan instansi pajak.
- Kewajiban tidak lancar tidak harus dibayar dalam waktu satu tahun, seperti pinjaman jangka panjang dan obligasi, serta kesejahteraan karyawan.

Gambar 10 Rincian modal dan hutang Wilmar dan First Resources



Cara lain untuk melihat hutang adalah dengan membagi mereka menjadi hutang berbunga dan hutang tidak berbunga:

- Hutang berbunga adalah hutang di mana peminjam dikenai biaya karena diberi hak untuk meminjam uang, hal ini termasuk termasuk pinjaman, obligasi dan surat berharga (tanpa jaminan, instrumen utang jangka pendek).
- Hutang tanpa bunga adalah hutang yang tidak dikenai biaya, seperti barang/jasa yang jatuh tempo.

Gambar 10 menunjukkan bahwa First Resources dan Wilmar International tidak hanya sangat berbeda dalam perincian aktiva mereka (lihat Gambar 9), tetapi juga dari pasivanya: modal ditambah hutang. First Resources secara dominan dibiayai oleh pemegang saham (yaitu modal), dengan jumlah yang lebih kecil dari pembiayaan berasal dari pinjaman bank dan dana dari pemegang obligasi. Wilmar International, di sisi lain, dibiayai secara jauh lebih kecil oleh modal pemegang sahamnya, dan hampir tidak menggunakan obligasi sebagai sumber pembiayaan. Sebaliknya, lebih dari setengah total modal dan hutangnya berasal dari pinjaman bank, sebagian besar dalam bentuk perdagangan jangka pendek keuangan, yang digunakan untuk mendukung kegiatan perdagangan komoditasnya yang luas (lihat paragraf 3.3.1).

2.4. Bagaimana perkebunan kelapa sawit dibiayai?

Menganalisis neraca dapat membantu anda untuk memahami bagaimana sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit dibiayai. Sebagaimana dibahas dalam bagian sebelumnya, neraca menunjukkan bagaimana jumlah semua aset perusahaan (semua tanah, bangunan, mesin, kas dan persediaan) dibiayai oleh uang yang diinvestasikan oleh pemegang saham (*equity*) dan semua hutang yang perusahaan peroleh dari bank, pemegang obligasi dan kreditur lainnya.

$$\text{Aktiva} = \text{Hutang} + \text{Modal}$$

Ini berarti bahwa untuk memahami bagaimana sebuah perusahaan dibiayai, Anda harus mengambil dua langkah yang dijelaskan di bagian berikut. Setelah ini, kita akan melihat pembiayaan perusahaan baru.

2.4.1 Melihat rasio utang-modal

Karena kebanyakan perusahaan menggunakan modal dan utang (kewajiban) untuk membiayai kegiatan mereka, rasio utang - modal memberikan indikasi penting bagaimana perusahaan membiayai asetnya:

- Rasio utang-modal yang tinggi (atau *gearing*) menunjukkan bahwa perusahaan mengambil banyak utang dari bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memperluas operasinya, yang dapat mengandung resiko cukup tinggi.
- Rasio utang-modal yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan konservatif dalam pembiayaan dan mengambil resiko lebih kecil. Para pemegang saham harus membiayai bagian terbesarnya.

Seperti yang akan ditunjukkan pada Tabel 5 di bawah ini, kelompok minyak sawit Indonesia rata-rata memiliki rasio utang-modal rendah selama sepuluh tahun terakhir; sekitar 30:70.

Ketika Anda tahu proporsi perusahaan yang mana yang dibiayai oleh modal, Anda dapat mencoba untuk mengetahui uang ini datang dari pemegang saham yang mana: taipan, pemegang saham institusional, atau yang lainnya. Hal ini dibahas dalam bagian 6.2.

2.4.2 Mengidentifikasi penyandang dana perusahaan

Ketika Anda tahu mana bagian dari perusahaan dibiayai oleh utang, Anda dapat mencoba untuk mengidentifikasi kelompok penyandang dana yang telah menyediakan utangan ini. Penyandang dana bisa berwujud sebagai pemegang obligasi, bank, mitra dagang dan instansi pajak. Menganalisis neraca perusahaan menunjukkan kepada Anda penting/tidaknya grup penyandang dana tersebut. Untuk menemukan nama-nama penyandang dana individual yang termasuk dalam masing-masing kelompok, catatan atas laporan keuangan kadang-kadang membantu. Lebih lanjut tentang penelitian ini dibahas dalam bagian 6.2.

2.4.3 Dan apa artinya untuk kebun baru?

Bagian sebelumnya membahas pembiayaan perusahaan induk kelapa sawit yang ada saat ini. Tapi sebagian besar masalah hak-hak sosial, lingkungan dan manusia terjadi ketika perkebunan kelapa sawit baru akan dikembangkan. Memahami bagaimana perkebunan dibiayai oleh karena itu menjadi relevan. Untuk analisis ini, dua situasi dapat dibedakan:

- Bila perusahaan baru akan membangun perkebunan, pemilik harus mendanai beberapa bagian dari investasi itu dari modal mereka sendiri (misalnya uang yang mereka dapatkan di tempat/bisnis lain). Biasanya perlu setidaknya sekitar 30% sampai 40% dari total investasi agar perusahaan dapat menarik pinjaman bank. Sisanya, 60% sampai 70% kemudian dapat dibiayai dengan pinjaman bank, namun bank akan berpendapat, lebih tinggi rasio utang-modal dari sebuah proposal, makin tinggi risikonya.
- Sebagian besar perkebunan baru biasanya dibangun oleh kelompok-kelompok perusahaan kelapa sawit yang sudah menghasilkan banyak uang (yaitu mereka yang memiliki arus kas operasi yang cukup besar). Arus kas ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan: mereka dapat memilih mengambil pinjaman baru untuk membiayai 10% dari perkebunan baru, tetapi dapat juga memilih untuk membiayai perkebunan baru sepenuhnya dari arus kas sendiri tanpa pinjaman baru.

Jika perusahaan menggunakan strategi terakhir ini, rasio utang-modal akan turun dan akan ada lebih sedikit uang yang tersisa untuk membayar dividen kepada pemilik. Oleh karena itu, mereka kemudian akan sering menarik pinjaman umum perusahaan atau menerbitkan obligasi, untuk meningkatkan rasio utang-ekuitas mereka. Pinjaman umum dan obligasi tidak dialokasikan untuk satu perkebunan tertentu.

Apa artinya ini bagi para aktivis? Dalam kasus sebuah perusahaan baru, masuk akal bagi para aktivis untuk fokus pada bank-bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan baru ini. Keuangan bank ini sangat penting bagi perusahaan tersebut, karena mereka biasanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai seluruh investasi dari modal pemegang sahamnya sendiri.

Tapi dalam kasus perkebunan barunya didirikan oleh sebuah perusahaan induk yang sudah eksis, tidak mutlak diperlukan bank untuk memberikan pinjaman khusus untuk perkebunan baru ini. Dalam banyak kasus perusahaan induk tidak akan menarik pinjaman khusus untuk setiap perkebunan baru, tetapi akan membiayai investasi baru dari arus kas. Karena pemegang saham perusahaan akan membuat keputusan terhadap investasi tersebut, dan karena aliran kas akan secara teratur bertambah karena adanya pinjaman-pinjaman baru yang bersifat khusus dan di luar proyek – dan karena diterbitkannya obligasi, sebagai aktivis Anda dapat menuntut pertanggungjawaban seluruh penyandang dana dari pembangunan kelapa sawit baru ini: para taipan, pemegang saham lainnya, bank dan pemegang obligasi.

2.5. Arti penting grup penyanggah dana

Untuk mendapatkan beberapa gagasan tentang arti penting dari relatif dari berbagai kelompok penyanggah dana sektor kelapa sawit di Indonesia, kami telah menganalisis investasi dari 14 perusahaan induk yang telah banyak berinvestasi di sektor minyak sawit Indonesia pada periode 2002-2011. Kami fokuskan pada tiga kelompok penyanggah dana: pemegang saham, pemegang obligasi dan bank.

Tabel 5 menunjukkan bahwa pemegang sahamlah yang sejauh ini menjadi penyanggah dana yang paling penting dalam sektor minyak sawit Indonesia pada periode 2002-2011: secara total, pemegang saham telah menginvestasikan US\$11,8 miliar, atau sebesar 68% dari total investasi. Perusahaan-perusahaan yang paling bergantung pada pemegang saham mereka adalah Genting Plantations dan First Resources. Sebagaimana dibahas dalam bagian 2.2, sejumlah kecil taipan ternyata memegang peran yang paling penting di antara para pemegang saham perusahaan kelapa memegang minyak, tetapi investor institusional (biasanya dari luar negeri) juga memainkan peran besar. Sebaliknya, perusahaan yang paling bergantung pada utang adalah Bakrie Sumatera Plantations dan Indofood Agri Resources, yang memiliki sekitar 50:50 untuk rasio utang-modalnya.

Pemegang obligasi memainkan peran yang relatif kecil dalam sektor minyak sawit Indonesia. Mereka telah menginvestasikan US\$ 978.000.000 di sektor ini dalam sepuluh tahun terakhir, atau 6% saja dari total investasi. Pengecualiannya adalah Indofood Agri Resources, Bakrie Sumatera Plantations dan First Resources, pemegang obligasi memainkan peran yang relatif penting di perusahaan-perusahaan tersebut.

Bank, dengan menyediakan pinjaman, juga berinvestasi di sektor minyak sawit Indonesia pada periode 2002-2011. Secara total mereka telah menginvestasikan US\$4,5 milyar, atau sebesar 26% dari total investasi. Proporsi terbesar dari pinjaman ini dialokasikan ke empat perusahaan minyak kelapa sawit terbesar. Selain itu, perusahaan kelapa sawit yang relatif muda dan berkembang pesat, seperti Gozco Plantations dan BW Plantation, relatif lebih tergantung pada pinjaman bank.

Tabel 5 Penyanggah dana sektor kelapa sawit Indonesia, 2002-2011

Perusahaan	Total investasi 2002-2011 (US\$ juta)	Didanai oleh ... (US\$ juta)			Sumber
		Pemegang saham	Pemegang obligasi	Utang bank	
Golden Agri-Resources	8,105	6,348	0	1,757	10
Wilmar International	2,493	1,471	38	983	11
Indofood Agri Resources	1,945	933	380	631	12
Bakrie Sumatera Plantations	987	441	193	352	13
First Resources	939	571	267	101	14
Astra Agro Lestari	692	618	44	31	15
BW Plantation	330	154	24	152	16
Kencana Agri	327	211	0	116	17
Kuala Lumpur Kepong	320	277	10	33	18
Gozco Plantations	263	89	0	173	19
Genting Plantations	245	240	0	6	20
Sampoerna Agro	233	198	0	34	21
Sime Darby	169	130	8	31	22
Tunas Baru Lampung	151	76	14	61	23
Total	17,197	11,757	978	4,461	
%		68.4%	5.7%	25.9%	

Analisis dalam Tabel 5 berfokus pada investasi yang dilakukan oleh kelompok perkebunan kelapa sawit di perkebunan mereka sendiri (inti). Pinjaman pemerintah dan subsidi tidak termasuk dalam analisis ini, karena mereka belum memainkan peran penting dalam membiayai perluasan kelompok minyak sawit utama dalam dekade terakhir.

Perlu disebutkan bahwa bagaimanapun Pemerintah Indonesia telah sangat mendukung petani kecil dengan menyediakan pinjaman yang dialirkan oleh sejumlah bank di Indonesia sebagai bagian dari apa yang disebut Program Plasma/kemitraan. Petani ini biasanya cukup tergantung pada perkebunan besar dan pabrik CPO mereka, karena mereka tidak memiliki sarana untuk mengangkut TBS mereka pada waktunya untuk PKS. Jadi petani Plasma harus puas dengan harga yang dibayar oleh perusahaan inti; ketergantungan yang memang diciptakan untuk memberikan kontribusi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kelompok perusahaan perkebunan kelapa sawit besar. Secara tidak langsung, oleh karena itu, pinjaman plasma murah dari pemerintah juga mendukung kelompok perusahaan perkebunan.

2.6 Hikmah pembelajaran

Para pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit besar, terutama para konglomerat, adalah penyandang dana yang paling penting dari ekspansi perkebunan di Indonesia. Investor institusional, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan manajer aset, juga memainkan peran penting, baik sebagai pemegang saham maupun sebagai pemegang obligasi/surat hutang.

Bank asing dan domestik juga memainkan peran yang sangat signifikan dan karena itu bisa memiliki pengaruh terhadap perusahaan perkebunan. Mendorong bank-bank untuk menggunakan pengaruh mereka untuk menghindari deforestasi dan menyelesaikan konflik hak atas tanah karena itu bisa menjadi strategi yang berharga untuk diimplementasikan.

Bab 3

Jenis bank dan struktur tata kelolanya

3.1. Pengantar

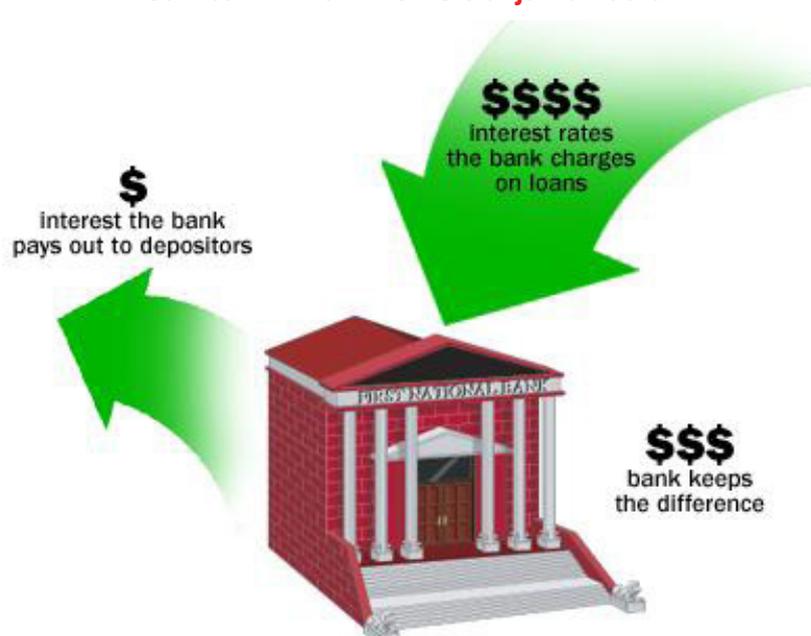
Ada berbagai jenis bank yang berbeda, dengan berbagai jenis pembiayaan dan model bisnis yang berbeda-beda di dunia yang makin mengglobal saat ini. Penting bagi aktivis yang ingin menggunakan bank sebagai tuas perubahan, untuk memahami bagaimana berbagai jenis bank ini terstruktur dan apa yang mendorong mereka - mendapatkan uang, tentu saja; tapi bank bisa mendapatkan uang dengan berbagai jenis kegiatan. Memahami jenis bank dan struktur pengelolaan mereka akan membantu aktivis memahami resiko yang dihadapi perbankan dan bagaimana keputusan diambil (dibahas dalam Bab 4).

Bab ini akan membahas berbagai jenis bank. Bagian 3.2 akan memperkenalkan secara singkat tentang bank. Kemudian bagian 3.3 akan menjelaskan jenis utama dari bank dan membahas tujuan mereka serta model bisnisnya. Bagian 3.5 akan memberikan beberapa informasi tentang struktur tata kelola bank.

3.2. Apakah bank itu?

Bank adalah lembaga keuangan yang sangat kuat yang mengelola uang yang mengalir dalam ekonomi dunia. Mereka memainkan peran kunci dalam menentukan individu, perusahaan atau proyek yang bisa menerima dana dari uang yang mereka kelola. Secara historis, bank mengumpulkan tabungan dari individu yang ingin menyimpan uang mereka dengan aman dan menerima bunga atas tabungan tersebut. Uang ini digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan dan individu lainnya. Selisih antara bunga yang diterima dari perusahaan yang meminjam dari bank dan bunga yang dibayarkan bank kepada individu yang menabung pada mereka adalah bagaimana bank mendapat uang, ini yang terjadi di masa lalu.

Gambar 11 Bank komersial jaman dulu



Jenis perbankan yang seperti ini, masih dipraktekkan oleh banyak bank hingga saat ini, disebut perbankan komersial atau ritel. Tapi ini bukan lagi satu-satunya jenis perbankan. Selama dekade terakhir, bank telah berkembang menjadi lembaga keuangan multinasional kuat yang terlibat dalam berbagai kegiatan yang berbeda di berbagai negara. Bisnis paling penting yang dikembangkan oleh konglomerat-konglomerat selain perbankan komersial adalah *investment banking*, *trading* dan manajemen aset.

Bank dapat dimiliki baik secara pribadi maupun oleh badan pemerintah (bank publik). Bank milik pribadi dapat memiliki model kepemilikan yang berbeda (misalnya terdaftar di bursa saham, dimiliki oleh keluarga, atau dimiliki oleh koperasi), sementara bank publik bisa dimiliki oleh pemerintah, di tingkat provinsi, kota, dll. Bank-bank swasta pada dasarnya berorientasi mencari keuntungan, bank publik sering memiliki tujuan politis yang penting juga.

3.3. Jenis-jenis bank

Ada banyak jenis bank dengan model bisnis yang berbeda, sehingga sangat berguna untuk memahami sedikit tentang 'binatang' yang Anda hadapi ini (dan bagaimana "binatang" itu *diberi makan untuk hidup*). Tiga jenis utama dari bank yang dibahas dalam bagian ini:

- Bank komersial
- Bank investasi; dan
- Bank publik

Dua yang pertama adalah jenis bank swasta. Meskipun biasanya hanya satu kegiatan saja yang mendominasi, banyak bank swasta terlibat dalam kedua perbankan komersial dan kegiatan *investment banking*. Ini disebut grup perbankan.

Banyak bank saat ini telah berkembang menjadi besar dan beragam, seperti: grup perbankan multinasional dengan kegiatan yang berbeda, termasuk perbankan komersial, *investment banking* serta manajemen aset, *private banking*, asuransi dan kegiatan lainnya. Setiap jenis aktivitas memberikan tingkat pengaruh yang berbeda pada perusahaan, menciptakan resiko yang berbeda, dan diatur dengan proses pengambilan keputusan yang berbeda dalam kelompok perbankan.

3.3.1 Bank Komersial

Bank-bank komersial menggunakan tabungan individu, organisasi, institusi dan perusahaan untuk menyediakan pinjaman dan produk-produk keuangan lainnya untuk individu, organisasi, institusi dan perusahaan lainnya. Sebagian besar bank komersial memiliki perusahaan dan divisi ritel:

- Korporasi menyediakan pinjaman dan kredit kepada perusahaan dan proyek. Di antara berbagai jenis pinjaman ialah pinjaman investasi, pinjaman proyek, kredit bergulir, fasilitas modal kerja dan pembiayaan perdagangan.
- Perbankan ritel adalah jenis perbankan yang digunakan oleh masyarakat umum. Konsumen menempatkan uang ke rekening giro (juga dikenal sebagai rekening giro) dan tabungan serta meminjam uang, misalnya melalui hipotek, utang dan kartu kredit

Sumber utama dan umum dari pendapatan bank komersial adalah pendapatan bunga: ***selisih antara bunga yang harus dibayar oleh bank*** (misalnya untuk nasabah yang menempatkan deposito di bank) ***dan bunga yang diterima*** (pinjaman dan kegiatan perkreditan lainnya).

Pinjaman yang disediakan bank-bank komersial untuk perusahaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- **Pinjaman jangka pendek:** pinjaman jangka pendek yang memiliki jangka waktu peminjaman kurang dari setahun. Ini sebagian besar digunakan sebagai modal kerja untuk operasi sehari-hari, misalnya membayar material, mesin, pajak (fasilitas modal kerja), atau untuk menjembatani periode antara pengiriman produk, seperti minyak sawit, dan pembayaran oleh klien (trade finance). Pinjaman jangka pendek biasanya diberikan oleh bank komersial tunggal, yang tidak meminta jaminan substansial dari perusahaan. Ketika perusahaan gagal membayar bunga atau pembayaran, bank dapat mengklaim bagian dari mesin atau inventaris perusahaan.
- **Pinjaman korporasi jangka panjang:** pinjaman jangka panjang yang memiliki jangka waktu peminjaman setidaknya satu tahun, tetapi biasanya tiga sampai sepuluh tahun. Kredit korporasi jangka panjang sangat berguna untuk membiayai rencana ekspansi, yang hanya membawa manfaat setelah jangka waktu yang lama. Hasil dari pinjaman umum perusahaan dapat digunakan untuk kegiatan apapun; tidak terbatas pada proyek tertentu atau segmen usaha tertentu. Pinjaman jangka panjang kepada perusahaan-perusahaan yang lebih besar sering diberikan dalam bentuk pinjaman sindikasi, yaitu beberapa bank dijadikan satu kelompok oleh bank pengatur yang biasanya lebih besar. Pinjaman ini kemudian disebut pinjaman sindikasi.
- **Pembiayaan Proyek:** pembiayaan proyek adalah pinjaman jangka panjang untuk membiayai proyek tertentu. Pinjaman ini hanya dapat digunakan untuk membiayai proyek tertentu: tambang, pipa, pabrik, jalan, dll. Pembiayaan Proyek sering diberikan oleh sindikasi perbankan, seperti kredit korporasi. Tidak seperti kredit korporasi, pembayaran kembali pinjaman pembiayaan proyek tergantung pada pendapatan yang diharapkan akan diperoleh dari proyek, setelah proyek ini berjalan.

Karena bank memiliki resiko lebih tinggi dengan pinjaman pembiayaan proyek ini, mereka dengan hati-hati akan mengevaluasi proyek di depan dan akan memantau pengelolaan proyek secara berkelanjutan. Selain itu, bank akan menuntut tingkat bunga yang lebih tinggi untuk pinjaman pembiayaan proyek. Ini adalah salah satu alasan pembiayaan proyek murni tidak digunakan di sektor kelapa sawit. Oleh karenanya, sampai jumlah tertentu, yang sering digunakan oleh sektor kelapa sawit adalah kredit korporasi umum yang dialokasikan untuk perkebunan tertentu. Jika proyek gagal, perusahaan induk yang berutang masih harus membayar kembali pinjamannya dari hasil perkebunan lain yang dimiliki.

- **Kredit bergulir:** fasilitas kredit bergulir menyediakan perusahaan opsi untuk mengambil pinjaman dari bank (atau lebih sering sindikasi perbankan) ketika memiliki kebutuhan pembiayaan yang mendesak. Sebagai contoh, ini bisa terjadi jika sebuah perusahaan tiba-tiba memiliki kesempatan untuk mengakuisisi perusahaan lain, dan tidak ada waktu yang cukup untuk menerbitkan obligasi atau saham untuk meningkatkan pembiayaan yang dibutuhkan. Sebuah fasilitas kredit bergulir jarang atau tidak pernah digunakan oleh sebagian besar perusahaan, karena pinjaman ini bersifat seperti *back-up* untuk situasi yang mendesak. Ketika digunakan, perusahaan biasanya membayar kembali pinjaman secepat mungkin, misalnya dengan dana dari obligasi baru atau emisi saham.

3.3.2 Investment bank

Investment bank tidak meminjamkan uang secara langsung: mereka adalah perantara dari kelompok yang berbeda dari klien, termasuk perusahaan, pemerintah, individu yang kekayaannya besar dan investor institusi. Klien-klien ini membayar biaya kepada *investment bank* untuk layanan keuangan mereka.

Satu kegiatan penting *investment bank* adalah membantu perusahaan untuk menjual sekuritasnya, seperti saham atau obligasi, kepada investor. *Investment bank* akan menilai perusahaan, menulis prospektus, mempromosikan efek dan “menanggung” (underwriting) efek. *Underwriting* berarti bahwa *investment bank* membeli sekuritas dari perusahaan dengan harga tetap dan pada hari-hari setelah itu, mencoba untuk menjual sekuritas untuk investor institusi dengan harga sedikit lebih tinggi.

Ketika perusahaan menerbitkan saham di bursa untuk pertama kalinya, ini disebut *Initial Public Offering* (IPO). Karena investor belum tahu betul perusahaan yang melakukan IPO ini, dan karena perusahaan terbuka harus jauh lebih transparan dari perusahaan tertutup, prospektus IPO yang ditulis oleh *investment bank* menjadi dokumen yang sangat penting. Investor ingin dapat mempercayai informasi ini; dalam beberapa kasus, mereka menuntut *investment bank* ke pengadilan saat informasi dalam prospektus ditemukan menyesatkan atau tidak lengkap.

Investment bank memperoleh pendapatan dari jasanya sebagai penasihat dalam proses merger dan akuisisi perusahaan, atau untuk individu yang memiliki kekayaan cukup besar dengan memberi saran tentang bagaimana mengelola kekayaan mereka. Sumber utama pendapatan bagi *investment bank* adalah pendapatan untuk jasa keuangan yang dijelaskan di atas. Namun, mereka juga memiliki sumber pendapatan lain, seperti pendapatan bunga dan pendapatan yang diperoleh dari sekuritas.

Dalam sektor kelapa sawit Indonesia, bank asing memainkan peran yang lebih penting dalam bidang *investment banking* daripada di bidang perbankan komersial. Bank di Asia Tenggara - Indonesia dan lainnya dapat memberikan pinjaman kepada perusahaan kelapa sawit dengan cara yang sama seperti bank asing. Bank-bank lokal dan regional juga memiliki departemen *investment banking*, tetapi departemen ini hanya mampu menjual saham dan obligasi kepada investor lokal dan regional. Ketika sebuah perusahaan kelapa sawit bertujuan untuk menjual saham atau obligasinya kepada investor di luar Asia Tenggara, mereka akan selalu menyewa *investment bank* asing (dari Amerika Utara, Eropa Barat atau Jepang).

3.3.3 Bank publik

Bank publik dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain untuk mendapat keuntungan, mereka juga memiliki motif politis. Bank publik sering memiliki klien yang sama dengan *private bank* meskipun bank-bank publik tidak berhubungan dengan individu tapi dengan perusahaan dan pemerintah. Kegiatan mereka termasuk memberikan pinjaman dan kredit serta investasi dalam bentuk modal. Seringkali bank umum bersama-sama dengan bank-bank komersial memberikan pinjaman, mengambil resiko politik dan memberikan persetujuan atas aspek *sustainability* untuk deal-deal proyek tertentu. Tiga jenis utama dari bank publik dapat dibedakan sebagai berikut:

- **Bank Pembangunan Multilateral** bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan, sering kali untuk satu atau lebih daerah yang lebih spesifik. Bank pembangunan multilateral dimiliki bersama oleh beberapa pemerintah nasional. Contoh: Kelompok Bank Dunia (termasuk International Finance Corporation [IFC], yang berurusan dengan perusahaan), Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Investasi Eropa;
- **Bank pembangunan asing** memiliki tujuan yang sama dengan bank-bank pembangunan multilateral, tetapi biasanya dimiliki oleh satu negara (maju) dengan menyediakan dana bagi Negara (berkembang). Contoh: DEG (Jerman), Proparco (Prancis), FMO (Belanda);
- **Bank Pembangunan Nasional** bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan di dalam negari sendiri. Jenis-jenis lembaga keuangan yang sangat penting di negara berkembang lebih besar. Contoh: China Development Bank (China), BNDES (Brazil), Bank Pembangunan Afrika Selatan (Afrika Selatan).

Di masa lalu, bank-bank pembangunan multilateral (terutama IFC) dan bank pembangunan asing seperti DEG dan FMO memainkan peran dalam pembiayaan ekspansi sektor kelapa sawit Indonesia. Hari ini peran mereka tidak lagi sangat signifikan, sebagian karena banyak perusahaan yang terlibat dalam sektor ini cukup besar, mereka memiliki akses yang memadai ke sumber keuangan dan tidak membutuhkan pembiayaan dari bank-bank pembangunan, dan sebagian karena kampanye LSM yang kuat berfokus pada pembiayaan Wilmar oleh IFC pada tahun 2009 mengajarkan IFC dan bank pembangunan lainnya untuk lebih berhati-hati ketika pembiayaan sektor ini.²⁴

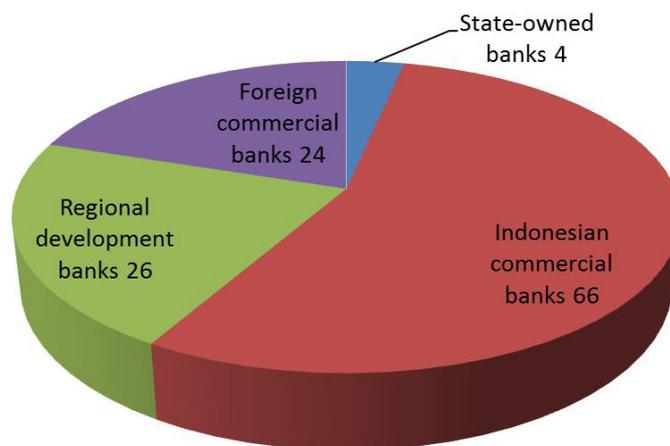
3.4. Bank di Indonesia

3.4.1 Sekilas tentang sektor perbankan Indonesia

Pada Januari 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengidentifikasi 120 bank umum di Indonesia, 34 bank syariah dan 1.636 BPR. Sementara BPR dapat berperan dalam pembiayaan petani, mereka terlalu kecil untuk berperan dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit.

Ke-120 bank komersial tersebut mungkin bisa terlibat dalam pembiayaan perkebunan kelapa sawit. Seperti ditunjukkan, 4 bank BUMN dan 26nya adalah bank pembangunan daerah, yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 66 bank swasta dimiliki oleh orang Indonesia, sementara 24 bank dimiliki oleh bank asing (10 dari mereka yang sepenuhnya dimiliki oleh bank asing, sementara 14 bank joint-venture).²⁵

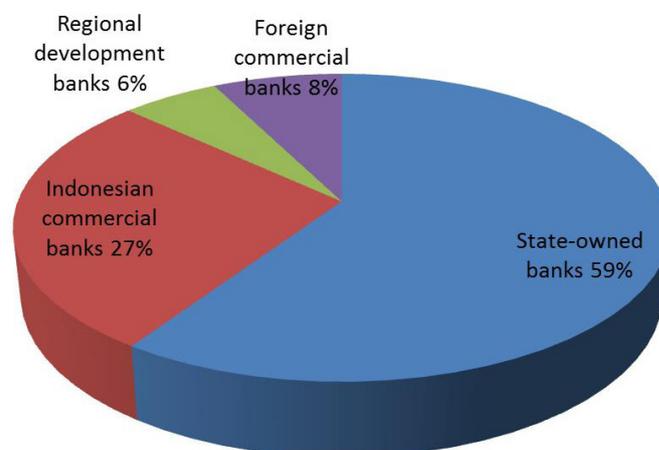
Gambar 12 Bank Komersial di Indonesia per Januari 2014



3.4.2 Bank Indonesia di sektor kelapa sawit

Tidak ada angka khusus yang tersedia atas volume pinjaman pada masing-masing kategori perbankan ke sektor kelapa sawit, tetapi OJK telah menerbitkan angka-angka pinjaman berjalan atas bank pada sektor "Pertanian, Kehutanan dan Perburuan". Pada bulan Januari 2014, 120 bank umum di Indonesia bersama-sama memiliki pinjaman yang nilainya luar biasa besar, dengan nilai total USD 176.796 miliar (15,6 miliar dolar) sektor "Pertanian, Kehutanan dan Perburuan". Seperti ditunjukkan dalam Gambar 13, 4 bank BUMN mencakup 59% dari total, sementara bank-bank komersial di Indonesia mencapai 27% dan bank komersial asing sebesar 8%.

Gambar 13 Pinjaman pertanian dan kehutanan di Indonesia berdasar kategori bank



Sementara Gambar 13 mengacu pada sektor “Pertanian, Kehutanan dan Perburuan”, yang jelas jauh lebih besar dari sektor minyak kelapa sawit, penyaluran kredit oleh beberapa kategori bank bisa menjadi indikasi untuk sektor kelapa sawit. Tapi sebelum kita menyimpulkan bahwa bank-bank BUMN adalah penyandang dana utama dari sektor minyak sawit Indonesia, ada dua hal penting yang perlu dicatat:

- Pinjaman bank mencapai sekitar 26% dari semua investasi di sektor kelapa sawit dalam dekade terakhir, para taipan dan pemegang saham institusional mencapai lebih dari 68%-nya (lihat Tabel 5);
- Gambar 13 hanya mencakup pinjaman oleh bank asing melalui anak perusahaan mereka di Indonesia. Tapi banyak dari perusahaan induk kelompok kelapa sawit yang aktif di Indonesia, terdaftar di bursa saham asing - terutama di Singapura dan Malaysia. Perusahaan-perusahaan ini menarik pinjaman dari bank di Asia Tenggara dan asing lainnya untuk membiayai ekspansi mereka di Indonesia. Ini berarti bahwa bank asing jauh lebih relevan dalam hal ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, lebih dari yang disarankan oleh Gambar 13. Peran bank-bank asing selanjutnya akan dibahas dalam bagian 3.4.3.

Bank-bank Indonesia yang merupakan penyandang dana paling penting pada sektor kelapa sawit antara lain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia.

Berkenaan dengan bank asing, Gambar 13 hanya mencakup pinjaman melalui anak perusahaan mereka di Indonesia. Tapi banyak dari perusahaan induk grup kelapa sawit yang aktif di Indonesia, terdaftar di bursa saham asing - terutama di Singapura dan Malaysia. Perusahaan-perusahaan ini menarik pinjaman dari bank asing Asia Tenggara dan lainnya untuk membiayai ekspansi mereka di Indonesia. Ini berarti bahwa bank asing jauh lebih penting untuk ekspansi plantation kelapa sawit Indonesia dari yang disarankan oleh Gambar 13. Peran bank-bank asing selanjutnya akan dibahas dalam bagian 3.4.3 .

Meskipun nuansanya demikian, bank-bank BUMN dan komersial di Indonesia tetaplah penyandang dana yang signifikan dari sektor minyak sawit Indonesia. Baru-baru ini, Profundo membuat analisis kredit yang diberikan kepada 24 perusahaan kelapa sawit (7 dari Indonesia, 11 dari Malaysia dan 6 dari Singapura) pada periode dari Januari 2008 sampai Desember 2013. Informasi ini diambil dari database keuangan, laporan tahunan dan laporan media. Namun, karena sumber-sumber informasi ini tidak pernah bisa memotret keseluruhan industri, mayoritasnya pada pinjaman sindikasi dan sedikit informasi tentang pinjaman bilateral, kita mesti asumsikan bahwa bank-bank tersebut sebenarnya telah meminjamkan lebih banyak untuk sektor ini, plus banyak bank lain yang juga terlibat dalam pengucuran kreditnya. Tabel 6 dapat memberi gambaran tentang beberapa peran yang dimainkan oleh perbankan dalam pembiayaan sektor kelapa sawit.

Table 6 Kucuran pinjaman perbankan Indonesia untuk 24 perusahaan kelapa sawit, 2008-2013

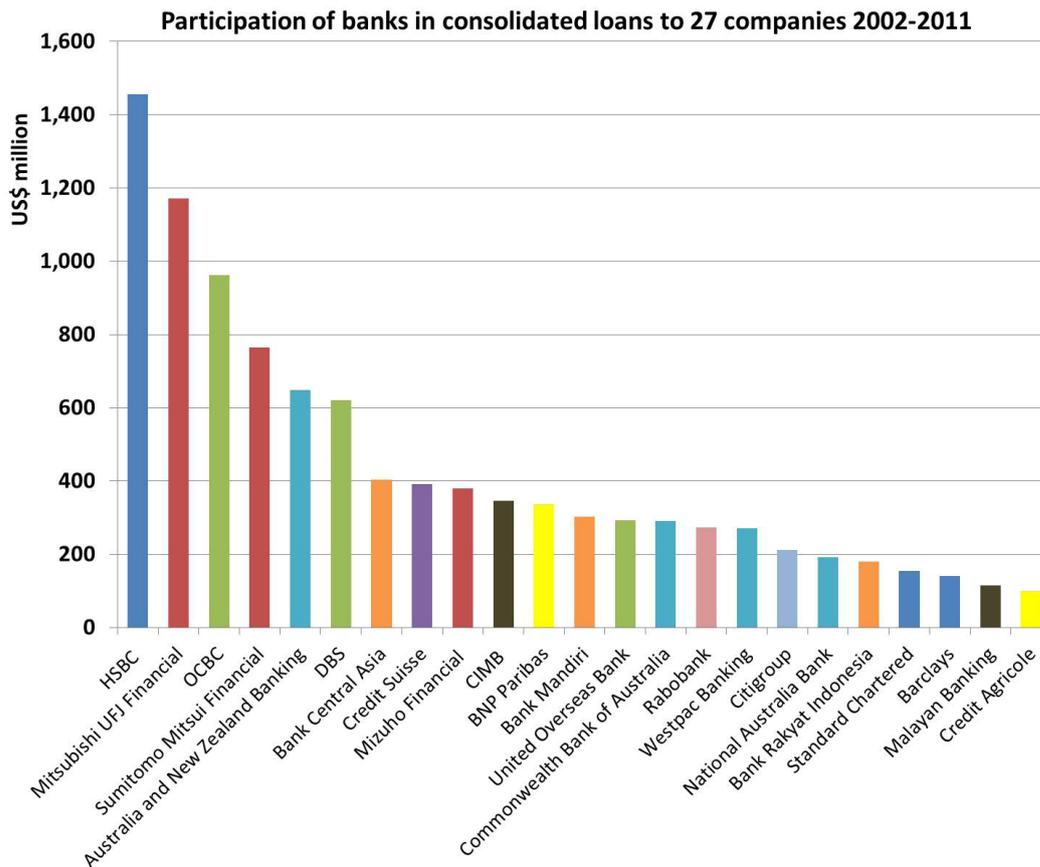
Nama bank	Kategori bank	Pinjaman (US\$ juta, 2008-2013)
Bank Central Asia (BCA)	Swasta	463.91
Bank Mandiri	BUMN	419.15
Bank Negara Indonesia (BNI)	BUMN	306.70
Bank Rakyat Indonesia (BRI)	BUMN	227.93
Bank Pan Indonesia (Panin)	Asing (39% dimiliki oleh ANZ - Australia)	86.19
Bank Permata	Asing (44.5% dimiliki oleh Standard Chartered - Inggris)	77.09
Bank Sumatera Utara (Sumut)	Bank pembangunan daerah	7.01
Bank Danamon	Swasta	7.01
Indonesia Eximbank	BUMN	4.65

3.4.3 Bank asing utama yang aktif di sektor kelapa sawit Indonesia

Gambar 14 memberikan hasil analisis kredit sindikasi yang diberikan kepada 27 kelompok kelapa sawit yang paling penting dan aktif di Indonesia dan Malaysia pada periode 2002-2011. Kredit sindikasi adalah pinjaman jangka panjang yang cukup besar yang diberikan oleh sekelompok bank kepada perusahaan (lihat bagian 3.3.1).

Perbankan Indonesia tidak memainkan peran yang kuat dalam pinjaman sindikasi ini, apalagi bagi perusahaan induk yang terdaftar di luar Indonesia - khususnya di Singapura dan Malaysia.

Gambar 14 Pinjaman kepada 27 perusahaan kelapa sawit Indonesia dan Malaysia 2002-2011



Bank asing dari Malaysia dan Singapura dan dari luar Asia Tenggara, memainkan peran penting dalam perluasan sektor minyak sawit Indonesia, dan telah menginvestasikan US\$ 1,7 miliar antara 2002 dan 2011. Bank-bank asing yang paling penting adalah Jepang (Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, Mizuho), Asia Tenggara (OCBC, DBS, CIMB) dan Eropa (HSBC, Credit Suisse, Rabobank). Bank Australia (ANZ, Commonwealth Bank, Westpac, NAB) juga memainkan peran penting. Citigroup adalah satu-satunya bank Amerika yang memberikan pinjaman cukup signifikan.

3.5. Struktur tata kelola

Struktur tata kelola bank swasta kurang lebih sama dengan perusahaan lain yang terdaftar di bursa saham. Di kebanyakan negara Eropa emiten memiliki struktur pemerintahan tiga-tingkatan, yang terdiri dari:

- Pemegang saham;
- Dewan Pengawas;
- Dewan Direksi.

Di Amerika Serikat dan Inggris, serta di banyak negara Asia, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi terintegrasi. Para anggota Direksi dibagi menjadi direktur eksekutif dan non-eksekutif. Para anggota dewan eksekutif memiliki kurang lebih tugas yang sama seperti direktur dalam sistem Eropa, sedangkan anggota dewan non-eksekutif memiliki kurang lebih tugas yang sama sebagai anggota dewan pengawas dalam sistem Eropa.

Setiap tingkatan memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri. Ini dibahas secara singkat pada bagian berikut.

3.5.1 Pemegang saham

Pemegang saham adalah pemilik bank. Mereka menjadi penanggung jawab utama, yang berarti mereka menanggung resiko terbesar, tetapi juga mendapatkan manfaat terbesar dari kegiatan bank. Dalam banyak kasus, bukan menjadi pekerjaan dari pemegang saham untuk menjalankan bank: mereka mendelegasikan tanggung jawab ini kepada Dewan Pengawas. Khusus terkait emiten di bursa saham, pemegang saham biasanya bertemu hanya sekali setahun ketika Dewan Pengawas dan Direksi melaporkan kegiatan mereka. Pada pertemuan ini, pemegang saham juga dapat memilih anggota baru Dewan Pengawas.

Berbagai jenis bank memiliki berbagai jenis pemegang saham. Bank publik dimiliki oleh pemerintah, yang berarti bahwa keputusan mereka akhirnya didorong oleh pertimbangan politik. Bank yang terdaftar di bursa efek dimiliki oleh banyak investor swasta dan institusional, yang terutama berorientasi pada laba. Bank koperasi adalah bank yang dimiliki oleh anggota mereka, biasanya nasabah bank itu sendiri atau bank lokal lainnya, yang sering bertujuan untuk menjamin kelangsungan jangka panjang keuntungan mereka.

Di Indonesia, beberapa bank komersial juga dimiliki oleh pemerintah. Hal ini tidak membuatnya menjadi bank publik, karena mereka tidak bertujuan untuk memenuhi tujuan kebijakan pemerintah. Namun di sisi lain, kebijakan pemerintah tetap memiliki pengaruh dalam hal di mana bank-bank tersebut menanamkan uang mereka.

3.5.2 Badan Pengawas

Dewan Pengawas bank bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas nama pemegang saham. Dewan Pengawas dibagi menjadi berbagai komite dengan tanggung jawab yang berbeda, seperti Komite Audit, Komite Remunerasi dan Komite Manajemen Resiko. Para anggota Dewan Pengawas bertemu beberapa kali dalam setahun. Mereka tidak bekerja penuh waktu: mereka memiliki pekerjaan selain sebagai Bawas.

3.5.3 Dewan Direksi

Dewan Direksi bertanggung jawab untuk kegiatan operasional sehari-hari dari bank. Mereka memiliki wewenang untuk membuat keputusan atas nama pemegang saham, seperti membeli bisnis baru, mendirikan anak perusahaan di negara-negara baru, mengembangkan produk baru, menyetujui pinjaman besar, dll. Dewan Direksi harus melaporkan keputusan yang mereka ambil secara rutin kepada Dewan Pengawas serta melakukan pelaporan tahunan kepada pemegang saham.

Di Indonesia Dewan Pengawas dan Dewan Direksi terintegrasi. Para anggota Dewan Direksi dibagi menjadi direktur eksekutif dan non-eksekutif. Para anggota dewan eksekutif memiliki kurang lebih tugas yang sama dengan direktur dalam sistem Eropa, sedangkan anggota dewan non-eksekutif memiliki kurang lebih tugas yang sama dengan anggota dewan pengawas dalam sistem Eropa.

Bab 4

Bagaimana bank menilai resiko dan membuat keputusan atas utang

4.1 Resiko terkait pembiayaan perusahaan kelapa sawit

Seperti semua perusahaan, bank memiliki dua tujuan dasar yang sama: keberlangsungan eksistensinya, dan laba. Jika mereka tidak cukup mendapat keuntungan, para pemegang saham perusahaan tidak akan mendapatkan laba yang cukup dan akan mulai mengeluh. Hal ini dapat menciptakan pemberontakan pemegang saham, yang dalam beberapa keadaan dapat menyebabkan bank cepat ‘tercabik-cabik’, dengan potongan-potongan yang berbeda dijual kepada pesaing yang berbeda. Ini adalah apa yang terjadi pada ABN Amro Bank di Belanda pada tahun 2007: bagian Italia dan Amerika Latin dijual ke Banco Santander; bagian internasional untuk Royal Bank of Scotland dan bagian Belanda, Fortis. Salah satu konsekuensi dari pemecahan ini adalah ABN Amro Bank kehilangan perannya sebagai penyandang dana untuk sektor kelapa sawit Indonesia, di mana sebelumnya ia sangat terlibat, yaitu di tahun 1990 dan tahun-tahun pertama abad baru (2000-an).

Gambar 15 Tiga bank yang membeli ABN Amro Bank di tahun 2007



Untuk menghindari skenario tersebut, bank akan mempertimbangkan segala sesuatu yang mengancam kelangsungan hidupnya dan/atau perolehan labanya sebagai resiko yang paling mendasar. Ada beberapa resiko yang relevan dalam hal ini, tapi kita akan berkonsentrasi pada resiko yang memiliki hubungan yang jelas dengan pinjaman untuk sektor kelapa sawit:

- Resiko keuangan perusahaan kelapa sawit tidak mampu membayar kembali pinjaman mereka atau untuk membayar bunga. Ini disebut “resiko gagal bayar/default”;
- Resiko kepatuhan, akan terjadi jika bank, dengan memberikan pinjaman kepada perusahaan kelapa sawit, melanggar undang-undang atau peraturan tertentu

- Resiko reputasi, adalah resiko bank saat publik mengetahui bahwa bank tersebut terkait dengan isu-isu seperti pelanggaran hak asasi manusia, penggundulan hutan atau yang mengancam habitat spesies yang dilindungi. Bagi bank, reputasinya sangat penting untuk menarik pelanggan baru dan menghindari pelanggan yang sudah ada beralih ke bank lain. Dalam kasus ekstrim, seperti ketika pelanggan takut bank mungkin menjadi bangkrut dan tidak mampu membayar utangnya, kerusakan reputasi dapat menyebabkan *bank run*, penarikan besar-besaran dan tiba-tiba oleh nasabah bank. Karena bank hanya memiliki sejumlah kecil dana cadangan yang tersedia, mereka hampir tidak pernah bisa bertahan dalam situasi *bank run*.

Gambar 16 Bank biasanya tidak mampu bertahan menghadapi *bank run*



Bagi LSM dan organisasi masyarakat yang ingin berhadapan dengan bank atas dukungan finansial mereka pada perusahaan-perusahaan kelapa sawit, penting memahami bagaimana bank menghadapi resiko. Untuk dapat mempengaruhi bank, Anda harus memahami alasan mereka dan berbicara dalam bahasa mereka. Hanya dengan mengerangkakan argument Anda tentang isu-isu sosial, lingkungan dan manusia dalam bahasa mereka (atau dalam bahasa “resiko”) bank baru akan dapat memahami Anda.

Oleh karena itu, bab ini akan mengkaji bagaimana bank menghadapi resiko ini secara lebih rinci. Resiko keuangan akan dibahas dalam bagian 4.2, dan bagian 4.3 akan membahas resiko kepatuhan. Bagian 4.4 kemudian akan membahas bagaimana bank mengambil keputusan tentang pemberian kredit atau pinjaman. Resiko reputasi akan dibahas dalam Bab 5, kebijakan resiko keberlanjutan/*sustainability risk*.

4.2 Resiko keuangan atas pinjaman pada perusahaan kelapa sawit

Ketika bank memberikan pinjaman kepada perusahaan kelapa sawit, selalu ada resiko perusahaan tidak dapat membayar hutangnya. Ini disebut “resiko gagal bayar/default”. Sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman yang diminta oleh perusahaan, bank pertama menghitung ukuran resiko ini. Ini disebut kerugian yang diperkirakan. Kerugian yang diperkirakan ini adalah perkalian dari dua unsur: probabilitas gagal bayar dan kerugian saat gagal bayar/default.

$$\text{Perkiraan kerugian} = \text{Probabilitas gagal bayar} \times \text{kerugian saat gagal bayar}$$

Kerugian yang “diharapkan” adalah kerugian diman bank dapat memprediksi besarnya kerugian tersebut dalam jumlah yang wajar secara lebih pasti. Ini adalah derajat kepastian statistik, berdasarkan sejumlah besar pinjaman. Jika diperkirakan kerugian dari pinjaman sebesar US\$ 100 juta untuk perusahaan tertentu adalah US\$ 10 juta, ini tidak berarti bahwa bank mengharapkan bahwa perusahaan tertentu yang dia pinjami hanya akan membayar US\$ 90 juta. Ini berarti bahwa jika bank memberikan sepuluh pinjaman yang sama dengan kerugian yang diperkirakan sama, maka bank akan “berharap” bahwa satu dari sepuluh pinjaman tersebut tidak akan dilunasi.

Dua unsur yang bersama-sama menentukan kerugian yang diperkirakan, probabilitas gagal bayar dan kerugian pada saat gagal bayar, akan dibahas dalam dua bagian berikutnya.

4.2.1 Probabilitas gagal bayar

Probabilitas gagal bayar adalah kemungkinan bahwa perusahaan kelapa sawit tidak akan mampu membayar hutangnya. Hal ini dapat terjadi karena berbagai macam alasan. Perusahaan kelapa sawit akan kehilangan lahan perkebunannya karena konsesinya dicabut. Produksi bisa dihentikan karena kecelakaan, pemogokan atau konflik. Biaya produksi bisa naik atau pemerintah bisa memperkenalkan pajak baru. Pasar bisa hilang karena pembeli beralih ke pemasok lain. Harga CPO bisa turun, nilai tukar bisa drop, dll.

Semua resiko ini bersama-sama memperbesar probabilitas gagal bayar. Untuk menilai resiko ini, bank akan:

- Mempelajari situasi keuangan perusahaan, biaya tenaga kerja, kualitas manajemen, kontrak dengan pembeli, izin konsesinya, strategi, dll. Ini disebut proses *due diligence*. Ketika sebuah perusahaan ingin mendapat pinjaman dari bank, ia harus siap menyediakan banyak informasi (dan kadang-kadang rahasia) dalam proses *due diligence* tersebut;
- Melihat data historis gagal bayar pada perusahaan sejenis, misalnya semua perusahaan di Indonesia yang pernah diberi pinjaman oleh bank di masa lalu, atau semua perusahaan di sektor perkebunan kelapa sawit - dalam dan di luar Indonesia - yang telah diberikan pinjaman oleh bank. Informasi atas seberapa sering perusahaan sejenis gagal di masa lalu memberikan kepada bank beberapa indikasi dari resiko yang dihadapinya ketika memberikan pinjaman baru.

Berdasarkan dua set informasi tersebut, bank dapat membuat perkiraan probabilitas gagal bayar dari pinjaman baru untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tentu saja hal ini akan selalu menjadi perkiraan; hanya waktu yang akan menentukan apakah perusahaan perkebunan itu benar-benar akan membayar kembali pinjamannya atau tidak.

4.2.2 Kerugian saat gagal bayar

Kerugian saat gagal bayar ditentukan pertama-tama oleh jumlah pinjamannya: semakin besar pinjaman, semakin banyak bank akan kehilangan uangnya jika perusahaan tidak membayar kembali pinjamannya. Tapi ada bentuk mitigasi resiko yang mungkin untuk mengurangi kerugian saat gagal bayar:

- Jaminan yang ditawarkan oleh klien: klien dapat menawarkan aset lainnya (misalnya tanaman, mesin) yang dapat disita oleh bank jika klien tidak mampu membayar kembali pinjaman tersebut;
- Mengasuransikan resiko: bank dapat menjamin resiko dengan membeli *credit default swap* dan asuransi kredit dari perusahaan asuransi. Mereka juga bisa mengandalkan jaminan kredit ekspor dari lembaga kredit ekspor atau 'perlindungan' politik dari bank pembangunan.

Kerugian saat gagal karena itu dihitung berdasarkan kombinasi dari faktor-faktor: ukuran pinjaman, jaminan dan pilihan asuransi resiko. Bersama dengan probabilitas gagal bayar, kerugian saat gagal bayar menentukan kerugian yang diperkirakan dari pinjaman.

Bagaimana bank kemudian berurusan dengan informasi ini diatur sampai batas tertentu dengan langkah-langkah kebijakan dalam bidang manajemen resiko bank. Langkah-langkah kebijakan ini cukup umum dan diadopsi oleh setiap negara di dunia. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam bagian 4.2.3.

4.2.3 Peraturan terkait manajemen resiko

Peraturan pemerintah mengenai bagaimana bank harus mengelola resiko keuangan pinjaman cukup mirip di mana-mana di dunia, karena mereka didasarkan pada rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS). Pengawas perbankan dari banyak negara industri dan sejumlah pasar negara berkembang diwakili di komite ini, yang memiliki kantor di Basel (Swiss). Semua negara yang diwakili dalam BCBS biasanya mengadopsi rekomendasi dari komite ini dalam undang-undang sektor keuangan mereka. Tekanan dari G - 20, OECD, IMF dan lain-lain memastikan bahwa negara-negara lain mengadopsi rekomendasi ini juga.

Rekomendasi yang paling penting dari BCBS dapat ditemukan di *Capital Accords Basel I* (1988), II (2004) dan III (2010). Perjanjian ini berhubungan dengan bagaimana bank harus mengelola resiko dan menyiapkan seberapa besar "buffer" atau cadangan keuangan yang mesti ada. Cadangan ini diperlukan untuk mengurangi resiko runtuhnya bank, yang bila resikonya besar dan sistemik bisa menimbulkan konsekuensi negatif yang cukup berat bagi seluruh perekonomian dunia. Kita semua telah melihat konsekuensi ini selama krisis keuangan yang dimulai pada tahun 2008.

Adalah menarik bagi bank (dan pemegang saham) untuk membiayai pinjaman dan investasi lain menggunakan sesedikit mungkin modal sendiri dan sebanyak mungkin utang (yang bunganya murah). Tapi kecenderungan ini meningkatkan resiko bagi kelangsungan hidup bank. Jika hanya beberapa persen dari investasi bank dibiayai oleh modal sendiri, bank akan segera kehabisan modal dan akan kolaps jika ada beberapa persen dari klien tidak bisa lagi membayar kembali pinjaman mereka. Untuk mencegah supaya bank tidak terlalu mudah kolaps, terutama saat ekonomi mengalami penurunan, pada tahun 1998 *Basel Capital Accord I* menetapkan persyaratan modal minimum untuk investasi sebesar 8%, artinya, untuk setiap €100 yang diinvestasikan, total €8 perlu dibiayai oleh modal bank sendiri.

Basel Capital Accord II memperkenalkan penyempurnaan dari aturan ini, karena persyaratan modal minimum sebesar 8% sekarang dikalikan dengan faktor resikonya. Faktor resiko berkisar dari 0% untuk investasi "bebas resiko", seperti obligasi pemerintah, dan 150% untuk investasi beresiko. Untuk obligasi pemerintah, bank tidak memiliki cadangan modal sama sekali (yang terbukti kesalahan besar selama krisis zona euro yang sedang berlangsung). Untuk investasi beresiko, bank menghadapi persyaratan modal minimum sebesar 12% (8 x 150%). Sebagai hasil dari sistem ini, bank-bank yang menjalankan resiko lebih besar, kebutuhan modalnya akan meningkat, dan sebaliknya.

Kemudian, bank-bank kecil dan bank-bank besar diperlakukan berbeda dengan *Basel Capital Accord II*. Bank kecil harus menetapkan bobot resiko yang dihadapinya sesuai dengan peringkat resiko yang berlaku saat itu, yang ditentukan oleh lembaga pemeringkat kredit untuk nasabah korporasi dan lembaga kredit ekspor untuk klien pemerintah. Ini disebut Pendekatan Standarisasi. Bank besar dapat menggunakan apa yang disebut Pemeringkatan Internal (*Internal Rating Based/IRB*), dimana bank itu sendiri dapat menentukan faktor resiko masing-masing kliennya. Hal ini menarik bagi bank, karena menjaga faktor resiko serendah mungkin akan mengurangi jumlah modal yang harus mereka sisihkan dan meningkatkan keuntungan (jangka pendek) mereka.

Supervisor atau pengawas bertanggung jawab mengendalikan berfungsinya sistem IRB, tapi hal ini terbukti sulit dalam prakteknya (karena, misalnya, keterbatasan waktu dan kurangnya pengetahuan dan informasi khusus). IRB mencakup kewajiban atas pelaporan, tetapi penilaian resiko masing-masing klien tidak perlu dipublikasikan. Krisis keuangan telah menunjukkan bahwa sistem IRB telah gagal: bank memiliki kecenderungan kuat menetapkan terlalu rendah faktor resiko atas investasi mereka sendiri.

Faktor resiko untuk pinjaman dapat bervariasi antara 0% dan 150%, kebanyakan bank-bank besar menilai faktor resiko rata-rata dari total portofolio investasi mereka di sekitar angka 50%. Ini berarti bahwa secara rata-rata, mereka tidak membiayai 8% dari pinjaman mereka dengan uang pemegang saham, tetapi hanya 4% atau bahkan kurang. Kecilnya estimasi resiko yang mereka tetapkan menyebabkan bank mengalami masalah ketika ternyata resiko yang sesungguhnya lebih tinggi dari yang diperkirakan.

Basel Capital Accord III belum bisa memecahkan masalah ini sama sekali. Perjanjian ini sangat mirip dengan *Basel Capital Accord II*; persyaratan modal minimum dinaikkan menjadi 9% tetapi kesepakatan baru tersebut tidak terlalu menghalangi kebebasan bank-bank besar untuk menilai resiko mereka sendiri.

4.3. Berhadapan dengan resiko kepatuhan

Ketika memberikan pinjaman kepada perusahaan kelapa sawit, bank juga harus memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak melanggar peraturan apapun, karena ini bisa mendatangkan denda dan kerusakan reputasi bagi bank. Hal ini disebut sebagai resiko kepatuhan. Jenis resiko yang dapat terjadi ketika bank melanggar peraturan Bank Indonesia (Bagian 4.3.1) atau ketika mereka melanggar aturan anti pencucian uang (bagian 4.3.2).

4.3.1 Peraturan perbankan Indonesia

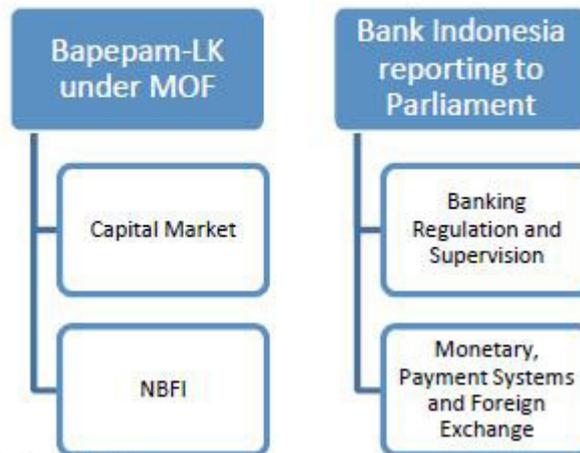
Seperti dibahas di atas, perbedaan dalam peraturan perbankan antara satu negara dengan yang lain sebenarnya tidaklah besar: prinsip-prinsip dan pedoman seperti *Basel Capital* telah menciptakan keseragaman yang cukup signifikan di seluruh dunia dalam hal ini. Peraturan perbankan di Indonesia oleh karenanya juga mencerminkan pedoman dari *Base Capital Accords Basel*.

Namun demikian, mungkin ada perbedaan dalam rincian peraturan tersebut. Saat mengatasi krisis keuangan, beberapa negara telah mengeluarkan peraturan nasional baru yang melampaui apa yang disepakati dalam *Basel Capital Accords* atau standar internasional lainnya.

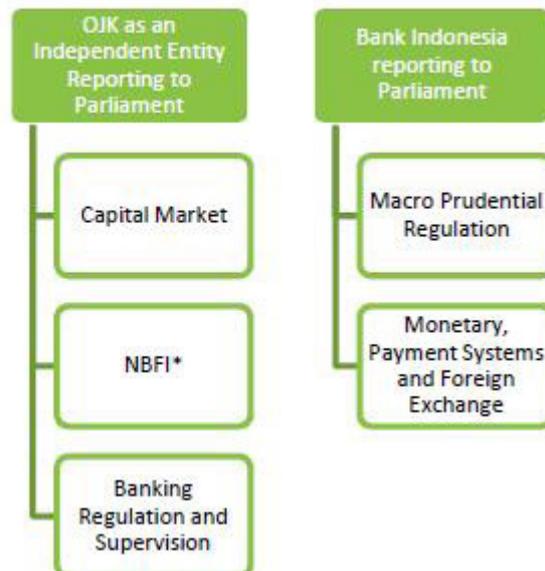
Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Badan ini didirikan pada tahun 2011 dan pada tahun 2013 menggantikan Bapepam - LK sebagai pengawas pasar modal (bursa efek, saham dan penerbitan obligasi), dana pensiun serta sektor asuransi. Sejak awal 2014, OJK juga telah mengambil alih tugas-tugas Bank Indonesia dalam mengawasi sektor perbankan. Semua pengawasan keuangan kini di tangan OJK (lihat Gambar 17).

Gambar 17 Restrukturisasi terbaru atas pengawasan keuangan di Indonesia

BEFORE



AFTER



Pada bulan Januari 2005, ketika pengawasan perbankan masih berada di bawah tanggung jawab Bank Indonesia, peraturan yang luar biasa dilahirkan: Peraturan Nomor 7/2/PBI/2005, yang mewajibkan bank untuk memeriksa, sebelum memberikan kredit kepada perusahaan, apakah perusahaan telah memiliki sistem manajemen lingkungan. Bank-bank harus memeriksa, antara lain:

- Apakah perusahaan telah melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Menurut UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan No. 32/2009, AMDAL merupakan prasyarat penting bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan Izin Perkebunan (IUP). Tetapi karena korupsi dan alasan lain, tidak semua perusahaan perkebunan telah melakukan AMDAL yang tepat. Oleh karena itu, bank wajib untuk memeriksa dengan seksama prasyarat ini.
- Apakah perusahaan dinilai memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang baik sesuai dengan penilaian oleh Program Penilaian Peringkat Kinerja atas Pengelolaan Lingkungan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sejumlah kecil perusahaan kelapa sawit berpartisipasi dalam program ini.

Regulasi perbankan ini sangat luar biasa, karena persyaratan tersebut tidak ditemukan dalam peraturan perbankan negara lain manapun di dunia dan merupakan salah satu langkah maju untuk mendorong bank-bank mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan perusahaan yang mereka biayai. Pada Oktober 2012, peraturan ini digantikan oleh Peraturan Nomor 14/15/PBI/2012, yang kurang spesifik tapi masih mewajibkan bank untuk menilai “upaya yang dilakukan oleh debitur dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup” sebelum memberikan kredit.

4.3.2 Aturan tentang anti pencucian uang

Aturan tentang anti pencucian uang (AML) tidak hanya relevan untuk sektor keuangan, tapi juga untuk semua jenis perusahaan. Standar internasional dalam hal langkah-langkah anti pencucian uang diatur oleh *Financial Action Task Force* (FATF). 36 anggota FATF didominasi oleh negara-negara OECD dari belahan Barat, berdampingan dengan beberapa Negara Asia. FATF telah mengembangkan seperangkat Rekomendasi FATF yang berisi pedoman dan alat bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan kejahatan keuangan di semua lini.

Rekomendasi tersebut meliputi banyak elemen. Yang paling penting adalah pedoman ‘kenali pelanggan Anda’ atau *Know Your Customer* (KYC), yang berhubungan dengan penerimaan pelanggan dan identifikasi mereka. Jika pelanggan datang ke bank dan ingin menyetor uang, bank harus memeriksa apakah uang tersebut legal dan tidak berasal dari kegiatan pencucian uang. Pedoman KYC juga penting untuk manajemen resiko, karena pedoman ini menetapkan prosedur untuk mencegah bank terlibat dalam operasi pencucian uang, dan terkena resiko kepatuhan dan reputasi.

Salah satu rekomendasi FATF berkaitan dengan *Politically Exposed Person* (PEP), yaitu orang yang tengah menjabat atau pernah menjabat sebagai: kepala negara, kepala pemerintahan, politisi senior, pejabat senior pemerintah, pejabat pengadilan atau militer, eksekutif senior dari perusahaan-perusahaan milik negara dan pejabat tinggi partai politik. PEP dipandang dapat menyebabkan peringkat resiko bank menjadi lebih tinggi karena bank menjadi berpotensi terlibat dalam pencucian uang. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus meneliti sumber kekayaan PEP yang menjadi klien mereka.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, bank asing dan bank-bank Indonesia sering tidak tahu bahwa perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia yang menjadi klien mereka dimiliki oleh PEP. Sebuah laporan resmi terkait langkah-langkah anti pencucian uang di Indonesia yang dirilis tahun 2008 menyimpulkan: “*Lembaga keuangan tidak memiliki mekanisme yang cukup dalam pengendalian resiko internalnya untuk bisa mengidentifikasi PEP, dan praktek pengendalian resiko internal itu sendiri masih sangat lemah secara keseluruhan.*”

Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memberlakukan Rekomendasi FATF di Indonesia adalah pengawas keuangan OJK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK).

4.4. Pengambilan keputusan atas permohonan pinjaman

4.4.1 Due diligence/uji tuntas

Ketika sebuah perusahaan kelapa sawit mengajukan permohonan kredit di bank, mereka akan melakukan kontak langsung dengan satu atau lebih *account manager*. *Account manager* ini melakukan “*due diligence*” pada *buku* (laporan keuangan) dan rencana klien dengan meneliti informasi publik yang tersedia serta informasi pribadi yang disediakan oleh perusahaan.

Kerugian yang diperkirakan dihitung berdasarkan probabilitas gagal bayar dan kerugian saat gagal bayar. Langkah-langkah mitigasi atas resiko yang mungkin timbul dari pinjaman ini juga akan dievaluasi.

Berdasarkan *Basel Capital Accord*, perhitungan ini didasarkan atas modal yang harus dicadangkan oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan semua faktor ini harga dari pinjaman, atau suku bunga, dihitung.

Jika setelah evaluasi *account manager*-nya yakin bahwa perusahaan ini layak diberi pinjaman, ia akan mengirimkan proposal kepada manajer unit usaha, yang bertanggung jawab untuk divisi khusus perusahaan. *Account manager* akan tetap bertanggung jawab untuk meninjau pinjaman tersebut dengan kliennya, setiap tahun.

Manajemen resiko merupakan proses yang berkesinambungan: bank terus-menerus memonitor perubahan pada faktor-faktor resiko yang terkait dengan kredit yang disalurkan (seperti fluktuasi mata uang, iklim ekonomi, dll). Jika ada perubahan, bank akan menghitung ulang kerugian yang diharapkan, yang dapat mengakibatkan perubahan keuntungan atau kerugian bank tersebut di atas kertas, dan perubahan jumlah cadangan uang yang harus ada di bank, dan cadangan ini harus dipisahkan dari pinjaman.

4.4.2 Persetujuan oleh Komite Kredit

Manajer unit usaha bisa menyetujui kredit dengan batas tertentu. Jika kredit melebihi batas ini, resiko bagi bank lebih tinggi dan proposal perlu lulus di tingkat Direksi Komite Kredit, yang terdiri dari sejumlah manajer unit bisnis dan direktur. Komite Kredit dapat menyetujui kredit besar, dan baik Komite Kredit atau manajer unit bisnis juga dapat meminta perjanjian (klausula) dalam perjanjian kredit, untuk mendapat jaminan tambahan.

Setelah proposal kredit disetujui oleh Komite Kredit, Departemen *Sustainability Risks* biasanya harus memberikan sarannya, yang bersifat tidak mengikat. Saran ini akan didasarkan pada penelitian lebih lanjut oleh departemen *sustainability risks* yang fokus pada apakah perusahaan memenuhi kebijakan *sustainability risks* dari bank yang bersangkutan. Ini dibahas lebih lanjut dalam Bab 5.

Bab 5

Kebijakan pengelolaan *sustainability risks*

5.1. Pengantar

Jika LSM dan pemangku kepentingan lainnya ingin menggunakan pengaruh bank dan lembaga keuangan lainnya sebagai pendongkrak perubahan perilaku perusahaan, penting untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan *sustainability risks* mereka. Kebijakan *sustainability risks* berkaitan dengan bagaimana bank mengelola permasalahan yang terkait dengan lingkungan, sosial dan HAM. Dengan kebijakan *sustainability risks* yang baik, bank akan cenderung menghindari investasi yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat setempat. Dan jika mereka masih melakukan investasi tersebut, LSM dapat menekan lembaga-lembaga keuangan untuk berpegang teguh pada kebijakan mereka sendiri, karena dengan melanggar kebijakan ini dapat menimbulkan resiko reputasi yang tinggi bagi lembaga keuangannya.

Bab ini memberikan gambaran atas berbagai jenis kebijakan penanganan resiko-resiko keberlanjutan. Bagian 5.2 menganalisis mengapa bank mengadopsi kebijakan *sustainability risks*. Bagian 5.3 membahas standard kolektif *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kebijakan *sustainability risks*. Bagian 5.4 membahas kebijakan *sustainability risks* yang dikembangkan oleh lembaga keuangan secara individual. Akhirnya, bagian 5.5 menyajikan bahasan tentang efektivitas berbagai jenis kebijakan *sustainability risks* yang ada saat ini.

5.2. Mengapa bank mengadopsi kebijakan *sustainability risks*

Kebijakan *sustainability risks* dari sebuah lembaga keuangan harus memberi panduan bagi karyawan, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya, tentang sektor dan kegiatan yang tidak bisa didukung oleh mereka, karena hal tersebut menciptakan masalah sosial dan lingkungan. Di antara investor institusional (misalnya manajer aset atau dana pensiun), kebijakan *sustainability risks* lebih dikenal dengan kebijakan SRI (*Socially Responsible Investment*).

Ada empat alasan utama mengapa lembaga keuangan mengadopsi kebijakan *sustainability risks*:

- Beberapa orang yang bekerja dalam lembaga keuangan mungkin memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan;
- Meningkatnya kritik dari LSM dan pemangku kepentingan lainnya telah terbukti meningkatkan resiko reputasi mereka. Lembaga keuangan bertujuan untuk mengurangi resiko ini, karena hal tersebut bisa merugikan;
- Menangani *sustainability risks* dengan serius dapat meningkatkan kapasitas para penyandang dana dalam menanggulangi resiko-resiko yang akan dihadapi. Resiko yang berkelanjutan sangat mungkin menciptakan probabilitas yang lebih tinggi gagal bayar pada investasi tertentu. Sistem akunting yang memperhitungkan *sustainability risks* akan menyempurnakan prosedur manajemen resiko dari lembaga keuangan yang bersangkutan, hal ini menarik terutama bagi bank yang menggunakan pendekatan IRB (lihat bagian 4.2.3);
- Melakukan kinerja yang baik pada isu-isu sosial dan lingkungan dapat menghasilkan keuntungan finansial yang lebih tinggi. Telah terbukti bahwa perusahaan yang berkinerja baik pada isu-isu keberlanjutan benar-benar mendatangkan keuntungan yang lebih tinggi kepada investor.

Sementara bank-bank yang mengadopsi kebijakan *sustainability risks* akan selalu menekankan bahwa mereka berperilaku dalam cara yang sangat etis dengan standar moral yang tinggi, sebagian besar alasan mereka untuk mengadopsi kebijakan tersebut berasal dari kepentingan pribadi: menghindari dan mengurangi resiko dan juga meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, tentu saja ini akan mereka lakukan! Bank adalah perusahaan yang normal, bukan badan amal atau penyelenggara jasa pelayanan publik. Kekhawatiran utama mereka adalah menjaga kelangsungan hidup dan meningkatkan keuntungan mereka.

Jadi sebenarnya tidak ada alasan naif di balik fakta bahwa bank mau mengadopsi kebijakan *sustainability risks*. Tapi di sisi lain, tidak ada alasan untuk menilai “basa-basi” bank pada prinsip-prinsip etika dan standar tersebut sebagai hiasan belaka, karena sebenarnya ada orang yang bekerja di sektor keuangan yang benar-benar mencoba untuk mempromosikan standar moral yang tinggi! Ketika mencoba untuk membuat bank menjadi sekutu Anda (lihat Bab 6), strategi yang baik oleh karenanya adalah dengan menemukan orang di bank tersebut yang termotivasi secara etis dan kemudian mengubahnya menjadi pendukung Anda.

Sekarang kita tahu mengapa bank mengadopsi kebijakan *sustainability risks*. Kemudian muncul pertanyaan, kebijakan dan standar mana yang mereka adopsi? Perbedaan yang cukup besar dapat dicermati dari standar CSR kolektif yang dikembangkan oleh sekelompok lembaga keuangan dan kebijakan *sustainability risks* yang dikembangkan oleh suatu lembaga keuangan secara individual:

- Standar kolektif yang dikembangkan oleh sekelompok lembaga keuangan sering digabungkan atau diberlakukan juga pada lembaga keuangan yang lain. Beberapa standar kolektif fokus pada satu isu tertentu, sementara yang lain mencakup topik yang sangat luas.
- Kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga keuangan secara individual sering mencakup sektor tertentu atau isu-isu keberlanjutan dan umumnya lebih rinci dari standar kolektif. Seringkali, bank mulai dengan memberlakukan standar kolektif dan kemudian secara bertahap mengembangkan kebijakannya sendiri yang lebih rinci pada sektor dan topik yang berbeda.

Bagian 5.3 membahas standar CSR kolektif secara lebih rinci dan bagian 5.4 membahas kebijakan *sustainability risks* yang dikembangkan oleh lembaga keuangan secara individual.

5.3. Standar kolektif CSR

Dalam dekade terakhir, sejumlah standard kolektif *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah dikembangkan di sektor keuangan. Ketika lembaga keuangan mengikuti standar kolektif, mereka berkomitmen untuk menerapkan kriteria tertentu dari aspek *sustainability* yang tercantum dalam standard kolektif tersebut. Rincian tentang bagaimana lembaga keuangan yang mengikuti standard kolektif ini menerapkan kriteria-kriteria tersebut di lembaganya memerlukan mereka untuk masing-masing menuangkannya dalam kebijakan mereka sendiri.

Muatan dan ruang lingkup dari standar kolektif sangat berbeda. Muatan tersebut dapat meliputi panduan rinci tentang isu-isu spesifik, tetapi biasanya lebih sering mengambil pendekatan yang lebih umum. Ruang lingkup kebijakan juga bervariasi: kebijakan yang berlaku untuk semua layanan keuangan atau hanya untuk bentuk-bentuk khusus keuangan.

Bagian berikut memberikan beberapa contoh dari standar kolektif yang relevan untuk lembaga keuangan.

5.3.1 Inisiatif Finansial UNEP

Dipimpin oleh *United Nations Environmental Programme*, *UNEP Finance Initiative* (UNEP FI) didirikan pada tahun 1992. Saat ini, lebih dari 200 bank, perusahaan asuransi dan lembaga keuangan lainnya dari seluruh dunia telah menandatangani salah satu dari dua deklarasi *UNEP Finance Initiative*. Harus dipahami bahwa inisiatif dan komitmen adakalanya bersifat sangat luas dan karenanya agak ‘kabur’, namun demikian, intinya adalah bahwa para penandatangan berkomitmen untuk mengintegrasikan kriteria sosial dan lingkungan ke dalam semua kegiatan bisnis mereka. Secara geografis, 44% dari penandatangan berasal dari Eropa dan 28% berasal dari kawasan Asia - Pasifik. Ada dua penandatangan dari Indonesia: Bank BNI dan Bank Jawa Barat (BJB).

Kekuatan utama dari *UNEP Finance Initiative* adalah agenda penelitian mereka, menyatukan seluruh penandatangan untuk “memahami dampak lingkungan dan sosial terhadap kinerja keuangan”.

5.3.2 Prinsip-prinsip Investasi yang bertanggung jawab - *Principles for Responsible Investment (PRI)*

Pada bulan April 2006 sebuah kelompok internasional perusahaan manajemen aset, dana investasi dan dana pensiun meluncurkan Prinsip Investasi yang Bertanggung Jawab (PRI). PRI kini telah ditandatangani oleh 1.056 investor institusi (dana pensiun, perusahaan asuransi dan manajer aset), serta 190 ‘layanan mitra profesional’ (konsultan dan LSM). Secara total, investor yang tergabung dalam PRI mengelola modal investasi lebih dari US\$ 34,000 miliar.²⁶

Hanya satu lembaga keuangan Indonesia yang telah menandatangani PRI, manajer aset kecil: Oso Investment Management. Juga, di antara mitra layanan profesional adalah dua organisasi Indonesia: Indonesia WISE dan Kehati – Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia.

Para penandatangan berkomitmen untuk enam prinsip, yang dapat diringkas sebagai komitmen untuk “mengintegrasikan isu-isu lingkungan, sosial dan tata kelola dalam keputusan investasi mereka”. PRI menyiapkan berbagai saran kepada anggotanya untuk membuat komitmen yang masih luas ini menjadi lebih praktis, seperti analisis keberlanjutan atas pembelian/pengadaan barang, mengembangkan tradisi musyawarah dan membudayakan partisipasi/keterlibatan dalam pengembangan kebijakan secara aktif. Selain itu, penandatangan PRI sekarang harus melaporkan kemajuan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip PRI per tahun.

Salah satu keuntungan utama dari PRI untuk penandatangannya adalah bahwa ia membentuk jaringan internasional, di mana lembaga keuangan dapat saling berbagi praktek-praktek terbaik dan berkolaborasi dengan investor lainnya. Sejumlah penandatangan PRI telah membentuk Kelompok Kerja Investor Kelapa Sawit/*Palm Oil Investor Working Group (IWG)*. Kelompok ini mendukung pengembangan industri minyak sawit berkelanjutan melalui RSPO, dan telah terlibat dengan pembeli besar minyak kelapa sawit untuk mengumpulkan informasi tentang komitmen pembelian mereka. Saat ini, dana pensiun dan manajer aset berikut adalah anggota dari IWG:²⁷

- | | |
|---|----------------|
| • APG Asset Management | Belanda |
| • Arisaig Partners | Singapura |
| • Aviva Investors | Inggris |
| • CDC Group | Inggris |
| • Colonial First State Global Asset Management | Australia |
| • Ecofi Investissements | Prancis |
| • Generation Investment Management | Prancis |
| • Government Employees Pension Fund of South Africa | Afrika Selatan |

• Hermes Fund Managers	Inggris
• Local Authority Pension Fund Forum	Inggris
• Local Government Superannuation Scheme	Inggris
• NEI Investments	Kanada
• Nelson Capital Management	Amerika
• New Zealand Superannuation Fund	Selandia Baru
• Nordea	Swedia
• PGGM Investments	Belanda
• Robeco	Belanda
• Universities Superannuation Scheme	Inggris

5.3.3 Prinsip Equator/*Equator Principles*

Pada bulan Juni 2003, sekelompok bank yang aktif dalam pembiayaan-proyeksi meluncurkan Prinsip Equator, yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan oleh *International Finance Corporation* (IFC), anak perusahaan Bank Dunia. Prinsip-prinsip ini berhubungan dengan pembiayaan proyek dan pembiayaan yang ditujukan untuk proyek besar dan kompleks dari korporasi besar (lihat bagian 3.3.1). Ini merupakan salah satu bentuk mekanisme pembiayaan infrastruktur untuk tambang, pabrik minyak dan gas, pabrik-pabrik kimia, jalan, kereta api, dan bendungan. Prinsip-prinsip Equator kini telah ditandatangani oleh 79 lembaga keuangan. Secara bersama-sama, lembaga-lembaga keuangan ini adalah bagian utama dari pasar pembiayaan proyek global. Namun, pembiayaan proyek seperti itu pangsa pasarnya kecil dibandingkan dengan proporsi pembiayaan korporasi secara umum.

Prinsip-prinsip Equator dimaksudkan untuk mengenali, menilai dan mengendalikan resiko sosial dan lingkungan dari pembiayaan proyek. Untuk tujuan tersebut, prosedur penilaian resiko dan Standar Kinerja IFC akan diterapkan. Ini berarti bahwa setiap permintaan pembiayaan untuk proyek dengan nilai US\$ 10 juta atau lebih dikelompokkan dalam salah satu dari tiga kategori resiko (A, B, atau C) berdasarkan potensi dampak lingkungan dan sosial proyek. Berdasarkan kategorinya, penilaian dampak lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan harus disiapkan dengan sesuai. Demikian juga, kondisi sosial dan lingkungan dapat dimasukkan sebagai salah satu klausul dalam kontrak pembiayaan dan juga kewajiban pelaporan rutin dari klien tentang topik-topik yang dipersyaratkan tadi.²⁸

Prinsip Equator baru-baru ini telah diperbarui untuk yang ketiga kalinya, dengan versi ketiga (EPIII) diterbitkan pada Juni 2013. Perubahan yang paling penting adalah:

- Ruang lingkup lebih luas, dengan memasukkan pinjaman sementara serta kredit korporasi umum yang dialokasikan untuk proyek-proyek tertentu;
- Lebih transparan atas penilaian yang dilakukan, karena meningkatnya persyaratan pelaporannya; dan
- Bank diharapkan untuk lebih memperhatikan hak asasi manusia dan perubahan iklim sebagai bagian dari *due diligence* (meskipun persyaratan perubahan iklimnya tetap sangat lemah).

Meskipun telah dilakukan banyak perbaikan, Prinsip-prinsip Equator masih kekurangan mekanisme akuntabilitas yang baik yang akan memungkinkan masyarakat yang terkena dampak atau LSM untuk mengajukan keberatan atas bagaimana bank menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara nyata dalam pelaksanaan proyek di lapangan.

Untuk sektor kelapa sawit, Prinsip-prinsip Equator sebagian besar tidak relevan, hingga perkembangan yang terbaru, karena pembiayaan proyek tidak pernah diterapkan dalam sektor ini. Namun, dengan perkembangan terakhir dari ruang lingkup prinsip yang menyertakan kredit korporasi umum untuk proyek-proyek tertentu, Prinsip-prinsip tersebut menjadi lebih relevan, karena jenis pembiayaan yang

seperti inilah yang digunakan di sektor kelapa sawit. (Untuk memahami perbedaan antara kedua bentuk pembiayaan, lihat bagian 3.3.1).

Meskipun tidak ada bank di Indonesia yang telah menandatangani Prinsip Equator ini, banyak dari bank-bank internasional yang memainkan peran penting dalam sektor kelapa sawit (lihat Gambar 14) adalah penandatanganan Prinsip-prinsip Equator. LSM karena itu bisa mengharapkan bank-bank tersebut untuk mengevaluasi proyek-proyek perkebunan kelapa sawit terhadap Standar Kinerja IFC sebelum membuat keputusan investasi.

5.3.4 Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional

Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional adalah rekomendasi beberapa pemerintah bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Karena revisi terbaru dari Pedoman OECD, pedoman menjadi berlaku juga untuk lembaga keuangan. Pedoman ini bersifat sukarela, dan mengatur perilaku perusahaan yang bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian internasional tentang isu-isu hak-hak pekerja, lingkungan dan korupsi. Perusahaan tidak bisa menjadi penandatanganan pedoman ini, karena mereka hanya dapat didukung oleh pemerintah negara-negara OECD. Pemerintah-pemerintah yang tergabung dalam OECD berharap perusahaan multinasional mengikuti prinsip-prinsip dan standar yang dijelaskan dalam Pedoman OECD tersebut.

Sebagian besar pemerintah OECD telah menunjuk *National Contact Point* (NCP) sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas. LSM dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengirimkan keluhan tentang perusahaan multinasional kepada NCP, yang akan menyelidiki dan memutuskan apakah Pedoman telah dilanggar. Berdasar update terakhir pada tahun 2011, rekomendasi telah sepenuhnya selaras dengan *Guiding Principles* PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (lihat bagian 5.3.5).

Meskipun Indonesia bukan anggota OECD, LSM dan organisasi masyarakat masih dapat menyampaikan keluhannya kepada NCP dari negara lain dengan bersandar pada penyandang dana internasional dari perusahaan yang bermasalah tersebut. Secara historis, setidaknya satu keluhan OECD telah diajukan terhadap perusahaan di sektor minyak kelapa sawit, meskipun tidak di Indonesia: kasus ini diajukan terhadap perusahaan kelapa sawit di Kamerun melalui perusahaan-perusahaan yang berkedudukan di negara-negara OECD. Kasus ini juga telah diajukan kepada bank-bank yang berbasis di negara-negara OECD untuk mendapat dukungan mereka bagi proyek-proyek di luar OECD.

5.3.5 Guiding Principles PBB atas Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Sebagai Wakil Khusus PBB, seorang profesor Amerika, John Ruggie bekerja antara tahun 2008 dan 2011 untuk mengembangkan kerangka kerja untuk mengatasi dampak bisnis pada hak asasi manusia. Kerangka yang disajikan terdiri atas tiga pilar:

- Kewajiban negara untuk melindungi (atau mencegah) terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk oleh kalangan bisnis;
- Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia; dan
- Hak korban pelanggaran hak asasi manusia terhadap akses pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non - yudisial.

Guiding Principles atas Bisnis dan Hak Asasi Manusia telah disetujui oleh Dewan HAM PBB pada Juni 2011 dan sekarang dianggap sebagai standar global yang dapat digunakan untuk mencegah dan mengatasi resiko dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang terkait dengan kegiatan usaha. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk semua negara dan semua perusahaan bisnis, terlepas dari ukuran mereka, sektornya, lokasinya, maupun kepemilikan dan strukturnya. Oleh karena itu, Prinsip ini juga berlaku untuk lembaga keuangan.

Namun demikian tidak ada mekanisme akuntabilitas independen untuk *Guiding Principles* yang dapat digunakan oleh LSM dan organisasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atas ketidakpatuhan perusahaan. Sebaliknya, Pedoman dalam *Guiding Principle* tersebut mensyaratkan bahwa perusahaan harus menyusun sendiri mekanisme pengaduan terkait dengan operasi perusahaan.

5.3.6 Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah lembaga multi-stakeholder yang dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan untuk mempromosikan produksi dan penggunaan produk minyak sawit berkelanjutan, melalui standar global yang kredibel dan keterlibatan pemangku kepentingan. Anggota RSPO antara lain perusahaan perkebunan kelapa sawit, pedagang, produsen barang konsumen, pengecer, LSM, bank dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut nama bank dan investor institusi yang menjadi anggota RSPO:

• ANZ Banking Group	Australia
• BNP Paribas	Prancis
• Citi	Amerika
• Credit Suisse	Swiss
• Generation Investment Management	Inggris
• HSBC	Inggris
• International Finance Corporation	Amerika
• Oversea-Chinese Banking Corporation	Singapura
• Rabobank	Belanda
• Standard Chartered Bank	Amerika
• UBS	Swiss

Kita mengharapkan bank-bank ini akan benar-benar berkomitmen untuk mewujudkan Prinsip dan Kriteria RSPO serta skema sertifikasinya, juga saat membiayai perusahaan yang belum menjadi anggota RSPO. RSPO memiliki mekanisme pengaduan yang disebut dengan *Dispute Settlement Facility*, di mana keluhan dapat diajukan terhadap perusahaan kelapa sawit yang melanggar Prinsip & Kriteria RSPO. Tidak banyak pengalaman yang telah diperoleh dengan menuntut bank-bank yang menjadi anggota RSPO terhadap pembiayaannya pada perusahaan kelapa sawit yang melanggar Prinsip & Kriteria RSPO; tanpa memandang apakah perusahaan kelapa sawitnya anggota RSPO atau tidak.

5.3.7 Standar CSR kolektif yang lain

Ada berbagai inisiatif lainnya dalam sektor keuangan untuk mengumpulkan data, mendorong perubahan kebijakan, menyiapkan pedoman dan bertukar pengalaman untuk mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon:

- Asset Owners Disclosure Project (AODP);
- Carbon Disclosure Project (CDP);
- Carbon Principles;
- Climate Principles;
- Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC);
- Investor Network on Climate Risk (INCR);
- UNEP FI's Climate Change Working Group Iklim Kerja (CCWG).

Karena ada hubungan yang jelas antara ekspansi sektor kelapa sawit di Indonesia dan deforestasi serta perusakan lahan gambut, LSM mungkin dapat menggunakan banyak inisiatif dan standar ini agar lembaga keuangan pembiayaan perusahaan kelapa sawit benar-benar mewujudkan komitmen mereka.

Beberapa standar CSR kolektif dan inisiatif lain yang mungkin relevan saat melihat bank dan investor institusi menanamkan investasi di sektor kelapa sawit adalah:

- *The Global Reporting Initiative*, yang menetapkan standar umum bagi perusahaan yang melaporkan isu-isu keberlanjutan, dan telah mengembangkan pedoman khusus untuk sektor keuangan (lihat bagian 6.3.1);
- *Natural Capital Declaration*, diperkenalkan oleh UNEP FI di Rio + 20 Earth Summit pada bulan Juni 2012. Penandatanganan dari inisiatif ini menunjukkan komitmen mereka untuk mengintegrasikan modal alamiah (sumber daya alam dan jasa ekosistem bumi yang dihasilkan) dan kriteria dalam produk finansial mereka. Deklarasi ini ditandatangani oleh 43 lembaga keuangan, meskipun sayangnya tidak ada yang dari Indonesia.
- *The UN Global Compact*, sebuah kompilasi atas 10 prinsip-prinsip bisnis yang bertanggung jawab, yang mencakup hak asasi manusia, hak-hak buruh, perlindungan lingkungan, dan anti – korupsi. Peserta meliputi banyak lembaga keuangan, meskipun tidak ada yang berbasis di Indonesia.
- *The Wolfsberg Group*, sebuah kelompok dari 11 lembaga keuangan internasional yang bekerja pada sektor *private banking* (layana perbankan untuk klien swasta yang kaya), telah mengembangkan Prinsip Anti - Money Laundering Wolfsberg untuk *Private Banking* dan Pedoman Anti – Korupsi Wolfsberg.
- Sebuah konsorsium dari 13 bank investasi internasional meluncurkan Prinsip Obligasi Hijau pada Januari 2014. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman sukarela untuk pengembangan dan penerbitan Obligasi Hijau, jenis obligasi yang khusus dialokasikan untuk membiayai investasi hijau atau investasi berkelanjutan.

5.3.8 Keterbatasan dan kekurangan standard-standar kolektif

Semua standar kolektif dan kebijakan yang disebutkan dalam bagian sebelumnya bersifat sukarela. Inisiatif-inisiatif tersebut memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk memaksa anggotanya menerapkan standard tersebut. Dalam banyak kasus, anggota inisiatif dapat menjadi ‘penumpang gelap’ karena syarat keanggotaannya mudah dan mekanisme pemantauannya sangat lemah. Hanya dengan menyatakan bahwa mereka merupakan anggota inisiatif tertentu, mereka bisa mendapat nama baik; sedangkan praktek mereka di lapangan masih tetap sama dan sangat sedikit upaya dilakukan untuk menerapkan standard dan kebijakan kolektif tersebut di dalam kegiatan operasional mereka.

Salah satu langkah yang telah diambil untuk membangun mekanisme akuntabilitas adalah terciptanya *National Contact Point*, yang didirikan oleh negara-negara OECD untuk mendukung penerapan Pedoman OECD (lihat bagian 5.3.4).

Pada beberapa standar kolektif, saat anggotanya tidak menyampaikan laporan tentang bagaimana mereka menerapkan standard tersebut di dalam operasi bisnisnya, maka keanggotaannya dapat dihentikan. Hal ini terjadi dengan *UNEP Finance Initiative* serta *UN Global Compact*, yang merupakan kebijakan resmi yang diadopsi dari Asosiasi Prinsip Equator juga. Inisiatif PRI dari PB juga telah membuat pelaporan wajib atas kemajuan penerapan prinsip-prinsip itu.

Kebanyakan standar kolektif kurang memiliki kriteria yang terdefiniskan dengan baik, Prinsip Equator menjadi salah satu dari sedikit pengecualian. Sekarang setelah ruang lingkupnya dikembangkan dan mencakup pembiayaan proyek keuangan korporasi umum yang dialokasikan untuk proyek-proyek tertentu, Prinsip-prinsip Equator menjadi lebih relevan untuk sektor kelapa sawit. Namun, mereka belum memiliki mekanisme akuntabilitas yang akan memungkinkan LSM dan pemangku kepentingan lainnya

menyampaikan keluhan atas pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut secara langsung ke bank atau ke Asosiasi *Equator Principles*-nya.

Di luar kelemahan-kelemahan tadi, inisiatif kolektif telah dapat memenuhi beberapa tujuan. Lembaga keuangan berkomitmen agar standar tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai komitmen mereka; mereka menciptakan resiko reputasi mereka sendiri jika mereka tidak beraktifitas sesuai dengan standar yang telah mereka tandatangani. Selain itu, standar CSR kolektif dapat berfungsi sebagai jaringan penting, membawa lembaga keuangan bersama-sama saling belajar dan mengambil tindakan kolektif pada sektor-sektor atau isu-isu tertentu, daripada mengambil langkah-langkah itu sendirian dan dengan pertaruhan kehilangan bisnis dari pesaingnya yang lain.

5.4. Kebijakan pengelolaan *sustainability risks* pada bank

5.4.1 Gambaran umum

Selama dekade terakhir, semakin banyak bank dan lembaga keuangan lainnya yang telah mengembangkan kebijakan pengelolaan *sustainability risks* mereka sendiri. Bank Dunia dan bank-bank multilateral publik yang lain, sudah mulai merumuskan kebijakan sosial dan lingkungan pada 1980-an dan 1990-an, dan telah memimpin pengembangan kebijakan tersebut. Standar Kinerja IFC, misalnya, cukup terkenal dengan menetapkan pedoman terperinci dan standar tentang berbagai isu-isu lingkungan dan sosial.

Lembaga keuangan swasta mulai mengikutinya sejak tahun 2000-an dengan mengembangkan kebijakan pada sektor-sektor tertentu (misalnya kehutanan, persenjataan, pertambangan) dan isu-isu keberlanjutan (misalnya perubahan iklim, keanekaragaman hayati, hak asasi manusia). Kebijakan-kebijakan tersebut dilengkapi dengan daftar kriteria yang harus dipenuhi oleh investasi agar permohonan pembiayaan atas investasi tersebut bisa disetujui. Kriteria kadang-kadang dirumuskan dengan kata-kata yang kurang jelas (misalnya “kita hanya akan membiayai perusahaan terkemuka dengan *track record* manajemen yang bertanggung jawab dari isu-isu lingkungan dan sosial”), tetapi kebijakan yang lebih kuat akan menyangkut referensi ke standar internasional tertentu atau konvensi (seperti Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, prinsip-prinsip dan kriteria FSC atau pedoman dari Komisi Dunia untuk Bendungan, konvensi ILO tentang isu-isu perburuhan atau konvensi PBB tentang limbah beracun atau perubahan iklim).

Seringkali, kebijakan *sustainability risks* dari suatu lembaga keuangan didasarkan pada standar yang diterima secara internasional, dan meskipun ada variasinya, beberapa cukup rinci dengan kriteria yang terukur. LSM dapat menggunakan kebijakan ini untuk meminta kesungguhan lembaga-lembaga keuangan memenuhi komitmen mereka. Namun, kebijakan tersebut umumnya tidak memiliki mekanisme akuntabilitas yang independen, yang memberikan mekanisme bagi LSM dan *stakeholder* lainnya untuk mengajukan keluhan jika bank tidak menerapkan kebijakannya dengan konsisten dalam praktek.

Dalam hal grup perbankan, ruang lingkup kebijakan individu sering terbatas pada perbankan komersial (pinjaman dan kredit, lihat bagian 3.3.1). Dalam kasus lain, kegiatan *investment banking* (underwriting) juga ikut disertakan (lihat bagian 3.3.2). Tetapi saat banyak grup perbankan juga terlibat dalam kegiatan pengelolaan aset, kebijakan mereka umumnya tidak berlaku untuk investasi dalam saham dan obligasi yang mereka kelola atas nama klien.

Kualitas kebijakan pengelolaan *sustainability risks* yang diadopsi oleh bank-bank yang berbeda cukup bervariasi, bahkan beberapa bank tidak menerapkan kebijakan itu sama sekali. BankTrack telah melakukan beberapa upaya untuk mengevaluasi dan menyusun peringkat kebijakan pengelolaan *sustainability risks* bank-bank internasional yang paling ternama, yang paling baru adalah laporan *Close the Gap*.

Sebagai tindak lanjut dari proyek ini, sebuah koalisi LSM Belanda mengembangkan *Fair Bank Guide*, yang memantau dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan *sustainability risks* dari bank-bank utama

Belanda selama lima tahun terakhir terakhir. *The Fair Bank Guide* mencoba mendorong nasabah bank individu untuk terlibat dalam mendorong bank-bank memperbaiki kebijakan mereka. Mengikuti pendekatan dan metodologi yang sama, Bankwisers saat ini sedang disiapkan di enam negara lainnya, termasuk Indonesia. Bankwiser Indonesia ini sedang dikembangkan oleh Perkumpulan Prakarsa, dalam pengembangannya Perkumpulan Prakarsa melibatkan beberapa LSM termasuk TuK INDONESIA dan Walhi. Jaringan Bankwisers Internasional akan diluncurkan pada akhir 2014.

5.4.2 Kebijakan kelapa sawit pada bank

Pada tahun 2001, empat bank Belanda mengadopsi kebijakan pengelolaan *sustainability risks* terkait dengan investasi mereka di sektor kelapa sawit. Ini merupakan hasil dari kampanye publik oleh *Milieudefensie* (*Friends of the Earth* Belanda) dan Greenpeace Belanda, di mana mereka meminta nasabah bank untuk mengirim kartu pos (lihat Gambar 18) ke bank mereka dengan permintaan sederhana untuk tidak membiayai perusahaan yang tidak memenuhi empat kriteria dasar:

- Tidak melakukan deforestasi;
- Tidak menggunakan api untuk membuka lahan;
- Mematuhi aturan hukum;
- Menghormati hak-hak dan kepentingan masyarakat lokal.

Gambar 18 Kartu pos tentang pembiayaan kelapa sawit yang dikirim ke Bank-bank Belanda di tahun 2000



Kampanye ini mendapat perhatian media-massa, yang membuat bank-bank jadi gugup, tapi masih butuh lebih dari satu tahun sebelum bank-bank berkomitmen untuk memenuhi empat kriteria tersebut. Kampanye itu sukses, bukan hanya karena berhasil membuat empat bank tersebut berkomitmen memenuhi kriteria-kriteria dasar tadi, tapi juga dalam arti yang lebih luas: ini adalah contoh pertama dari kebijakan *sustainability risks* yang diadopsi oleh bank-bank komersial pada seluruh tema, di seluruh penjuru dunia!

Sejak itu, banyak bank lain di seluruh dunia mengembangkan dan mengadopsi kebijakan *sustainability risks* pada semua jenis sektor dan topik. Jumlah bank yang telah mengadopsi kebijakan *sustainability risks* pada sektor kelapa sawit juga meningkat tapi tidak sefenomenal yang diharapkan setelah langkah pertama yang diambil oleh empat bank Belanda pada tahun 2001 tersebut. Tidak lebih dari sepuluh bank

di negara-negara lain telah mengadopsi kebijakan untuk sektor kelapa sawit, dan beberapa di antaranya bukan penyandang dana penting dari sektor ini. ***Sampai saat ini, tidak ada satu pun bank di Indonesia yang memiliki kebijakan tentang sektor kelapa sawit!***

Pada Tabel 6 kita menganalisis kebijakan kelapa sawit dari enam bank yang merupakan penanam modal penting dari sektor kelapa sawit (lihat Gambar 14). Tabel tersebut menunjukkan bahwa semua kebijakan dari keenam bank tersebut mencakup deforestasi, kebakaran hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati, dan semua juga meliputi dampak perubahan iklim (hanya satu yang tidak). Lahan gambut hanya dimasukkan oleh setengah dari kebijakan-kebijakan tersebut. Isu-isu sosial yang berkaitan dengan kelapa sawit (misalnya sengketa atas kepemilikan lahan dan penggunaan lahan, perlakuan buruk dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dan kondisi kerja yang buruk, hak-hak pekerja) telah tercakup dalam sebagian besar kebijakan, meskipun tidak selalu tinggi standarnya.

Tabel 6 Kebijakan kelapa sawit pada beberapa bank swasta

Bank	Deforestasi	Kebakaran hutan	Peatland	Dampak pd iklim	Keanekaragaman Hayati	Hak atas tanah dan isu sosial lain
BNP Paribas	X	x	x	x	x	x
Credit Suisse	X	x	x	x	x	
HSBC	X	x		x	x	x
Rabobank	x	x	x	x	x	x
Standard Chartered	x	x		x	x	x
UBS	x	x			x	

Perbedaan dari kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya pada topik yang dibahas; beberapa kebijakannya juga lebih jelas dinyatakan dibandingkan dengan yang lain. Beberapa kebijakan menggunakan kata/istilah yang tidak cukup kuat, seperti “mendorong” (misalnya “bank mendorong perusahaan untuk mematuhi skema sertifikasi berkelanjutan internasional yang tepat”) atau “mengharapkan” (misalnya “bank mengharapkan perusahaan kelapa sawit hulu tidak menggunakan tenaga kerja anak atau kerja paksa”). Istilah-istilah tersebut tidak mengandung komitmen yang kuat, tidak dimaksudkan untuk mengungguli standar yang mestinya bisa dicapai, dan bukanlah dasar yang cukup untuk suatu keputusan investasi.

Berkenaan dengan deforestasi, Credit Suisse, HSBC, Rabobank dan Standard Chartered mengacu secara khusus pada Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF). Semua kecuali Bank UBS menyatakan bahwa mereka akan menghindari pembangunan perkebunan di atas lahan (sebelumnya hutan) yang baru saja digunduli, dan menyebutkan jangka waktu yang jelas untuk prasyarat ini. Tapi dalam kebijakan milik Standard Chartered dan BNP Paribas, periode waktu yang digunakan adalah “rolling/berputar”; tidak *fix*, (misal: tidak ada deforestasi dalam lima tahun terakhir, dan sepuluh tahun terakhir, secara berurutan). Kedua pernyataan tersebut kurang ketat dibandingkan dengan pernyataan Rabobank, Credit Suisse dan HSBC, yang di dalam kebijakannya menyebutkan batas waktu dalam tanggal dan dengan demikian membuatnya lebih absolut. Rabobank memiliki tanggal yang paling awal: 7 Oktober 2001, dan dengan cara penyebutan yang sangat jelas seperti ini membuat kebijakan mereka dirasa paling ketat, tapi kata-kata dalam kebijakannya malah gagal untuk secara eksplisit melarang perkebunan kelapa sawit berada pada lahan hasil penggundulan hutan. Sebuah fitur yang kuat dari kebijakan BNP Paribas dan Standard Chartered adalah bahwa mereka secara eksplisit menyatakan tidak akan menerima klien dengan kaitan deforestasi asli.

Berkenaan dengan hak atas tanah dan hak-hak masyarakat, Rabobank, BNP Paribas dan HSBC cukup kuat meliputi isu-isu yang paling relevan. Ketiga bank menyebutkan hak-hak masyarakat, tapi sementara Rabobank dan BNP Paribas hanya menggunakan istilah umum “masyarakat setempat”, HSBC secara eksplisit meminta ‘dukungan yang dapat dibuktikan’ atau ‘*demonstrable support*’ dari seluruh pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak operasi proyek (seperti: masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan pekerja). Di sisi lain, BNP Paribas adalah satu-satunya bank yang menyebutkan pengaturan kompensasi atau mekanisme pengaduan. Rabobank adalah satu-satunya bank yang merujuk langsung pada prinsip *Free, Prior dan Informed Consent* (FPIC), meskipun UBS mengklaim menghormati hak masyarakat adat sesuai dengan Standar Kinerja 7 dari IFC, yang juga mencakup prinsip FPIC ini.

Sebagai kesimpulan, seluruh kebijakan bank yang berbeda-beda tersebut masih tidak sekomprensif dan sejelas tolok ukur yang ditetapkan oleh Wilmar International melalui kebijakan pembelian mereka – *Tidak ada Deforestasi, Tidak (di) lahan Gambut, Tidak ada Eksploitasi* – yang diumumkan pada Desember 2013. Karena itu ada ruang untuk mendorong bank-bank supaya mereka mau memperbaiki kebijakan mereka. Dan pasti ada ruang untuk mendorong bank-bank lain yang terlibat dalam sektor kelapa sawit untuk juga mengadopsi kebijakan kelapa sawit yang lebih baik.

5.5. Bagaimana kebijakan *sustainability risks* diterapkan

5.5.1 Instrumen investasi yang bertanggung jawab

Kebijakan *sustainability risks* memberi pedoman kepada lembaga keuangan pada bagaimana dan di mana mereka bisa menerapkan instrumen investasi yang bertanggung jawab. Investor institusional, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan manajer aset, terutama berinvestasi pada saham dan obligasi perusahaan. Berdasarkan jenis investasinya, instrumen investasi bertanggung jawab yang mereka terapkan adalah:

- Seleksi positif: investasi terutama di perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara berkelanjutan. Hal ini bisa memberi keuntungan finansial yang lebih tinggi dan menurunkan resiko reputasi;
- Seleksi negatif: mengeluarkan perusahaan yang melanggar kriteria etis atau kriteria keberlanjutan dari pilihan investasi. Banyak lembaga keuangan tidak akan mempertimbangkan investasi pada perusahaan yang memproduksi persenjataan atau terlibat dalam pelanggaran HAM berat;
- Voting pada pertemuan tahunan pemegang saham: ini hanya relevan di mana investor institusionalnya memiliki saham di perusahaan, karena pemegang obligasi tidak memiliki hak suara. Pemegang saham dapat memilih proposal yang berkaitan dengan pengenalan kebijakan iklim oleh perusahaan yang mereka investasikan;
- *Engagement*/pelibatan: pemegang saham bisa terlibat dalam dialog dengan manajemen perusahaan dan kemudian mencoba mempengaruhi keputusan tertentu, terutama di mana mereka memiliki kepemilikan saham yang lebih besar;

Bank-bank komersial dan *investmen bank* dapat menggunakan instrumen investasi yang bertanggung jawab seperti yang dirangkum di atas (meskipun voting hanya mungkin jika bank adalah pemegang sahamnya). Tapi bank juga dapat menggunakan dua instrumen penting lain, yaitu:

- Ketika sebuah perusahaan ingin memperoleh pinjaman atau menerbitkan saham baru atau obligasi, mereka akan melakukan pertemuan dengan bank untuk membahas rencana investasinya. Dalam diskusi ini, bank dapat menyetujui sebuah rencana aksi dengan perusahaan untuk meningkatkan atau memodifikasi praktik mereka. Hal ini kemudian bisa dijadikan sebagai prasyarat pemberian pinjaman atau penyediaan jasa keuangan lainnya.

- Bank juga dapat menandatangani kontrak pinjaman yang mencakup persyaratan khusus: dicantumkannya klausul yang akan menyebabkan perusahaan dinyatakan gagal bayar ketika klausul tersebut dilanggar. Bank kemudian dapat serta merta menuntut pembayaran atas hutang perusahaan itu. Sementara persyaratan yang bersifat finansial sudah cukup umum terjadi dalam praktek, perjanjian yang mencakup persyaratan sosial dan lingkungan belum banyak diterapkan.

5.5.2 Peran departemen *sustainability risks*

Selama dekade terakhir, banyak bank telah membentuk departemen *sustainability risks*. Departemen pengelolaan *sustainability risks* memiliki tugas utama menyiapkan kebijakan *sustainability risks* bank ybs, dan biasanya mengawasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Terkait hal ini, departemen pengelolaan *sustainability risks* juga akan melatih manajer *account* untuk mengintegrasikan kebijakan *sustainability risks* itu dalam proses *due diligence* keuangan mereka, dan mengelola hubungan dengan LSM.

Berkenaan dengan proposal kredit besar yang ditangani oleh Komite Kredit, departemen *sustainability risks* sering memiliki peran sebagai penasihat (tetapi biasanya tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan). Untuk menyiapkan sarannya, departemen Resiko akan melakukan *screening* keberlanjutan perusahaan dan melihat apakah mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam kebijakan pengelolaan *sustainability risk* dari bank. *Screening* atas praktek keberlanjutan dari perusahaan yang mengajukan kredit ini merupakan proses yang terpisah dari *due diligence* keuangan dilakukan oleh manajer *account* (lihat bagian 4.4.1). Untuk melakukan *screening* ini, departemen *sustainability risks* akan meminta informasi dari perusahaan dan akan mencari laporan media dan laporan LSM di internet.

Departemen *sustainability risks* juga akan sering menggunakan apa yang disebut Lembaga Pemeringkat Etika, seperti EIRIS, Sustainalytics, MSCI, Inrate dan lain-lain sebagai sumber informasi mereka. Badan-badan pemeringkat etika ini menghasilkan laporan berkala (sekali atau dua kali per tahun) pada sejumlah besar perusahaan terbuka, mengevaluasi kinerja mereka pada berbagai macam topik keberlanjutan. Laporan-laporan ini disimpan dalam sebuah database online yang dapat diakses oleh pelanggan mereka (bank dan investor institusional) dari seluruh dunia.

Dalam *screening* ini, departemen resiko biasanya akan melihat tiga elemen:

- Apakah perusahaan membuat **komitmen** untuk beroperasi secara berkelanjutan, misalnya dengan menjadi anggota RSPO atau menandatangani standar kolektif lainnya?
- Apakah perusahaan memiliki **kebijakan** untuk bisa memenuhi komitmen mereka atas aspek keberlanjutan dalam praktek operasional mereka?
- Bagaimana **track record** perusahaan dalam hal *sustainability* mereka, sebagaimana terungkap dalam informasi dari perusahaan itu sendiri, lembaga pemeringkat etika, media, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya? Ketika *track record* yang dilaporkan tidak jelas dan/atau bertentangan, departemen resiko bisa menyewa konsultan untuk melakukan kunjungan lapangan dan menilai kinerja perusahaan yang sesungguhnya.

Berdasarkan pemeriksaan ini, departemen *sustainability risks* kemudian akan memberikan pendapat mereka kepada Komite Kredit. Pendapat tersebut dapat menyarankan pengajuan kreditnya untuk ditolak, atau dapat menyarankan bahwa rencana aksi yang disepakati dengan perusahaan dimasukkan sebagai prasyarat untuk kredit. Mereka juga dapat menyarankan agar prasyarat ini diperkuat dengan memasukkannya sebagai klausul dalam perjanjian pinjaman.

Apakah Komite Kredit mengikuti saran dari departemen resiko atau tidak, akan bergantung pada seberapa ketat mereka ingin mengikuti kebijakan *sustainability risks* mereka sendiri, dan betapa pentingnya klien tersebut bagi bank. Ada berbagai alasan keuangan dan strategis yang akan membuat Komite Kredit berpikir lembaga keuangan tetap memberikan kredit meskipun perusahaan tidak memenuhi semua kriteria dalam kebijakan resiko berkelanjutan. Dalam skenario terbaik, Komite Kredit dapat setidaknya memilih untuk mengembangkan rencana aksi dengan perusahaan.

Umumnya, orang yang bekerja di departemen *sustainability risks* ingin melihat bank mereka mengambil pertimbangan sosial dan lingkungan yang lebih serius. Di sisi lain mereka digaji untuk “*menjaga pihak LSM agar tenang*” dan menghindari kerusakan reputasi bagi bank. LSM bisa mencoba untuk mengeksploitasi tujuan ganda mereka itu dengan terlebih dahulu mendekati anggota departemen *sustainability risks* dan menawarkan mereka kesempatan untuk memecahkan masalah tanpa menimbulkan kerusakan reputasi bank (misalnya, dengan menghentikan investasi atau menggunakan pengaruh internal mereka untuk mendorong manajemen perusahaan mau datang ke meja perundingan dengan LSM). Hanya ketika departemen *sustainability risks* gagal mendapatkan dukungan yang cukup dari internal bank untuk mengambil langkah-langkah tersebut, LSM mesti mempublikasikan kasus ini dengan dampak resiko reputasi bagi bank tersebut.

Saran lain sebagai strategi LSM tersebut akan dibahas dalam Bab 6.

Bab 6

Menggunakan bank untuk mempengaruhi perusahaan kelapa sawit

6.1. Pengantar

Bank dan investor lain memberi perusahaan kelapa sawit banyak modal yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha mereka, yang membuat mereka menjadi mitra penting bagi perusahaan. Dengan demikian, mereka dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan-perusahaan ini: dengan memberi tekanan pada perusahaan, mengatur syarat untuk dukungan keuangan mereka, atau menolak untuk membiayai kegiatan tertentu.

Gambar 19 Deforestasi untuk membangun kebun kelapa sawit



Dari perspektif manajemen resiko, bank memiliki kepentingan yang kuat untuk memastikan bahwa dampak sosial dan lingkungan yang berhubungan dengan proyek-proyek yang mereka dukung telah diidentifikasi dan dikelola dengan baik.

Oleh karenanya, bank bisa menjadi “sekutu” yang menarik dan berpengaruh bagi LSM yang hendak memecahkan masalah lingkungan dan sosial yang terkait dengan perusahaan kelapa sawit. Tapi bank-bank biasanya harus diyakinkan untuk menggunakan pengaruh mereka, dan itu bukanlah tugas yang mudah. Seringkali beberapa kampanye yang rumit diperlukan untuk meyakinkan bank bahwa adalah benar-benar kepentingan mereka untuk memecahkan masalah daripada membiarkannya bertahan dan menyebabkan mereka sakit kepala terus menerus.

Selain itu, tentu saja ada juga situasi ketika kepentingan bank di satu sisi, dan kepentingan LSM serta masyarakat pada sisi yang lain; tidak selaras, atau bahkan bertentangan; contohnya, saat peluang bisnis yang menguntungkan - menurut kaca mata bank hanya memiliki resiko yang kecil/ yang bisa dikelola masih tetap bisa terancam 'diserang' oleh para aktivis yang tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat atau lingkungan. Dalam situasi seperti ini, tantangan utama para aktivis adalah untuk menyentuh analisis biaya-manfaat yang dibuat oleh bank, dengan menambahkan resiko reputasi sebagai biaya dalam persamaan itu.

Dalam bab ini kita fokus membahas langkah-langkah LSM dan masyarakat yang dapat diambil saat meyakinkan bank untuk menggunakan pengaruh mereka dalam proses penyelesaian konflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit:

1. Identifikasi bank dan penyandang dana lain yang terlibat;
2. Analisis atas kebijakan dan peraturan yang relevan untuk kasus;
3. Tulis ringkasan yang jelas dari kasus ini;
4. Lakukan pendekatan terhadap orang yang tepat dalam lembaga keuangan;
5. Kirimkan ringkasan kasus Anda ke analis;
6. Ciptakan tekanan publik terhadap penyandang dana;
7. Kirim keluhan kepada lembaga yang memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang tersedia;
8. Coba dialog dengan penyandang dana perusahaan dalam upaya resolusi konflik

Langkah-langkah ini akan dibahas dalam bagian berikut.

6.2. Identifikasi bank dan penyandang dana yang terlibat

Ketika sebuah LSM berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, menganalisis bagaimana perusahaan dibiayai dapat membantu mengidentifikasi pilihan-pilihan untuk mempengaruhi perusahaan, karena penyandang dana dari perusahaan tersebut memiliki pengaruh padanya. Pembiayaan perusahaan bisa berasal dari pemegang saham (misalnya dana pensiun), pemegang obligasi (misalnya perusahaan asuransi) dan bank (yang memberikan pinjaman). Bersama-sama, kita sebut mereka sebagai penyandang dana yang terlibat dalam perusahaan.

Untuk mengidentifikasi penyandang dana perusahaan perkebunan, sejumlah langkah yang dapat dilakukan adalah:

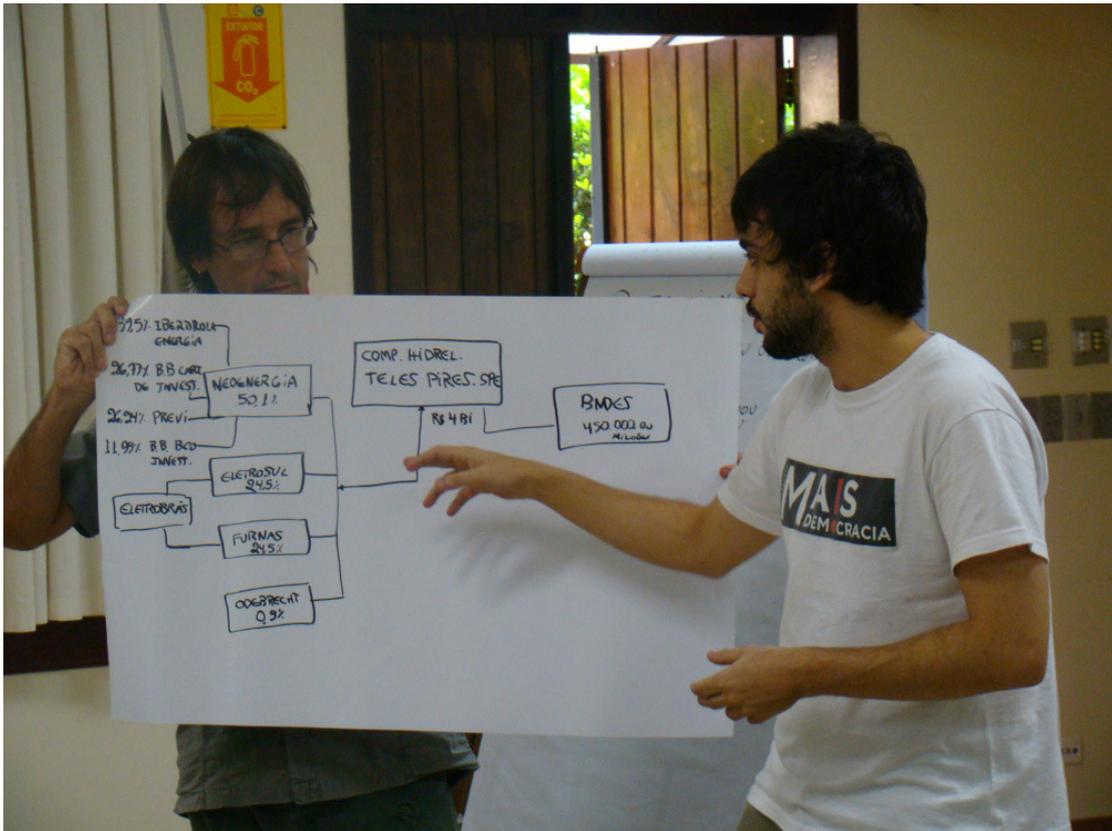
- Analisis struktur grup perusahaan kelapa sawitnya;
- Periksa apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana ia dibiayai;
- Periksa apakah penyandang dananya menyatakan bahwa mereka membiayai perusahaan ybs;
- Cari di internet;
- Minta bantuan ke lembaga riset.

Kelima langkah tersebut dibahas dalam bagian berikut.

6.2.1 Analisis struktur grup perusahaan kelapa sawit

Langkah pertama untuk menemukan penyandang dana dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berkonflik dengan Anda adalah dengan menganalisis struktur grup dari perusahaan kelapa sawit itu. Seperti kebanyakan perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan induk yang terbuka, (lihat bagian 2.2.2), biasanya pembiayaannya diatur melalui perusahaan induk ini. Penyandang dana dari perusahaan induk menjadi penyandang dana dari anak perusahaan perkebunannya juga. Dengan demikian kuncinya adalah mengetahui nama perusahaan induk yang memiliki perusahaan perkebunan ybs.

Gambar 20 Analisis struktur grup perusahaan



Informasi ini dapat ditemukan dalam laporan tahunan perusahaan induk, atau di koran. Untuk perusahaan yang lebih kecil, grup-grup perusahaan yang tertutup (tidak terdaftar di pasar modal) salah satu pilihannya adalah dengan merujuk ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mengetahui siapa yang memiliki perusahaan ybs.

6.2.2 Periksa apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana ia dibiayai

Ketika Anda telah mengidentifikasi nama perusahaan induk yang terdaftar, Anda dapat mengunduh laporan tahunan terbaru mereka dari website atau situs Bursa Efek Indonesia. Dalam laporan tahunan mereka, perusahaan memang harus mengungkapkan proporsi total aset mereka yang dibiayai oleh pemegang saham dan proporsi yang dibiayai oleh pemegang obligasi dan yang dari pinjaman bank. Informasi ini dapat ditemukan dalam neraca, yang merupakan bagian dari laporan tahunan (lihat bagian 2.3). Namun pada umumnya perusahaan tidak perlu mengungkapkan nama-nama bank atau pemegang obligasi mereka. Bagi pemegang saham, yang biasanya harus melaporkan namanya hanyalah mereka yang memiliki 3-5% saham.

Beberapa Negara mewajibkan perusahaan untuk mempublikasikan rincian lebih lanjut dari pinjaman bank mereka. Amerika Serikat adalah contoh yang paling menonjol, karena semua perusahaan yang terdaftar pada bursa saham AS harus mempublikasikan rincian kontrak pinjaman sindikasi yang mereka mereka buat dengan sindikat perbankan.

Di negara lain, aturan bursa kadang-kadang membutuhkan transparansi lebih besar pada pembiayaan bank. Di Indonesia, perusahaan induk yang terdaftar di bursa efek harus memberikan informasi mengenai pinjaman bank yang masih berlaku, dengan menyebutkan nama bank dan jumlahnya - dalam laporan tahunan mereka. Jadi untuk perusahaan-perusahaan ini, laporan tahunan merupakan sumber informasi yang sangat berguna.

Jika perusahaan induknya terdaftar di Malaysia atau Singapura, maka informasi yang harus disediakan dalam laporan tahunan mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan informasi yang harus mereka sediakan untuk BEI. Biasanya perusahaan-perusahaan ini menyebutkan daftar pendek bankir utama dalam laporan mereka, tapi tanpa rincian lebih lanjut tentang besaran pinjaman baru yang mereka dapatkan.

6.2.3 Periksa apakah penyandang dana menyatakan bahwa mereka membiayai perusahaan tersebut

Cara lain untuk mengetahui siapa yang membiayai perusahaan kelapa sawit tertentu, adalah dengan mencari informasi publikasi dari penyandang dana -penyandang dana yang mungkin membiayai perusahaan tersebut. Beberapa penyandang dana tidak melaporkan bahwa mereka membiayai perusahaan tertentu, terutama di Amerika Serikat. Maka, *The Securities and Exchange Commission* (SEC) menjadi lembaga yang menetapkan aturan untuk bank, investor institusi (seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan manajer aset) dan perusahaan-perusahaan terbuka. SEC mewajibkan investor institusi yang mengelola aset lebih dari US\$ 100 juta untuk melaporkan semua kepemilikan saham mereka kepada SEC dalam rangka mendukung kepercayaan investor.

Saat ini, makin banyak investor institusi di negara-negara lain yang telah mempublikasikan rincian nama-nama perusahaan yang mereka miliki sahamnya. Mereka melakukan ini secara sukarela, dan informasi tersebut dapat ditemukan di situs web mereka.

Bank biasanya mengklaim bahwa klausul kerahasiaan klien melarang mereka mempublikasikan rincian dari perusahaan yang mereka beri pinjaman. Untuk pinjaman dan kredit memang ada hubungan bank-klien, dan klien sering tidak ingin bank mempublikasikan informasi tentang hal ini. Tapi bank-bank dapat mencantumkan klausul yang memperbolehkan mereka menyebutkan nama-nama perusahaan yang mereka beri pinjaman dalam persyaratan pemberian kreditnya, dan syarat ini harus diterima oleh klien. Namun demikian, meskipun segelintir bank telah beroperasi dengan etis, tidak ada satu pun *private bank* yang telah melakukan hal ini.

Ada beberapa jenis pinjaman yang dapat Anda temukan informasinya. Sebagai contoh adalah pinjaman baru yang ada dalam Prinsip Equator tentang pinjaman pembiayaan proyek, dan kredit korporasi umum yang dialokasikan untuk proyek-proyek tertentu. Versi ketiga dari Prinsip Equator yang diluncurkan pada Juni 2013 berisi klausul yang mendesak bank untuk mempublikasikan rincian tentang semua *deal-deal* yang tergolong dalam Prinsip Equator di situs web mereka (lihat bagian 5.3.3). Jadi jika bank adalah penandatangan EP, Anda bisa mencari informasi ini di situs mereka.

Selain itu, bank biasanya bangga dengan keterlibatan mereka dalam pinjaman sindikasi besar, yaitu saat sekelompok bank memberikan pinjaman secara bersama-sama. Mereka menerbitkan iklan di media keuangan, menempatkan daftar di situs web mereka dan memberikan data ke database keuangan seperti Bloomberg dan Thomson. Hal ini karena para bankir ingin mendapat peringkat tinggi dalam pemeringkatan kredit sindikasinya, karena hal ini akan menarik lebih banyak klien dan juga membantu menentukan besarnya bonus yang akan mereka terima.

Dalam hal pinjaman bilateral sederhana antara bank dan perusahaan, sebagian besar bank komersial tidak mau terlalu transparan. Hal ini berbeda untuk mayoritas bank publik. Semua bank multilateral (seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia) memasukkan persyaratan dalam perjanjian kredit mereka untuk mempublikasikan nama-nama perusahaan yang mereka berikan pinjaman, yang harus diterima oleh klien sebagai bagian dari perjanjian. Di situs-situs bank publik tersebut, Anda dapat menemukan rincian perusahaan (termasuk perusahaan kelapa sawit) yang mereka biayai dan bagaimana mereka menilai keberlanjutan perusahaan yang mereka biayai tersebut.

6.2.4 Cari di internet

Khusus bagi grup perusahaan minyak sawit tertutup, tidak ada salahnya mencari lewat artikel surat kabar di internet tentang pembiayaan perusahaan. Surat kabar lokal di Indonesia kadang-kadang menerbitkan artikel yang menyebutkan nama-nama bank yang terlibat.

6.2.5 Minta bantuan ke lembaga riset

Profundo atau organisasi penelitian lain yang memiliki akses ke database mahal yang digunakan dalam industri keuangan mungkin bisa membantu Anda menemukan informasi lebih lanjut tentang pembiayaan perusahaan kelapa sawit yang menjadi target Anda. Database seperti Bloomberg dan Thomson terutama memberikan informasi tentang pemegang saham institusional dari perusahaan terbuka dan pinjaman sindikasi. Jika penelitian tersebut terlalu mahal bagi Anda, mungkin Anda bisa mencari tahu apakah BackTrack dapat membantu menutup biayanya.

6.3. Analisis atas peraturan dan kebijakan yang relevan

Setelah Anda tahu siapa bank-bank dan investornya, Anda masih harus meyakinkan mereka untuk menggunakan pengaruh mereka pada perusahaan sehingga mereka mau berdialog. Karena proses ini sering tidak mudah, persiapan yang baik sangat penting. Anda dapat memulai dengan menganalisis kebijakan *sustainability risks* dari penyandang dananya (bagian 6.3.1), diikuti dengan analisis yang lebih luas meliputi peraturan, standar dan kebijakan lain yang relevan (bagian 6.3.2).

6.3.1 Menganalisis kebijakan *sustainability risks* penyandang dana

Untuk memulai diskusi dengan penanam modal mengenai dampak sosial, lingkungan dan manusia dari perusahaan kelapa sawit yang mereka danai, kebijakan Sustainability riskspemilik modal jelas memberikan titik masuk yang baik. Sebagaimana dibahas dalam Bab 5, bank dan penyandang dana lainnya dapat mengadopsi standar CSR kolektif atau mereka dapat mengembangkan kebijakan *sustainability risks* secara individu.

Untuk mengetahui apakah ahli keuangan telah mengadopsi atau bertanda standar CSR kolektif, caranya mudah. BankTrack mempertahankan pada profil situsnya lebih dari 100 bank dan daftar komitmen keberlanjutan masing-masing bank. Biasanya komitmen ini juga disebutkan di situs lembaga keuangan atau dalam laporan tahunannya. Hal ini juga tentu akan disebutkan di situs standar kolektif, misalnya Prinsip-prinsip Equator, Inisiatif UNEP Keuangan atau Prinsip untuk Investasi Bertanggung Jawab (lihat link pada bagian 5.3). Lebih lanjut, organisasi-organisasi ini juga menuntut agar lembaga keuangan yang telah menandatangani prinsip-prinsip atas standard kolektif tadi melaporkan setiap tahun kemajuan mereka dalam mengimplementasikan prinsip tersebut. Laporan-laporan ini dapat ditemukan juga pada situs-situs inisiatif kolektif yang ada, dan kadang-kadang cukup layak juga untuk dibaca.

Selama dekade terakhir, banyak lembaga keuangan yang telah mengembangkan kebijakan *Sustainability risks* mereka sendiri. Biasanya, lebih menarik untuk mempelajari hal ini dari pada standar kolektif. Karena kebijakan ini dikembangkan secara mandiri, biasanya mereka lebih kuat berkomitmen dalam kebijakan tersebut.

Berkat tekanan dari kelompok-kelompok seperti BankTrack, makin banyak bank dan lembaga keuangan lain yang menerbitkan kebijakan *sustainability risks* ini di situs web mereka. Hal ini juga dianjurkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI).

Global Reporting Initiative (GRI) dan bank

The Global Reporting Initiative (GRI) adalah suatu kerangka kerja pelaporan keberlanjutan untuk semua jenis perusahaan, termasuk lembaga keuangan. Pada bulan Oktober 2007, bekerja sama dengan UNEP Finance Initiative (UNEP FI), GRI menerbitkan Suplemen Sektor Jasa-jasa Keuangan yang berisi panduan spesifik tentang portofolio produk, kepemilikan aktif, berinvestasi pada masyarakat lokal dan penjualan yang jujur dan terbuka atas produk-produk keuangan. Sektor Suplemen GRI sekarang disebut *GRI Sector Disclosures*. Untuk sektor keuangan pedoman ini adalah sebagai berikut:

- Publikasi dari kebijakan lembaga keuangan pada isu-isu dan industri (FS1) tertentu. Jika dokumen kebijakan ini tidak tersedia bagi publik mereka tentu saja nilai kurang, karena hal ini mencegah orang bahwa pengalaman kerugian atau kelemahan dari investasi lembaga keuangan tersebut dari verifikasi norma-norma yang harus memenuhi, dan oleh karena itu mampu untuk meminta pertanggungjawaban institusi
- Memberikan informasi mengenai investasi, yang dikelompokkan menurut wilayah, ukuran dan sektor (FS6).
- Informasi tentang bagaimana lembaga keuangan berhubungan dengan investasi yang tidak (atau tidak lagi) memenuhi kebijakan, norma, atau kondisi kontrak lembaga keuangan; sekarang secara eksplisit diminta. Lembaga keuangan harus melaporkan tindakan yang telah mereka ambil dalam situasi ini, apakah tindakan ini telah berhasil dan apa langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil (FS2, FS3 dan FS10). Meskipun banyak lembaga keuangan mengklaim menggunakan model GRI dalam laporan keberlanjutan mereka, banyak dari mereka tidak melaporkan indikator ini secara lengkap.

Menganalisis standar CSR yang diikuti oleh bank, dan kebijakan *sustainability risks* yang dikembangkan secara mandiri, menunjukkan pada Anda tempat yang paling rentan atas bank. Jika Anda bisa menunjukkan bahwa bank telah memberikan pembiayaan bagi perusahaan yang bertentangan dengan standarnya sendiri, ini artinya bank tidak bisa diandalkan, artinya lidahnya bercabang dua. Ini akan selalu memberi pukulan yang cukup keras bagi mereka.

6.3.2 Menganalisis aturan dan kebijakan lain yang relevan

Meskipun penyandang dana akan berada dalam posisi yang paling rentan ketika Anda menghadapi mereka dengan komitmen *sustainability risks* mereka sendiri, tidak ada alasan untuk membatasi analisis Anda dari peraturan yang relevan, serta standar dan kebijakan penyandang dananya. Hal ini tentu berlaku untuk kebanyakan bank di Indonesia, yang hampir tidak mengadopsi standar CSR kolektif atau mengembangkan kebijakan *sustainability risks* mereka sendiri.

Jika Anda menemukan bukti bahwa perusahaan yang mereka biayai melanggar hukum Indonesia, standar yang relevan, konvensi internasional atau praktek-praktek terbaik, akan selalu berguna membuat para penyandang dananya bertanggung jawab atas masalah ini. Bahkan jika penyandang dana itu belum memasukkan standar tersebut dalam kebijakan *sustainability risks* mereka sendiri, tetap masih relevan untuk meminta mereka menjelaskan mengapa mereka tidak memenuhi standar-standar yang telah diterima secara luas ini. Apakah mereka berpendapat bahwa standar ini tidak berlaku untuk mereka?

Kita tidak akan menggali lebih dalam jenis analisis itu di sini, karena akan tumpang tindih dengan analisis yang harus disiapkan untuk strategi lain, seperti litigasi atau non-litigasi, misalnya dengan mengirimkan keluhan ke RSPO. Tapi untuk menghargai analisis yang digunakan atas prosedur tersebut, pastinya bermanfaat untuk menganalisis dan merujuk standard-standar dengan relevansi khusus untuk sektor keuangan, seperti dibahas dalam bagian 5.3.

6.4. Tulis rangkuman yang jelas atas kasus

Untuk membawa kasus Anda kepada para penyandang dana, Anda mesti menulis ringkasan yang jelas dari kasus tersebut di atas kertas. Ringkasan ini pertama-tama harus menggambarkan fakta-fakta dasar dalam gambaran singkat - makin pendek makin baik! Fakta-fakta dasar akan mencakup:

- Nama perusahaan dan perusahaan induknya;
- Lokasi dan luasan;
- Izin yang diperoleh perusahaan;
- Lokasi masyarakat, jumlah penduduk, kegiatan masyarakat;
- Klaim atau hak-hak masyarakat atas tanah;
- Respon dari perusahaan atas klaim masyarakat;
- Hal-hal yang disoroti dalam konflik.

Untuk menemukan contoh yang baik dari ringkasan dari fakta-fakta dasar, Anda bisa melihat segmen *Dodgy Deal* di website BankTrack.

Ringkasan dari fakta-fakta dasar dapat dilengkapi dengan analisis menggunakan bahasa dan argumen yang dipahami investor. Analisis ini bisa mengikuti salah satu atau semua dari empat basis argumen di bawah ini:

- Pembiayaan perusahaan ini menciptakan resiko kepatuhan;
- Pembiayaan perusahaan ini melanggar kebijakan *sustainability risks* penyandang dananya atau standar dan norma-norma yang relevan;
- Pembiayaan perusahaan ini menciptakan resiko keuangan; dan
- Pembiayaan perusahaan ini bisa merusak reputasi pemilik modal.

Argumen moral saja sering tidak cukup kuat untuk meyakinkan para penyandang dana: sehingga penting untuk menunjukkan bahwa resiko yang akan mereka tanggung lebih besar daripada manfaatnya. Baik juga untuk mengarahkan penyandang dana pada investasi yang menguntungkan dan yang kurang beresiko.

6.4.1 Membiayai perusahaan menciptakan resiko kepatuhan

Dalam deskripsi kasus Anda, Anda dapat merujuk pada kepatuhan resiko jika Anda pikir ada alasan untuk menganggap bahwa bank, dengan membiayai perusahaan ini, bisa mengalami kesulitan dengan pengawas dan badan-badan penegak hukum. Hal ini tidak sering terjadi, namun dalam beberapa kasus, argumen seperti ini bisa diajukan. Untuk bank di Indonesia, ini bisa terjadi jika mereka tidak mengikuti peraturan khusus dari OJK (lihat bagian 4.3.1). Apakah bank bertindak sesuai dengan Peraturan Nomor 14/15/PBI/2012, yang mengharuskan bank untuk menilai “*upaya yang dilakukan oleh debitur dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup*” sebelum memberikan kredit (lihat bagian 4.3.1)?

Anda juga bisa berpendapat bahwa bank telah melawan peraturan tentang korupsi dan anti pencucian uang, terutama dalam kaitannya dengan *Politically Exposed Persons* (lihat bagian 4.3.2). Jika Anda pikir hal ini terjadi, misalnya perusahaan perkebunan dimiliki oleh mantan menteri atau gubernur, berilah argumen yang jelas!

Jika Anda berbicara dengan lembaga keuangan asing, peraturan sektor keuangan lainnya akan berlaku bagi mereka. Untuk membuat kasus dengan argumen bahwa pembiayaan perusahaan ini menyebabkan resiko kepatuhan, Anda terlebih dahulu harus mempelajari peraturan yang berlaku di negara tempat lembaga keuangan tersebut berasal.

6.4.2 Membiayai perusahaan melanggar kebijakan resiko keberlanjutan

Untuk meyakinkan penyandang dana bahwa membiayai perusahaan ini akan melanggar kebijakan *sustainability risks*, Anda harus menyusun laporan tentang pelanggaran hukum-hukum terkait hal sosial dan lingkungan, pelanggaran atas aturan dan standar yang telah terjadi atau diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari kegiatan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang akan didanai itu. Semua pelanggaran tersebut relevan, tetapi penting untuk selalu merujuk pada standar kolektif yang telah ditandatangani oleh lembaga keuangan tersebut, serta standar yang disebutkan secara eksplisit dalam kebijakan *sustainability risks* mereka.

6.4.3 Membiayai perusahaan menciptakan resiko finansial

Isu-isu keberlanjutan (seperti isu-isu lingkungan, isu-isu HAM dan isu-isu perburuhan) dapat mempengaruhi resiko finansial atas investasi tertentu. Ini bisa menjadi argumen yang berguna ketika Anda berbicara dengan pemegang saham institusional dari perusahaan kelapa sawit, karena beberapa kesepakatan terjadi dalam diskusi terkait *Socially Responsible Investment (SRI)*, yang menggarisbawahi bahwa pengelolaan yang buruk atas isu lingkungan dan sosial lama-lama akan berdampak negatif pada pencapaian finansial perusahaan.

Argumen yang sama juga relevan bagi bank. Jika bank memberikan kredit untuk perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak buruk pada lingkungan atau masyarakat setempat, ini dapat menyebabkan probabilitas gagal bayarnya lebih tinggi, misalnya karena kreditur akan kehilangan pelanggan atau berkonflik dengan pemerintah setempat. Cobalah berikan argumen yang kuat atas tingginya probabilitas gagal bayar karena praktek-praktek buruk perusahaan tersebut; misalnya dengan menyajikan contoh bahwa saat ini makin banyak perusahaan besar pembeli minyak sawit yang mengadopsi kebijakan bebas deforestasi atau dengan merujuk pada kasus-kasus di pengadilan terhadap perusahaan kelapa sawit yang telah mengakibatkan denda yang cukup besar.

6.4.4 Membiayai perusahaan bisa merusak reputasi

Baris terakhir dari argumen bahwa pembiayaan atas perusahaan itu akan merusak reputasi lembaga keuangan tidak harus dibuat gamblang dalam rangkuman kasus Anda. Rujukan halus seperti “kemauan untuk mencapai kerja sama yang konstruktif” dengan lembaga keuangan, tanpa “melibatkan jaringan kami di LSM nasional dan internasional, serta media” sudah cukup untuk menegaskan poin itu. Penting untuk selalu mengingat bahwa upaya kampanye Anda akan menjadi bagian dari perhitungan ongkos/manfaat lembaga keuangan itu; dengan memasukkan biaya resiko reputasi sebagai ongkos dalam persamaan tersebut.

6.5. Melakukan pendekatan terhadap orang yang tepat dalam lembaga keuangan

Saat kasus Anda siap di atas kertas, dengan argumen yang pas dan dalam bahasa keuangan yang tepat, Anda kemudian mengirimnya pada orang yang tepat dalam lembaga keuangan. Ingat, bank atau lembaga keuangan lainnya tidak selalu *monolitik*; departemen yang berbeda mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dan bertentangan satu sama lain, yang mungkin bisa Anda ambil manfaatnya. Mungkin ada persaingan ide-ide terkait dengan arah bank dalam mengembangkan bisnis dan misinya, dan beberapa orang bisa menentang lembaganya untuk terlibat dalam sektor komoditas dengan dampak lingkungan yang besar.

Titik awal termudah adalah dengan mendekati departemen *sustainability risks*, tetapi baik juga dicoba untuk menemukan nama dan alamat dari para *account manager* di bank yang berurusan dengan perusahaan yang sedang berkonflik dengan Anda, dan juga nama-nama dan alamat anggota Komite Resiko Kredit lembaga keuangan ybs.

Ingat bahwa orang yang bekerja di departemen *sustainability risks* umumnya ingin melihat bank mereka memiliki pertimbangan sosial dan lingkungan yang lebih serius, meskipun mereka juga digaji untuk menghindari kerusakan reputasi, dan untuk bertindak sesuai dengan kebijakan resiko mereka (lihat bagian 5.5.2). Anda bisa mencoba mengeksploitasi tujuan ganda mereka dengan terlebih dahulu mendekati mereka secara ‘diam-diam’ dan menawarkan mereka kesempatan untuk memecahkan masalah tanpa menimbulkan kerusakan reputasi (misalnya dengan menghentikan investasi atau menggunakan pengaruh internal mereka untuk mendorong manajemen perusahaan berdialog dengan LSM).

Anda dapat meminta pertemuan untuk menjelaskan kasus yang telah Anda kirimkan sebelumnya dengan lebih panjang lebar. Ketika pertemuan tersebut dilakukan, ingat untuk meminta kehadiran *account manager* dan staff departemen *sustainability risks* dari lembaga tersebut, karena orang-orang ini lebih rentan terhadap argumen yang kita ajukan dibandingkan staff dari departemen yang lain.

Pendekatan pertemuan dilakukan dengan cara yang sefaktual mungkin, sambil mendokumentasikan konsekuensi negatif operasional perusahaan terhadap keanekaragaman hayati dan masyarakat setempat. Menyajikan temuan dan kesimpulan dengan cara yang jelas, ringkas dan terstruktur dengan baik akan menghasilkan lebih banyak perhatian daripada menyajikan secara panjang lebar hal-hal emosional yang tidak akan dimengerti juga oleh para bankir.

6.6. Kirim rangkuman kasus Anda kepada analis

Karena departemen *sustainability risks* dari bank dan lembaga keuangan lainnya sering menggunakan data milik lembaga pemeringkat etika ketika mereka melakukan *screening* keberlanjutan (lihat bagian 5.5.2), menjadi bermanfaat untuk mengirim ringkasan kasus Anda kepada analis lembaga seperti itu. BankTrack mengelola *mailing list* dengan alamat beberapa analis yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut.

6.7. Menciptakan tekanan publik pada pengandang dana

Bila Anda telah mengirim laporan kasus Anda ke lembaga keuangan dan meminta pertemuan dengan mereka, kadang Anda masih akan menerima respon yang tidak diharapkan. Permintaan pertemuan dapat diabaikan, atau pertemuan dapat berlangsung, tetapi tanpa tindakan apapun setelah itu. Dalam kasus ini Anda mungkin ingin menciptakan tekanan publik terhadap lembaga keuangan tersebut, atau mengancam untuk melakukannya (tapi hanya jika Anda benar-benar bisa ‘mewujudkan’ ancaman tersebut saat diperlukan). Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi, misalnya melalui artikel surat kabar. Anda juga bisa menghadiri pertemuan atau konferensi di mana bank diharapkan akan hadir.

Anda juga bisa pergi ke pertemuan tahunan bank (Rapat Umum Pemegang Saham -RUPS) dan mengajukan pertanyaan resmi sebagai pemegang saham. Untuk melakukannya, Anda perlu membeli minimal satu saham dalam perusahaan yang akan mengadakan pertemuan tahunan itu, tetapi Anda kemudian bisa mengajak delegasi aktivis, termasuk orang-orang yang secara langsung terkena dampak kegiatan perusahaan. Hal ini mungkin mendapatkan perhatian dari RUPS.

Ide lain adalah dengan berdemonstrasi atau berpiket di depan kantor bank tersebut. Anda juga dapat mengatur pameran foto tentang dampak perkebunan yang dibiayai oleh bank ybs atau membuat sebuah situs web yang menganalisis atau mengekspos kelemahan dalam kebijakan *sustainability risks* penyandang dana itu. Gambar 18 menunjukkan beberapa contoh kegiatan LSM yang dimaksudkan untuk menciptakan tekanan publik terhadap bank.

Gambar 21 Kampanye LSM menciptakan tekanan pada bank



“Selubung amunisi” saat menawarkan laporan kepada bank HSBC (Inggris)



Datangi rapat tahunan bank dengan cat merah (maksudnya investasi bank ini ‘berdarah-darah’) - BBVA (Spanyol)



Bantu nasabah meninggalkan bank mereka dengan memotong debit card bank tersebut; di depan kantor bank - ABN Amro (Belanda)



Is your bank a carbon bigfoot?

Your bank account may be funding global warming. Want to know how much your bank accounts are adding to your carbon emissions? Find out with our easy calculator.

CARBON CALCULATOR

BALANCE (C\$)

YOUR BANK

FIND OUT →

Ajak nasabah bank menghitung apa yang dilakukan oleh bank dengan uang mereka - RBC (Kanada)



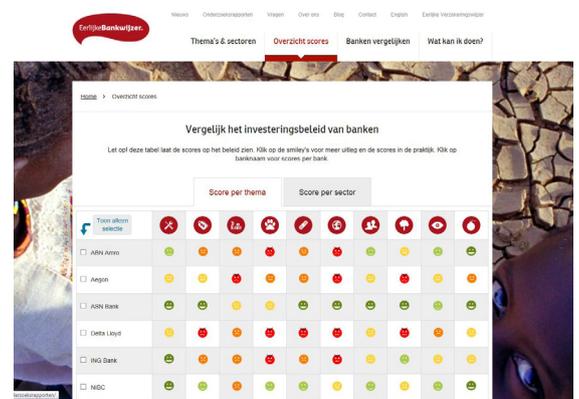
Bawa kembali limbah nuklir ke bank yang mendanainya - BNP Paribas (Prancis)



Pasang poster di bank ybs – “ANZ (Australia) kami mencemari dunia Anda”



Nyanyikan lagu sindiran di depan bank RBS (Inggris), tautannya ada di <http://www.youtube.com/watch?v=V26AyA8ZKGI>



Bandingkan kebijakan sustainability risks bank dengan bank lain yg sejenis - ING (Belanda)

Ketika Anda berurusan dengan bank asing, Anda dapat meminta LSM asing atau BankTrack untuk membantu Anda membuat tekanan pada bank. Untuk mendapatkan perhatian internasional atas kasus tertentu dan memastikan bahwa analis dan investor akan memperhatikan keluhan Anda, Anda dapat mempertimbangkan memasukkan profil bank itu dalam segmen Dodge Deal di situs BankTrack.

Seperti dijelaskan dalam Bab 5, perbankan Indonesia telah mengadopsi hampir semua standar CSR kolektif. Namun, tidak ada bank Indonesia yang telah mengadopsi kebijakan *sustainability risks* yang dikembangkan secara mandiri oleh bank-bank tersebut untuk sektor kelapa sawit, atau pada topik lain yang relevan untuk sektor ini. Satu-satunya bank di Indonesia yang telah mengambil inisiatif yang relevan adalah Bank BNI, yang merupakan penandatanganan UNEP Finance Initiative (lihat bagian 5.3.1) dan yang telah menyatakan niatnya untuk berkembang menjadi “Green Bank”.

Dalam situasi ini, menempatkan tekanan pada bank individu untuk menggunakan pengaruhnya terhadap perusahaan kelapa sawit mungkin akan terhambat oleh sikap umum perbankan Indonesia terhadap isu-isu keberlanjutan. Bank BNI telah mengindikasikan bahwa mereka tidak akan melangkah lebih lanjut dengan inisiatif “Green Banking” mereka, apabila bank terbesar di Indonesia - Bank Mandiri - tidak mengambil langkah yang sama terhadap isu *sustainability risks* tersebut.

Situasi ini membutuhkan tekanan kolektif dari koalisi LSM pada sektor perbankan, membawa sejumlah kasus konflik di sektor kelapa sawit dan sektor yang lain. Kampanye yang lebih luas seperti itu bisa membuat bank-bank Indonesia mengadopsi kebijakan *sustainability risks* sebagai langkah pertama, mengikuti contoh dari banyak rekan-rekan internasional mereka. Untuk mengaktifkan kampanye tersebut menjadi sukses, kolaborasi antara berbagai LSM akan diperlukan. Inisiatif baru untuk mendirikan sebuah Bankwiser Indonesia (lihat bagian 5.4.1) mungkin saja menjadi titik awal untuk kampanye perbankan NGO yang lebih luas.

6.8. Kirim keluhan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang tersedia

Ketika kepentingan masyarakat lokal dilanggar, misalnya ketika mereka kehilangan tanah mereka atau air mereka tercemar karena aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit, akan sangat membantu mengirim keluhan kepada penyandang dana perusahaan misalnya lewat mekanisme pertanggungjawaban mereka. Prosedur ini umumnya tersedia bagi lembaga keuangan publik (Bagian 6.8.1), tetapi jauh lebih terbatas untuk pembiayaan swasta (bagian 6.8.2). Mengajukan keluhan kepada lembaga pengawas di Indonesia mungkin bisa menjadi pilihan juga (bagian 6.8.3).

6.8.1 Lembaga keuangan publik

Prosedur akuntabilitas terdapat pada sebagian besar bank-bank multilateral publik seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Mekanisme yang terbaik hingga saat ini adalah *Compliance Advisor Ombudsman* (CAO) milik Bank Dunia, yang bekerja untuk anak perusahaan sektor swasta dari Bank Dunia, IFC dan *Multilateral Investment Guarantee Agency* atau Badan Jaminan Investasi Multilateral (MIGA). Ini berkaitan dengan keluhan dalam mengikuti prosedur mereka yang cukup ketat, seperti digariskan dalam Pedoman Operasionalnya.

Salah satu contoh adalah keluhan atas perusahaan minyak sawit Wilmar pada tahun 2007-2008 yang dibuat oleh sejumlah LSM dari Indonesia, Inggris dan Belanda. CAO memutuskan pada tahun 2009 bahwa IFC seharusnya memang tidak membiayai Wilmar, karena pembiayaan terhadap Wilmar bertentangan dengan misi IFC. CAO juga menyelenggarakan mediasi konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal. Menanggapi kesimpulan dari CAO, pada 2010 IFC melakukan moratorium semua pembiayaan kelapa sawit dan memulai dialog intensif dengan LSM untuk meninjau kebijakannya.

Meskipun ada beberapa kritik atas mekanisme ini karena dampaknya masih jauh dari yang diharapkan, hal ini tetap masih lebih maju dari apa yang tersedia pada sektor keuangan privat. Namun, sebagaimana disebutkan dalam bagian 3.3.3, Bank-bank multilateral tidak lagi memainkan peran yang sangat penting dalam pembiayaan sektor kelapa sawit Indonesia.

6.8.2 Pedoman OECD untuk perusahaan multinasional

Hingga saat ini tidak ada mekanisme akuntabilitas independen yang cukup baik dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan dalam sektor pembiayaan privat. Pilihan terbaik yang tersedia saat ini ditawarkan oleh Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional (lihat bagian 5.3.4). Standar ini memiliki sistem pengaduan dan diatur melalui *National Contact Points* (NCP) di beberapa negara OECD. NCP duduk dalam kantor-kantor pemerintah yang mesti mempromosikan pedoman dan melayani beberapa hal dalam konteks nasional. Beberapa dari mereka telah menunjuk sejumlah ahli independen untuk mengevaluasi kasus.

Sebelumnya, hanya keluhan langsung atas perusahaan yang dapat diproses, tapi dengan revisi terakhir dari Pedoman OECD, keluhan terhadap penyandang modal mereka sekarang dapat diterima. Ini merupakan mekanisme yang relatif baru, dan LSM masih dalam proses mencari tahu seberapa jauh hal ini bisa dieksplorasi dan hasil apa yang bisa dicapai dengan mekanisme ini.

Baru-baru ini, sebuah kasus telah diajukan kepada NCP di Inggris terhadap tiga bank Inggris yang telah membiayai proyek minyak dan gas Sakhalin milik Shell di Rusia. NCP Inggris menolak keluhan terhadap bank-bank tersebut, alasannya karena pedoman yang baru tidak berlaku surut; masalah yang ada terjadi sebelum pedoman yang baru ada dan ditetapkan, yaitu pada tahun 2011. Dengan demikian, kasus ini masih bisa menjadi preseden untuk kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Pada akhir 2012, NCP Belanda memutuskan bahwa investor institusional (seperti dana pensiun dan manajer aset) dapat diajukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran Pedoman OECD oleh perusahaan dimana mereka berinvestasi; meskipun mereka hanya memiliki sedikit saham atas perusahaan tersebut. Karena banyak perusahaan induk dari grup kelapa sawit telah tercatat di bursa saham dan sebagian sahamnya dimiliki oleh investor institusi dari Negara-negara OECD (lihat bagian 2.2.4), artinya terbuka peluang untuk mengajukan keluhan kepada NCP.

6.8.3 Lembaga pengawas di Indonesia

Pilihan lain dalam konteks Indonesia adalah menyampaikan keluhan kepada pengawas bank di OJK terkait *due diligence* yang harus dilakukan oleh bank saat mengucurkan fasilitas pembiayaan bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Apakah bank bertindak sesuai dengan Peraturan Nomor 14/15/PBI/2012, yang mengharuskan bank untuk menilai “upaya yang dilakukan oleh debitur dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup” sebelum memberikan kredit (lihat bagian 4.3.1)? Jika Anda bisa berpendapat bahwa jawabannya adalah tidak, mengajukan keluhan kepada OJK mungkin menjadi pilihan yang menarik .

Jalan lain mungkin untuk menyampaikan keluhan tentang kemungkinan pelanggaran aturan anti pencucian uang. Berbagai kelompok kelapa sawit, seperti Grup Bakrie, dimiliki oleh *Politically Exposed Persons* (PEP): (mantan) Kepala Negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat senior pemerintah, pejabat pengadilan atau militer, eksekutif senior dari perusahaan-perusahaan milik negara dan pejabat penting partai-partai politik. Menurut pedoman anti pencucian uang yang disepakati secara internasional dari FATF, lembaga keuangan harus ekstra hati-hati ketika berhadapan dengan PEP dan harus meneliti sumber kekayaan PEP yang mereka hadapi (lihat bagian 4.3.2).

Namun, dalam praktiknya bank sering tidak tahu, atau menutup mata, bahwa perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang mereka hadapi dimiliki oleh PEP dan memerlukan perhatian ekstra. Hal ini memberi kesempatan bagi upaya kampanye: jika mereka dapat mengekspos bahwa bank tidak menjalankan pedoman terkait PEP, hal ini dapat digunakan untuk menarik perhatian bank dan pengawas perbankan. Dalam hal ini keluhan dapat diajukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang tentunya akan mendatangkan banyak tekanan pada bank.

6.9. Coba dialog dengan penyandang dana dalam upaya resolusi konflik

Semoga usaha Anda akan membawa hasil positif, dan bank atau penyandang dana lain akan menyadari bahwa hubungan keuangan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar prinsip-prinsip kebijakan *sustainability risks* akan menciptakan resiko kepatuhan atau resiko keuangan, atau mengancam reputasinya. Atau gabungan dari semua hal di atas.

Pada titik ini, lembaga keuangan akan menyadari bahwa ia harus mengambil beberapa tindakan terhadap perusahaan, tetapi mungkin masih ragu-ragu, langkah apa yang harus diambil. Ini menyediakan kesempatan bagi anda untuk memberi masukan kepada “sekutu baru” Anda tersebut.

Cobalah untuk berdialog dan menyepakati pendekatan yang terbaik, yang bisa dijadikan landasan faktual untuk mendukung kasus Anda. Berikan usulan kepada penyandang modal tentang tuntutan mana yang bisa dibicarakan dengan perusahaan dan bermufakat pada jadwal waktu dan hasil minimum yang akan

dicapai. Ketika perusahaan masih menyangkal beberapa fakta penting, Anda juga bisa menyarankan untuk mengorganisir misi pencarian fakta bersama dengan si penyandang dananya.

Semua ini masih memerlukan banyak energi dan daya tahan. Jangan berharap terlalu banyak dari “sekutu baru” Anda tadi, Anda akan dihadapkan dengan banyak keragu-raguan dan kemungkinan mereka akan mundur. Tapi hasilnya pasti bermanfaat, karena hal ini memungkinkan Anda menyeret perusahaan perkebunan mau berdialog dalam rangka resolusi konflik, pada saat Anda telah berdialog dengan penyandang dana dari perusahaan ybs.

6.10. Hikmah pembelajaran

Saat mencoba upaya penyelesaian konflik dengan perusahaan kelapa sawit, organisasi masyarakat dan para pendukung mereka di LSM nasional dan internasional sering dihadapkan dengan perlawanan yang kuat dan bahkan situasi permusuhan. Oleh karena itu, mereka mencari opsi untuk menekan perusahaan-perusahaan ini dan membawa mereka berdialog dalam memutuskan solusi atas konflik yang ada. Ada banyak jalan yang mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Semua ini adalah strategi yang penting dan dapat saling melengkapi—oleh karenanya tidak akan tergantikan oleh strategi lain seperti *follow the money*. Ini berarti bahwa bank-bank dan penyandang dana lainnya yang menyediakan banyak modal bagi perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk mengembangkan usaha mereka, perlu diyakinkan untuk memberikan tekanan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mau berdialog dalam rangka resolusi konflik.

Dalam panduan ini kami telah mengeksplorasi bagaimana lembaga keuangan beroperasi dan peluang yang tersedia untuk mengubahnya menjadi “sekutu” LSM dan organisasi masyarakat yang ingin menyelesaikan konflik dengan perusahaan kelapa sawit. Dalam bab ini secara khusus, kami telah menjelaskan langkah-langkah yang berbeda yang diperlukan untuk mengembangkan strategi semacam ini lebih lanjut.

Gambar 22 Menyiapkan strategi bersama



Tetapi sebelum memulai jalan ini, LSM dan organisasi masyarakat harus menyadari bahwa strategi ini membutuhkan banyak energi dan mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mencapai hasil. Hal ini terutama terjadi ketika menghadapi bank-bank Indonesia, yang jelas tertinggal dari rekan-rekan internasional mereka yang datang untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan *sustainability risks*. Bank-bank di Indonesia pertama perlu diyakinkan untuk mengambil langkah pertama, yang mungkin akan membutuhkan kampanye perbankan yang luas yang melibatkan banyak LSM yang beraneka ragam.

Oleh karena itu, LSM harus mempertimbangkan dengan hati-hati, berdasarkan kasus per kasus, apakah ini adalah cara yang optimistik untuk memajukan kepentingan masyarakat lokal yang sedang berkonflik dengan perusahaan kelapa sawit. Bila jawabannya adalah iya, panduan ini mudah-mudahan bisa membantu untuk melangkah dengan keyakinan serta mencapai hasil yang diinginkan.

Appendix 1

Sumber-sumber Informasi

(Endnotes)

- 1 Yulisman, L., "Investors to spend more on palm oil refineries", *The Jakarta Post*, 10 June 2013 (<http://www.thejakartapost.com/news/2013/06/10/investors-spend-more-palm-oil-refineries.html>); Taylor, M. and Y. Supriatna, "Indonesia palm refining capacity to rise 50 pct, may cut CPO exports", *Reuters*, 4 April 2014 (<http://finance.yahoo.com/news/indonesia-palm-refining-capacity-rise-102855964.html>).
- 2 Yulisman, L., "Investors to spend more on palm oil refineries", *The Jakarta Post*, 10 June 2013 (<http://www.thejakartapost.com/news/2013/06/10/investors-spend-more-palm-oil-refineries.html>).
- 3 Yulisman, L., "Investors to spend more on palm oil refineries", *The Jakarta Post*, 10 June 2013 (<http://www.thejakartapost.com/news/2013/06/10/investors-spend-more-palm-oil-refineries.html>).
- 4 Slette, J. and I.E. Wiyono, "Indonesia 2013 Biofuels Annual", *USDA Foreign Agricultural Service*, July 2013.
- 5 ITSA Mielke GmbH, "Oil World Annual 2012", *ISTA Mielke GmbH*, 2012.
- 6 Reuters, "INSIGHT-Top palm oil producer Indonesia wants to be more refined", *Reuters*, 16 June 2012.
- 7 USDA Foreign Agricultural Service, "Indonesia: Palm Oil Production Prospects Continue to Grow", *USDA Foreign Agricultural Service*, 31 December 2007; Casson, A., "The Hesitant Boom: Indonesia's oil palm sub-sector in an era of economic crisis and political change", *Centre for International Forestry Research*, June 2000; Profundo, "Financing of the Indonesian oil palm sector", *Profundo*, July 2003.
- 8 Directorate General of Estate, "Area and Production by Category of Producers", *Website Directorate General of Estate* (ditjenbun.deptan.go.id/cigraph/index.php/viewstat/komoditiutama/8-Kelapa%20Sawit), viewed October 2012.
- 9 Directorate General of Estate, "Area and Production by Category of Producers", *Website Directorate General of Estate* (ditjenbun.deptan.go.id/cigraph/index.php/viewstat/komoditiutama/8-Kelapa%20Sawit), viewed October 2012.
- 10 Golden Agri-Resources, "Annual Reports 2003-2011", *Golden Agri-Resources*, March 2004-2011.
- 11 Wilmar International, "Annual Reports 2006-2011", *Wilmar International*, 2007-2012; PPB Group, "Annual Reports 2002-2006", *PPB Group*, 2003-2007; Wilmar Holdings, "Annual Reports 2002-2004", *Wilmar Holdings*, 2003-2005.
- 12 Indofood Agri Resources, "Annual Reports 2007-2011", *Indofood Agri Resources*, March/April 2008-2012; Indofood, "Annual Reports 2002-2006", *Indofood Sukses Makmur*, 2003-2007; Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia, "Annual Reports 2002-2006", *Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia*, 2003-2007.
- 13 Bakrie Sumatera Plantations, "Annual Reports 2002-2011", *Bakrie Sumatera Plantations*, 2003-2012.
- 14 First Resources, "Annual Reports 2008-2011", *First Resources*, 2009-2012; First Resources, "IPO Circular", *First Resources*, 3 December 2007.
- 15 Astra Agro Lestari, "Annual Reports 2002-2011", *Astra Agro Lestari*, February/March 2003-2012.

- 16 BW Plantation, "Annual Reports 2009-2011", *BW Plantation*, April 2010-2012; BW Plantation (formerly PT Bumi Perdana Prima International), "Consolidated Financial Statements for the years 2007, 2006, 2005", *BW Plantation (formerly PT Bumi Perdana Prima International)*, June 2008.
- 17 Kencana Agri, "Annual Reports 2008-2011", *Kencana Agri*, April 2009-2012; Kencana Agri, "Prospectus Dated 17 July 2008", *Kencana Agri*, 17 July 2008.
- 18 Kuala Lumpur Kepong, "Annual Reports 2002-2011", *Kuala Lumpur Kepong*, 2003-2012.
- 19 Gozco Plantations, "Annual Reports 2008-2011", *Gozco Plantations*, May 2009-2012; Gozco Plantations, "International Offering Memorandum", *Gozco Plantations*, 7 May 2008.
- 20 Genting Plantations, "Annual Reports 2009-2011", *Genting Plantations*, 2010-2012; Asiatic Development, "Annual Reports 2002-2007", *Asiatic Development*, 2003-2008.
- 21 Sampoerna Agro, "Annual Reports 2007-2011", *Sampoerna Agro*, April 2008-2012.
- 22 Sime Darby, "Annual Reports 2002-2011", *Sime Darby*, September/October 2003-2012; Golden Hope Plantations, "Annual Reports 2002-2006", *Golden Hope Plantations*, 2003-2007; Kumpulan Guthrie, "Annual Reports 2002-2006", *Kumpulan Guthrie*, 2003-2007.
- 23 Tunas Baru Lampung, "Annual Reports 2010 and 2011", *Tunas Baru Lampung*, April 2011-2012; Tunas Baru Lampung, "Financial Statements 2005-2009", *Tunas Baru Lampung*, 2006-2010.
- 24 The Jakarta Post, "IFC suspends investment in palm oil over Wilmar case", *The Jakarta Post*, 10 September 2009 (<http://www.thejakartapost.com/news/2009/09/10/ifc-suspends-investment-palm-oil-over-wilmar-case.html>).
- 25 Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Indonesia / Indonesian Banking Statistics Vol: 12 No. 2", *Otoritas Jasa Keuangan*, January 2014.
- 26 Principles for Responsible Investment, August 2013.
- 27 Principles For Responsible Investment, "Position paper Sustainable Palm Oil Investor Working Group 2011-11-17", Website PRI (http://intranet.unpri.org/index.php?fuseaction=posts.post&post_id=7681&category_id=1), viewed in April 2012.
- 28 Equator Principles Financial Institutions, "The "Equator Principles" - A financial industry benchmark for determining, assessing and managing social & environmental risk in project financing", Equator Principles Financial Institutions, July 2006.
- 29 GRI, "G4 Sustainability Reporting Guidelines", Global Reporting Initiative, May 2013.

Appendix 2

Hyperlinks

Bab 4 Bagaimana bank menilai resiko dan membuat keputusan atas utang

- Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) – <http://www.bis.org/bcbs/>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - <http://www.ojk.go.id/>
- Corporate Performance Rating Program for Environmental Management (PROPER) - <http://proper.menlh.go.id/proper%20baru/Index.html>
- Financial Action Task Force - <http://www.fatf-gafi.org/>
- International Standard on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - <http://www.ojk.go.id/>
- Corruption Eradication Commission (KPK) - <http://www.kpk.go.id/id/>
- Financial Transactions Reporting and Analysis Center (PPATK) - <http://www.ppatk.go.id/main>

Bab 5 Kebijakan pengelolaan *sustainability risks*

- United Nations Environment Programme - <http://www.unep.org/>
- UNEP Finance Initiative - <http://www.unepfi.org/>
- Declarations of the UNEP Finance Initiative - <http://www.unepfi.org/about/statements/>
- Signatories of the UNEP Finance Initiative declarations - <http://www.unepfi.org/signatories/index.html>
- Principles for Responsible Investment (PRI) - <http://www.unpri.org/about-pri/the-six-principles/>
- Signatories of the PRI - <http://www.unpri.org/signatories/signatories/>
- Oso Manajemen Investasi - <http://oso-manajemeninvestasi.com/>
- Equator Principles - <http://www.equator-principles.com/>
- Members of the Equator Principles - <http://www.equator-principles.com/index.php/members-reporting/members-and-reporting>
- IFC's Sustainability Framework - http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/ifc+sustainability/sustainability+framework/
- OECD Guidelines for Multinational Enterprises - <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>
- OECD NCP case: Environmental and labour violations at SOCAPALM in Cameroon - http://oecdwatch.org/cases/Case_203
- OECD NCP case: Shell & 3 UK banks link with violations Sakhalin II complex - http://oecdwatch.org/cases/Case_256
- United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights - http://www.unglobalcompact.org/issues/human_rights/The_UN_SRSG_and_the_UN_Global_Compact.html
- Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) - <http://www.rspo.org/>

- Members of RSPO - http://www.rspo.org/en/rspo_members
- RSPO Certification - http://www.rspo.org/en/how_to_be_rspo_certified
- RSPO Grievance Handling - http://www.rspo.org/en/grievance_handling
- Asset Owners Disclosure Project - <http://aodproject.net/>
- Carbon Disclosure Project - <https://www.cdp.net/en-US/Pages/HomePage.aspx>
- Carbon Principles - <http://carbonprinciples.org/>
- Climate Principles - <http://www.theclimategroup.org/what-we-do/news-and-blogs/the-climate-principles-finance-leaders-launch-first-global-climate-change-framework/>
- Institutional Investors Group on Climate Change - <http://www.iigcc.org/>
- Investor Network on Climate Risk - <http://www.ceres.org/investor-network/incr>
- UNEP FI's Climate Change Working Group - http://www.unepfi.org/work_streams/climate_change/working_group/index.html
- Global Reporting Initiative - <https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx>
- Natural Capital Declaration - <http://www.naturalcapitaldeclaration.org/>
- Signatories of the Natural Capital Declaration - <http://www.naturalcapitaldeclaration.org/category/signatories/>
- The Ten Principles of the UN Global Compact - <http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html>
- Participants and Stakeholders United Nations Global Compact - <http://www.unglobalcompact.org/participants/search>
- Wolfsberg Group - <http://www.wolfsberg-principles.com/>
- Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles on Private Banking - <http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/standards/Wolfsberg-Private-Banking-Principles-May-2012.pdf>
- Green Bonds Principles - <http://www.ceres.org/press/press-releases/green-bond-principles-created-to-help-issuers-and-investors-deploy-capital-for-green-projects>
- IFC Performance Standards - http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/ifc+sustainability/sustainability+framework/
- Close the Gap: Benchmarking investment policies of international banks - http://www.profundo.nl/page/show/thema-s/p328#_2010__p-328
- Dutch Fair Bank Guide - <http://www.eerlijkebankwijzer.nl/english/>
- Prakarsa - <http://theprakarsa.org/new/in/home>
- Palm oil policy of BNP Paribas - [http://cdn-actus.bnpparibas.com/files/archives/compress/wCorporate/wCorporate.nsf/docsByCode/LDIO-8CJESM/\\$FILE/Politique%20Sectorielle%20Huile%20de%20palme.pdf](http://cdn-actus.bnpparibas.com/files/archives/compress/wCorporate/wCorporate.nsf/docsByCode/LDIO-8CJESM/$FILE/Politique%20Sectorielle%20Huile%20de%20palme.pdf)
- Palm oil policy of Credit Suisse - https://www.credit-suisse.com/responsibility/doc/policy_summaries_en.pdf
- Palm oil policy of HSBC - <http://www.hsbc.com/~media/HSBC-com/citizenship/sustainability/pdf/hsbc-statement-on-forestry-and-palm-oil-march-2014.pdf>
- Palm oil policy of Rabobank - <https://www.rabobank.com/nl/images/Palm%20Oil.pdf>
- Palm oil policy of Standard Chartered - https://www.sc.com/en/resources/global-en/pdf/sustainability/Palm_Oil_Position_Statement.pdf
- Palm oil policy of UBS - http://www.ubs.com/global/en/about_ubs/corporate_responsibility/news_display_page_corporate_responsibility.html/en/2011/01/28/position_von_ubs_bei_beziehungen_zu_kunden_und.html
- No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy Wilmar International - <http://www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/No-Deforestation-No-Peat-No-Exploitation-Policy.pdf>

- EIRIS - <http://www.eiris.org/>
- Sustainalytics - <http://www.sustainalytics.com/>
- MSCI Sustainability Reporting - https://www.msci.com/insights/sri/sustainability_reporting/
- Sustainability Reporting MSCI - <http://www.inrate.com/Site/Home.aspx>

Bab 6. Menggunakan bank untuk mempengaruhi perusahaan kelapa sawit

- Informasi Perseroan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - <http://portal.ahu.web.id/info-perseroan>
- Stock Exchange Jakarta - <http://www.idx.co.id/>
- Stock Exchange Malaysia - <http://www.bursamalaysia.com/market/>
- Stock Exchange Singapore - <http://www.sgx.com/>
- Securities and Exchange Commission (SEC) - <http://www.sec.gov/>
- Profundo - <http://www.profundo.nl/page/language/english>
- BankTrack - <http://www.banktrack.org/>
- UNEP Finance Initiative - <http://www.unepfi.org/>
- Global Reporting Initiative (GRI) - <https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx>
- GRI Financial Services Sector Supplement <https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/FSSS-Complete.pdf>
- BankTrack - <http://www.banktrack.org/>
- RBS Protest Song: "Wanna pump the tar sands" - <https://www.youtube.com/watch?v=V26AyA8ZKGI>
- BankTrack - <http://www.banktrack.org/>
- Compliance Advisor/Ombudsman (CAO) - <http://www.cao-ombudsman.org/>
- OECD NCP case: Shell & 3 UK banks link with violations Sakhalin II complex- http://oecdwatch.org/cases/Case_256
- OECD NCP case: POSCO's involvement in human rights and environmental impacts in India - http://oecdwatch.org/cases/Case_261
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - <http://www.ojk.go.id/>
- Corruption Eradication Commission (KPK) - <http://www.kpk.go.id/id/>
- Financial Transactions Reporting and Analysis Center (PPATK) - <http://www.ppatk.go.id/main>

Transformasi untuk Keadilan Indonesia

Jl. Tebet Utara IIA, No. 13 Tebet, Jakarta Selatan

DKI Jakarta 12810, Indonesia

Phone: +62-21-8352955

www.tuk.or.id